BADAN POM

Laporan Kinerja 2025

Balai Besar POM di Gorontalo









KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, maka disusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Kepala BPOM, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis melalui penilaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan, meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Kinerja.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 merupakan bagian dari periode Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029 yang menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko. Penyusunan laporan ini mengacu pada capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo Tahun 2025, yang diukur berdasarkan target dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran. Selain itu, dilakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

evaluasi atas program dan kegiatan, serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama seluruh jajaran di lingkungan BBPOM di Gorontalo.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih *(Clean Government)* melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPOM di Gorontalo.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 26 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Gorontalo,

Lintang Purba Jaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai POM di Gorontalo tahun 2025 yang terdiri dari 7 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja utama. Berdasarkan analisis rata-rata nilai capaian Indikator dari 7 (sebelas) sasaran/program kegiatan, 5 sasaran strategis dengan kategori ketercapaian Sangat Baik, 1 sasaran strategis dengan kategori baik dan 1 Kategori tidak dapat disimpulkan, melalui Perhitungan NKO berdasarkan pedoman sakip nomor 676 tahun 2025 Nilai Balai Besar POM tahun 2025 terkoreksi di Angka 92,80

Dari 27 Indikator Kinerja Utama, terdapat 15 (lima belas) indikator dengan capaian “SANGAT BAIK”,8 (delapan) Indikator dengan capaian “BAIK”, dan 4(empat) Indikator dengan capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
    a) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 103,06%;
    b) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO Capaian 102,58%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c) Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 109,66%
d) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Capaian 100%
e) Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 115,50%
f) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Capaian 100,18%
g) Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 111,11%
h) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 103,23%
i) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 106,38%
j) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 108,52%
k) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Capaian 100,35%
l) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Capaian 110,71%
m) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Capaian 100%

2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian 102,86%
b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Capaian 100%
c) Jumlah desa pangan aman Capaian 100%
d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Capaian 100%

3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Capaian 100%

4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Capaian 113,24%

5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar Capaian 110%

6. Layanan Publik UPT yang Prima: Indeks Pelayanan Publik UPT Capaian 106,38%

7. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

a) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Capaian 100,03%
b) Nilai AKIP UPT BPOM Capaian 95,43%
c) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Capaian 100%
d) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Capaian 97,67%

Pada akhir tahun 2025 Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo Rp. 11.059.292.627,00 dari total pagu awal Rp. 14.824.923.000 atau 74,60%. Jika dihitung dari persentase realisasi terhadap pagu Automatic Adjusment (AA) memperoleh capaian sebesar **99,23%**. Realisasi belanja Balai POM di Gorontalo Belanja pegawai memiliki pagu sebesar Rp 4.050.806.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.975.136.664 atau 98,13%, menyisakan anggaran sebesar Rp75.669.336. Belanja barang merupakan komponen terbesar kedua dengan pagu Rp9.558.769.000 dan realisasi sebesar Rp6.280.831.643 atau 65,71%, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.277.937.357. Sementara itu, belanja modal memiliki pagu sebesar Rp1.215.348.000 dan direalisasikan sebesar Rp803.324.320 atau 66,10%, dengan sisa yang masih cukup besar yakni Rp412.023.680. Realisasi belanja menunjukkan bahwa tingkat penyerapan yang tinggi dengan Nilai Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggaran (NKA) mencapai 94,27 dengan nilai konversi 5 yaitu Sangat Baik. Untuk perhitungan Nilai efisiensi Manual berada di Angka 100% (Efisien)

Selama tahun 2025 kinerja Balai Besar POM di Gorontalo secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan melampaui target pada sebagian besar indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, pangan olahan, pembangunan Zona Integritas, pelayanan publik, serta pendampingan UMKM. Namun demikian, di balik capaian tersebut masih terdapat sejumlah kendala struktural dan operasional yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh. Kendala utama yang konsisten muncul adalah masih ditemukannya sarana distribusi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pada saat pemeriksaan, keterbatasan kesiapan pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan secara cepat, serta masuknya surat edaran atau instruksi pengawasan dari pusat secara mendadak pada tahun berjalan yang menyebabkan tumpang tindih jadwal, beban kerja tambahan, dan perlunya penyesuaian ulang perencanaan pemeriksaan. Pada beberapa indikator, seperti pengawasan pangan olahan dan sampel sediaan farmasi berisiko, kondisi geografis Provinsi Gorontalo yang memiliki wilayah sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur distribusi turut mempengaruhi kecepatan tindak lanjut dan kualitas pemenuhan standar oleh sarana.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Balai Besar POM di Gorontalo telah menerapkan langkah-langkah korektif yang terintegrasi antara fungsi pengawasan, pembinaan, dan manajemen kinerja. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan komunikasi proaktif dengan pelaku usaha melalui pendampingan intensif dan desk verifikasi guna mempercepat penyelesaian tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA), fleksibilitas perencanaan pemeriksaan melalui redistribusi target antar triwulan agar tidak terjadi penumpukan beban kerja di akhir tahun, serta optimalisasi monitoring capaian kinerja secara berkala melalui evaluasi triwulanan. Pendekatan ini terbukti efektif, tercermin dari keberhasilan penyelesaian seluruh rencana tindak lanjut pada Triwulan IV dan tercapainya realisasi 100% pada beberapa indikator kunci meskipun menghadapi kendala operasional. Di sisi tata kelola,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguatan budaya integritas, pengawasan internal, serta pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti-korupsi turut menjaga konsistensi capaian pembangunan Zona Integritas dan kualitas layanan publik.

Sebagai langkah antisipatif dalam pengelolaan risiko untuk menghadapi tahun mendatang, Balai Besar POM di Gorontalo mulai mengarahkan fokus pada penguatan manajemen risiko yang lebih terintegrasi dengan perencanaan dan pengambilan keputusan kinerja. Risiko-risiko utama seperti ketidaksesuaian realisasi pemeriksaan dengan target perencanaan, keterbatasan sinergi antara kinerja dan risiko, serta potensi peningkatan beban kerja akibat dinamika kebijakan nasional telah diidentifikasi dan dikelola dalam kerangka manajemen risiko operasional. Ke depan, organisasi merencanakan pembagian target yang lebih merata sejak awal tahun, peningkatan kualitas pemeriksaan substansial (tidak hanya administratif), penguatan verifikasi CAPA, serta pemanfaatan digitalisasi pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengendalian risiko. Dengan pendekatan tersebut, Balai Besar POM di Gorontalo tidak hanya berupaya mempertahankan capaian tinggi tahun 2025, tetapi juga memastikan keberlanjutan kinerja yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

Gorontalo, 26 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Gorontalo,

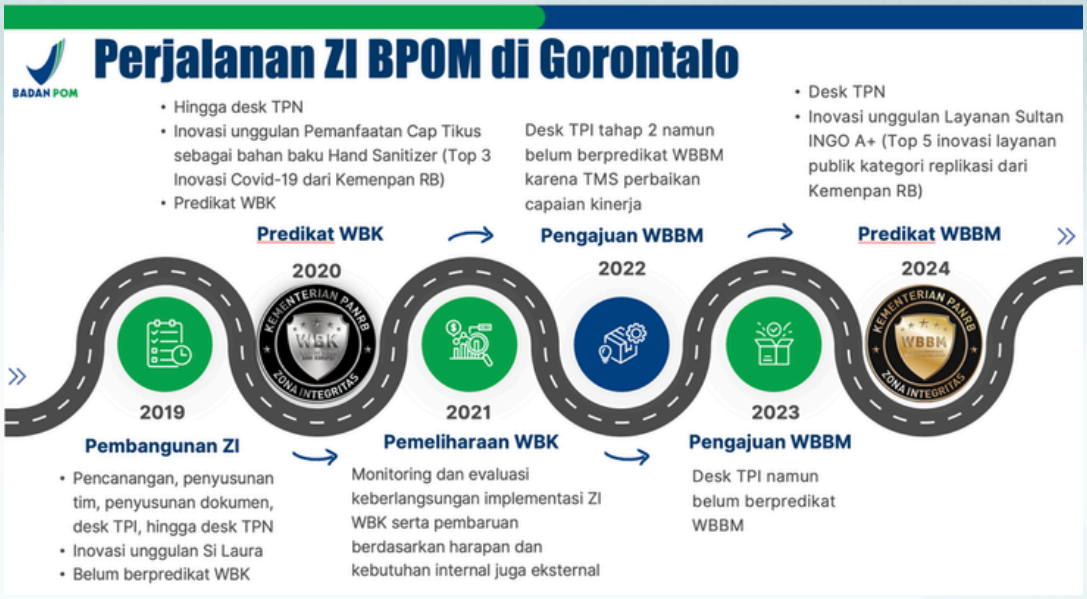
Lintang Purba Jaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Highlight Kinerja

1. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

A. **Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**
Balai Besar POM di Gorontalo telah melakukan pembangunan Zona Integritas sejak Tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2020 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2024



B. **Penandatanganan Pakta Integritas**
Balai Besar POM di Gorontalo secara rutin melakukan penandatanganan Pakta Intergritas setiap tahun seluruh personil termasuk pegawai outsourching





Highlight Kinerja

C.**Inovasi BBPOM di Gorontalo dalam bidang pemberantasan korupsi** : PATI, Jaga Intan, Lapor OM, Sinar Berakhlak

PATI

Penghargaan kepada pegawai yang melaporkan gratifikasi. Mendukung nilai **Akuntabel, Loyal, dan Berorientasi Pelayanan.**

Pengukuran dampak : Jumlah laporan gratifikasi

2022	2023	2024
6	0	6



Pengembangan

2019 : Pelaporan manual
2020 : Tambah kanal pelaporan (*barcode*, stiker, telepon, WA, formulir *online*)
2021 : Yang menolak juga membuat laporan
2024 : Penghargaan diberikan berupa barang

Jaga Intan

Identifikasi dan pelaporan mandiri potensi benturan kepentingan pegawai secara berkala. Mendukung nilai **Akuntabel, Loyal, dan Berorientasi Pelayanan.**

Pengukuran dampak : Jumlah laporan potensi benturan kepentingan

2022	2023	2024
14	8	6



Pengembangan

2020 : Pelaporan manual

2021 : Tambah formulir elektronik dan *barcode*

2022 : *Punishment* kepada pelanggar integritas

Lapor OM

Kanal pelaporan WBS oleh masyarakat. Mendukung nilai **Akuntabel, Loyal, dan Berorientasi Pelayanan.**

Pengukuran dampak : Indeks Persepsi Anti Korupsi

2022	2023	2024
3,75	3,79	3,97

Pengembangan

2019 : Pelaporan manual
2020 : Tambah kanal pelaporan (*barcode* di banner, stiker, telepon, WA, formulir *online*)
2021 : Kanal pelaporan ditampilkan di media sosial
2024 : Kanal pelaporan ditampilkan pada TV ruang layanan



Sinar BerAKHLAK

Internalisasi tematik Reformasi Birokrasi, Core Value ASN BerAKHLAK, Budaya Kerja PIKKIR, dan informasi terkini yang disampaikan melalui apel disiplin. Mendukung nilai **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**

Pengukuran dampak : Survei Indeks RB dan Core Value ASN Berakhlak

2022	2023	2024
3,776	49,3	53,9*



Pengembangan

2022 : Tema RB, Core Value ASN, Budaya Kerja PIKKIR

2023 : Tambah tema dan rutin setiap apel

2024 : Materi dibagikan melalui Grup WA Balai, Email Corporate Pegawai, dan Mading NaraZI

Highlight Kinerja

D.Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Balai Besar POM di Gorontalo tersertifikasi dengan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti Bribery Management System) sejak Tahun 2024



Anti Bribery Management System

CERTIFICATE

No. MSAC-ABS-0097

This is to certify that :

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jln. Tengah, Toto Selatan, Kabila, Bone Bolango, Gorontalo

Has established and applied

Anti Bribery Management System

for the scope of

Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak Ketiga, Sertifikasi dan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan, Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, Penindakan kasus Obat dan Makanan, Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan dan Sub Bagian Tata Usaha

Has been evaluated and found to be in line with the requirements of the following standard :

SNI ISO 37001:2016

Initial Certification Date : 10 September 2024
Certificate Issue Date : 10 September 2024
Certificate Validity Until : 09 September 2027

Authorized by Head of Certification Body

KAN
Komite Akreditasi Nasional

MSA
ISO 37001

Highlight Kinerja

2. INOVASI MANAJEMEN KINERJA

BBPOM di Gorontalo mengembangkan beberapa inovasi manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan efektifitas pecapaian tujuan sasaran strategis sebagai berikut :

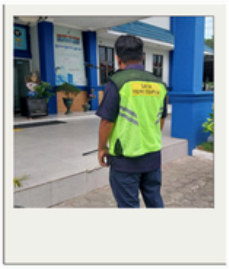
A. Rompi Keramat

Rompi Keramat

Pemberian rompi bertuliskan "SAYA TIDAK DISIPLIN" bagi pegawai yang terlambat hadir apel. Mendukung nilai **Akuntabel dan Loyal.**

Pengukuran dampak : Jumlah pegawai terlambat per jumlah pelaksanaan apel

2022	2023	2024
3/14	4/17	7/33



Pengembangan

2020 : Sanksi rompi dikenakan seharian
2021 : Tambah sanksi berdiri di barisan depan
2024 : Tambah sanksi traktir *morning coffee* seluruh pegawai

Direplikasi :
1. BPOM Manokwari (2021)

B. Remain Dawai

Remain Dawai

Pemberian *reward* kepada pegawai berpredikat *employee of the month* dan pemberian *punishment* kepada pegawai dengan akumulasi keterlambatan tertinggi. Mendukung nilai **Akuntabel dan Loyal.**

Pengukuran dampak : Jumlah *reward* dan *punishment*

2022	2023	2024
3,38	3,45	3,49



Pengembangan

2020 : Sanksi foto dipajang di grup wa Balai
2021 : Tambah sanksi setor masker
2022 : Tambah sanksi foto dipajang di ruang layanan
2024 : Tambah sanksi BAP dan pembinaan. Nilai hadiah *reward* bertambah setiap tahunnya.

C. Strike

Strike

Sistem *tracking* proses penyelesaian tagihan secara langsung melalu tautan singkat. Mendukung nilai **Akuntabel dan Kolaboratif.**

Pengukuran dampak : Survei Kebermanfaatan Inovasi

2022	2023	2024
700	648	83,07*



Pengembangan

2022 : *Tracking* tagihan LS
2024 : Dampak diukur menggunakan survei kebermanfaatan inovasi

D. Caraka

Caraka

Penyajian capaian kinerja dan anggaran progresif setiap bulan melalui media televisi ruang layanan. Mendukung nilai **Akuntabel.**

Pengukuran dampak : Survei akuntabilitas kinerja

2022	2023	2024
-	-	81,26



Pengembangan

2022 : Ditampilkan pada *drive* penyimpanan elektronik

2024 : Ditampilkan setiap hari pada ruang layanan dan data diperbarui setiap bulan

Highlight Kinerja

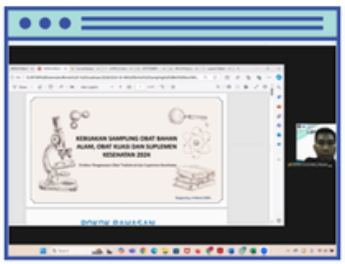
E. Lopis

Lopis

Diseminasi hasil kegiatan pengembangan kompetensi. Mendukung nilai **Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif**.

Pengukuran dampak : Jumlah kegiatan diseminasi

2022	2023	2024
5	8	15



Pengembangan

2020 : Diseminasi masih sukarela (2D-Box)
2022 : Diseminasi sharing materi di wa grup
2024 : Terjadwal untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti secara *offline*

Direplikasi :
1. BPOM Sofifi (2021)

F. Lolipop

Lolipop

Konten berbahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing pegawai. Mendukung nilai **Kompeten dan Kolaboratif.**

Pengukuran dampak : Kuis pemahaman bahasa Inggris

2022	2023	2024
-	-	16/56



https://youtu.be/e_UfDGodbb4

Pengembangan

Sebelum 2024 : Belajar bahasa Inggris inisiatif pegawai

2024 : Ada media belajar bahasa Inggris secara rutin oleh seluruh pegawai

G. QR Code

QR Code

Dokumen mutu elektronik diakses melalui *barcode* yang tersedia di ruangan kantor. Mendukung nilai **Adaptif dan Akuntabel.**

Pengukuran dampak : Survei Pemanfaatan Aplikasi

2022	2023	2024
3,38	3,45	3,49

Direplikasi :
1. BPOM Mamuju (2021)
2. Formulir routing keuangan oleh BPOM Manokwari (2021)

Pengembangan

2020 : Peralihan dokumen mutu menjadi elektronik
2023 : Integrasi penyimpanan elektronik
2024 : Integrasi penyimpanan elektronik Sistem Manajemen Anti Penyuapan



3. PRESTASI KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (2 TAHUN TERAKHIR)



Piagam Penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024 (diserahkan tanggal 2 Januari 2025)



Sertifikat Penghargaan atas komitmen yang nyata untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 (diserahkan tanggal 31 Desember 2024)

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Memberikan Penghargaan Kepada Balai POM di Gorontalo sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (diserahkan tanggal 11 Desember 2024)



Piagam Penghargaan BPOM di Gorontalo sebagai UPT Anggota Regional Manado dengan Kecepatan dan Kepatuhan Pengisian Hasil Uji pada SIPT Terbaik sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2024 (diserahkan tanggal 10 Desember 2024)

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" (diserahkan tanggal 3 Desember 2024)



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif (diserahkan tanggal 3 Desember 2024)

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diberikan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Atas Inovasi Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+) Sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 (diserahkan tanggal 9 Oktober 2024)



Piagam Penghargaan Diberikan Kepada Balai POM di Gorontalo atas pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium s/d TW III 2024 Tertinggi IX, dengan nilai 88,10%(diserahkan tanggal 1 Oktober 2024)

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan atas Partisipasi dan Dukungannya pada Pelaksanaan Kegiatan Penyelerasan Kurikulum SMK Tridharma Gorontalo Tahun 2024 (diserahkan tanggal 25 Juli 2024)



Plakat Penghargaan Sebagai Peringkat Terbaik 3 Atas Kinerja Penyidikan Badan POM Tahun 2023 Tingkat Nasional (diserahkan tanggal 18 September 2024)

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan Sebagai Peringkat Terbaik 3 Atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi luar biasa dalam menjalankan Fungsi Penindakan Terbaik (diserahkan tanggal 18 September 2024)



Piagam Penghargaan Sebagai UPT Terbaik dalam Pelaksanaaan SAKA POM

Highlight Kinerja


BADAN POM

PIAGAM

PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada Tim Agen Perubahan

Balai Besar POM di Gorontalo

Sebag .im Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik Harapan I Tahun 2025

Kategori: Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D

Penghargaan sebaagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik Harapan 1 Tahun 2025


BADAN POM

BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada:

Balai Besar POM di Gorontalo

sebagai:
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025
dengan Indeks Pelayanan Publik kategori
"Pelayanan Prima"

Jakarta, 19 November 2025
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

Piagam Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik dengan Kategori "Pelayanan Prima"

Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan sebagai Juara 1 UPT BPOM dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA Terbanyak



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Balai Besar POM di Gorontalo Sebagai Badan Publik Informatif

Highlight Kinerja



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: KEP-33/KPN.2901/2026
diberikan kepada:
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
672859
Sebagai
Satker Pengguna CMS Terbaik (100% CMS) Periode Semester II
Tahun 2025
GORONTALO, 23 FEBRUARI 2026
KEPALA KPPN GORONTALO,
Ditandatangani secara elektronik
Arief Rokhman

Piagam Penghargaan sebagai satker pengguna CMS terbaik (100% CMS) Periode Semester II Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PIAGAM PENGHARGAAN
NOMOR: KEP-33/KPN.2901/2026
diberikan kepada:
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
672859
Sebagai
Satker dengan Capaian Nilai IKPA Sangat Baik Periode Semester II
Tahun 2025
GORONTALO, 23 FEBRUARI 2026
KEPALA KPPN GORONTALO,
Ditandatangani secara elektronik
Arief Rokhman

Piagam Penghargaan sebagai satker dengan capaian IKPA Sangat Baik Periode Semester II Tahun 2025

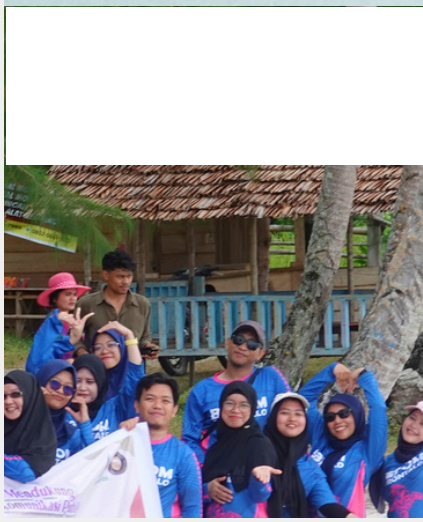
Highlight Kinerja



Piagam Penghargaan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Kementrian Pendidikan dan Menengah sebagai Terbaik 1 Kategori Lembaga Pemerintah pada kegiatan Apresiasi Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Tahun 2025













DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iv**

HIGHLIGHT KINERJA ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xxiv**

I. PENDAHULUAN **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Gambaran Umum Organisasi 2

I.3 Struktur Organisasi 4

1.4 Isu Strategis 5

II. PERENCANAAN KINERJA **13**

II.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 13

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 17

II.3 Perjanjian Kinerja (PK) 21

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 28

II.5 Metode Pengukuran 43

III. AKUNTABILITAS KINERJA **47**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 47

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 230

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 237

3.2 Realisasi Anggaran 244

IV. PENUTUP 258

4.1 Kesimpulan 258

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Balai Besar POM di Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. Penyusunan laporan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM, yang menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara sistematis dan berorientasi hasil (outcome).

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen ini menyajikan capaian indikator kinerja utama, analisis efektivitas program dan kegiatan, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kinerja. Selain sebagai instrumen evaluasi internal, laporan ini juga berfungsi sebagai media komunikasi publik guna memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait kinerja pengawasan obat dan makanan di daerah.

Dalam konteks perkembangan global dan nasional, pengawasan obat dan makanan menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Arus perdagangan yang semakin terbuka, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya transaksi perdagangan elektronik turut mempengaruhi pola distribusi dan peredaran produk di masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan potensi peredaran produk tanpa izin edar, produk substandar, maupun produk ilegal, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan responsif terhadap perubahan.

Secara geografis, Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota dengan kondisi topografi yang beragam. Beberapa wilayah relatif sulit dijangkau, sehingga memerlukan strategi pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Keberadaan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu masuk distribusi barang menjadi faktor strategis yang memerlukan peningkatan intensitas pengawasan guna memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada bidang pangan olahan dan obat tradisional, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, namun juga memerlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Gorontalo memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Melalui pendekatan pengawasan menyeluruh (full spectrum monitoring), mulai dari pengawasan pre-market hingga post-market, penguatan laboratorium pengujian, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Balai Besar POM di Gorontalo terus berupaya membangun sistem pengawasan yang kredibel dan berkelanjutan.

Seluruh pelaksanaan tugas tersebut sejalan dengan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat melalui tersedianya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, Balai Besar POM di Gorontalo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, memperkuat budaya kerja berbasis hasil, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan POM dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh Kepala UPT.

Selanjutnya dijabarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan BPOM di Gorontalo sebagai salah satu UPT BPOM dengan wilayah kerja meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing–masing sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka Investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Balai Besar POM di Gorontalo

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadikan Balai POM di Gorontalo menjadi Balai Besar POM di Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (satuan kerja bersifat mandiri) yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Susunan organisasi Balai Besar POM di Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
2. Kepala Bagian Tata Usaha, dan
3. Kelompok jabatan fungsional

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Besar POM di Gorontalo didukung dengan bagan organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya Balai Besar POM di Gorontalo harus mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu fungsi strategis negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMN, khususnya pada agenda pembangunan manusia dan peningkatan kualitas layanan publik.

Renstra BPOM menekankan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, transformasi digital, serta peningkatan efektivitas pengawasan pre-market dan post-market. Balai Besar POM di Gorontalo memiliki peran penting dalam memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

Tahun 2025 menjadi periode strategis karena adanya dinamika kebijakan nasional, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta tuntutan kinerja organisasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan isu strategis menjadi dasar dalam perumusan strategi pengawasan yang adaptif dan berkelanjutan.

Beberapa Isu Strategis yang berdampak terhadap kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo

   PDRB Provinsi Gorontalo pada triwulan III-2025 mencapai Rp14.997,21 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp8.821,93 miliar atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 5,49% (y-on-y) pada periode ini, menempatkannya di peringkat ketujuh pertumbuhan

ekonomi nasional tertinggi untuk triwulan III-2025 (Sumber BPS Provinsi Gorontalo). Kenaikan aktivitas perdagangan dan jasa ini membuka peluang bagi Balai Besar POM untuk memperluas pengawasan produk pangan olahan, distribusi obat dan kosmetik khususnya pada rantai distribusi yang meningkat aktivitasnya. Data PDRB triwulan dan tahunan juga membantu menentukan prioritas alokasi sampling dan inspeksi.

2. Peningkatan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

   Peredaran obat dan makanan ilegal di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan meningkat seiring berkembangnya pola distribusi yang semakin kompleks. Akses fisik Gorontalo yang terbuka melalui jalur darat dari provinsi lain di Pulau Sulawesi menjadikan wilayah ini rentan menjadi tujuan distribusi produk ilegal yang dibawa menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun jasa ekspedisi tanpa rantai dokumen yang jelas. Pola peredaran seperti ini menyulitkan penelusuran asal barang maupun identifikasi pelaku.

   Di sisi lain, praktik penjualan melalui media sosial dan platform e-commerce semakin mendominasi. Transaksi digital dengan metode pembayaran melalui dompet elektronik, rekening penampung, atau sistem *cash on delivery* (COD) mengakibatkan jejak transaksi tidak mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian perkara, serta memperbesar potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

   Laporan Tahunan Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2024 mencatat keberadaan 961 sarana kosmetik terdaftar, namun pengawasannya belum mencakup keseluruhan pelaku usaha di lapangan, sehingga ruang peredaran produk ilegal masih signifikan. Situasi ini menciptakan ancaman serius bagi upaya pengendalian risiko kesehatan masyarakat, serta dapat menghambat pencapaian penurunan peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Gorontalo.

3. Lemahnya Ekosistem Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik serta Keterbatasan Penanggung Jawab Teknis

   Ekosistem industri Obat Bahan Alam (OBA) dan kosmetik di Provinsi Gorontalo masih belum berkembang secara optimal. Meskipun jumlah UMKM meningkat signifikan—dari 82.732 unit pada tahun 2023 menjadi 105.509 unit pada tahun

2024 (meningkat 28%), mayoritas pelaku usaha masih bergerak di sektor makanan olahan tradisional dan kerajinan. Sementara itu, pelaku usaha di bidang OBA dan kosmetik jumlahnya masih sangat terbatas dan sebagian belum memenuhi standar produksi yang baik.

Keterbatasan Penanggung Jawab Teknis (PJT) menjadi kendala utama. Tenaga farmasi atau personel kompeten di bidang formulasi dan mutu produk lebih banyak terserap di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga ketersediaannya untuk sektor industri sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan CPKB/CPOTB serta menyusun formula yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Laporan Tahunan Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2023 mencatat 782 sarana kosmetik, meningkat menjadi 961 pada tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah sarana belum sejalan dengan peningkatan standar keamanan dan legalitas produk. Lemahnya ekosistem industri legal dan keterbatasan SDM teknis ini menghambat upaya peningkatan daya saing produk lokal dan memperbesar ketergantungan pada produk luar daerah, termasuk yang berpotensi ilegal.

4. Tekanan Ekonomi dan Tingginya Tingkat Kemiskinan yang Berdampak pada Kepatuhan Pelaku Usaha

   Kondisi sosial ekonomi Gorontalo menjadi salah satu faktor struktural yang berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan. Data BPS Tahun 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mencapai 13,24% atau sekitar 162.740 jiwa. Angka tersebut meskipun mengalami penurunan dari 13,87% pada September 2024, tetap berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat signifikan, yakni 4,68% di perkotaan dan 20,80% di pedesaan.

   Situasi ekonomi tersebut berdampak terhadap perilaku produksi dan konsumsi. Pelaku usaha mikro dan kecil cenderung melakukan efisiensi biaya produksi yang dapat mengurangi perhatian terhadap standar keamanan dan mutu produk. Kenaikan harga bahan baku, biaya logistik, dan biaya pengemasan dalam beberapa tahun terakhir—ditambah inflasi daerah yang fluktuatif dan sempat mencapai 2,88% (Maret 2025) mendorong sebagian pelaku usaha

memilih bahan baku murah atau dan dapat mempengaruhi mutu dan keamanan produk.

Dari sisi konsumen, keterbatasan daya beli mendorong preferensi terhadap produk murah yang sering kali tidak memiliki izin edar. Kondisi ini menciptakan pasar yang rentan terhadap peredaran produk ilegal, dan berdampak langsung pada keberhasilan program pengawasan serta perlindungan konsumen.

5. Penyebaran Hoaks dan Rendahnya Literasi Keamanan Obat dan Makanan

   Tingginya penggunaan internet dan media sosial di Gorontalo merupakan peluang sekaligus ancaman. Berdasarkan data BPS, 94,25% rumah tangga di Gorontalo pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, survei tahun 2023 menunjukkan 86,74% remaja usia 10–19 tahun menggunakan internet, dengan 64,94% diantaranya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan memperoleh informasi.

   Namun tingginya akses digital tidak diiringi dengan literasi informasi yang memadai. Sebagian besar masyarakat masih kesulitan membedakan informasi valid dan tidak valid terkait obat, pangan, dan kosmetik. Hal ini menyebabkan penyebaran hoaks terkait kandungan bahan pangan, keamanan obat dan kosmetik, atau klaim produk herbal yang berlebihan tersebar luas dan mempengaruhi perilaku konsumsi.

   Di tengah keterbatasan infrastruktur informasi di beberapa daerah pedesaan, masyarakat seringkali tidak memperoleh edukasi keamanan pangan dan obat dari kanal resmi. Kondisi ini memperbesar peluang masyarakat mengkonsumsi dan menggunakan produk ilegal atau tidak terstandarisasi, sehingga menjadi ancaman bagi efektivitas program edukasi dan perlindungan konsumen yang dijalankan Balai Besar POM di Gorontalo.

6. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha. Meskipun terdapat peningkatan jumlah sarana obat dan makanan yang terdaftar, kepatuhan pelaku usaha terhadap hasil pengawasan Balai Besar POM di Gorontalo masih menjadi tantangan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terutama usaha mikro terhadap regulasi keamanan produk dan kewajiban perizinan menyebabkan sebagian besar pelaku usaha belum siap untuk dilakukan pemeriksaan sarana.

   Sebagian pelaku usaha memandang pengawasan sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya tambahan, atau dapat mengganggu operasional mereka. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha menolak pemeriksaan atau

menghindari legalisasi. Jika kepatuhan terhadap pemeriksaan sarana tidak meningkat, maka upaya peningkatan keamanan dan mutu produk menjadi sulit dicapai. Rendahnya kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi standar juga berpotensi meningkatkan jumlah temuan pelanggaran di lapangan, dan menghambat pencapaian indikator pengawasan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

7. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dan Ketergantungan pada Aparat Penegak Hukum Eksternal

   Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugas. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Gorontalo tidak memiliki kewenangan penahanan, sehingga proses penyidikan memerlukan dukungan Kepolisian. Keterbatasan kapasitas dan prioritas kepolisian di daerah dapat menunda proses penindakan, penggeledahan, atau pengamanan barang bukti.

   Dalam konteks Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah dengan distribusi penduduk yang tersebar, penundaan proses penyidikan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau melanjutkan kegiatan ilegal. Kondisi ini mengurangi efek jera bagi pelaku usaha dan menghambat penyelesaian perkara secara cepat dan efektif. Keterbatasan tersebut menjadi ancaman terhadap pencapaian sasaran penurunan peredaran produk ilegal dan peningkatan efektivitas penindakan hukum di Provinsi Gorontalo.

8. Belum Optimalnya Perlindungan Pelapor dan Saksi

   Perlindungan terhadap pelapor dan saksi merupakan komponen penting dalam penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Namun, belum optimalnya mekanisme perlindungan di tingkat daerah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelanggaran. Kekhawatiran akan intimidasi, tekanan sosial, maupun potensi gangguan hubungan bisnis membuat masyarakat enggan melapor. Minimnya laporan dari masyarakat mengakibatkan banyak kasus peredaran ilegal tidak terungkap hingga akar permasalahan. Upaya pengawasan lebih banyak bergantung pada temuan petugas di lapangan, yang cakupannya terbatas. Kondisi ini memperlambat pengungkapan jaringan distribusi ilegal dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.

9. Tingginya Preferensi Konsumen terhadap Produk Murah dan Tidak Terstandarisasi

   Preferensi masyarakat terhadap produk berharga rendah menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas perdagangan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan obat sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak menanggung biaya izin edar, pengujian mutu, dan standar produksi. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang terbatas, produk-produk ini menjadi pilihan alternatif bagi sebagian besar konsumen. Preferensi ini terbentuk karena kombinasi antara kondisi ekonomi, kurangnya literasi konsumen, dan tingginya paparan iklan menyesatkan di media sosial. Jika tidak diimbangi dengan edukasi, ketersediaan produk aman, dan intervensi pasar yang tepat, maka pola konsumsi terhadap produk ilegal akan sulit dikendalikan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis Balai Besar POM di Gorontalo dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu.

   Langkah Strategis yang dapat ditempuh yaitu peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, pengalokasian anggaran yang lebih optimal untuk pemeliharaan laboratorium dan pengadaan alat baru, edukasi publik secara lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen, penyusunan pedoman teknis yang lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan di daerah.

10. Reformasi Birokrasi

    Balai Besar POM di Gorontalo melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Selain itu, upaya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan berbasis teknologi juga dilakukan guna memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

    Balai Besar POM di Gorontalo juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memastikan

keberlanjutan reformasi yang adaptif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, Balai Besar POM di Gorontalo melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas ini diterapkan melalui berbagai aspek, seperti peningkatan integritas pegawai, pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan kinerja Balai Besar POM di Gorontalo semakin meningkat dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Pembangunan Zona Integritas ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta bebas dari korupsi sehingga mampu menjadi lembaga yang semakin terpercaya dalam memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat.

11. Percepatan Penanganan *Stunting* di Provinsi Gorontalo

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia mereka dan berisiko tinggi menghadapi gangguan kesehatan jangka panjang, serta keterbatasan dalam pencapaian potensi intelektual dan produktivitas di masa depan.

Di Provinsi Gorontalo, stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, berbagai pihak terlibat, termasuk Balai Besar POM di Gorontalo. Peran Balai Besar POM di Gorontalo dalam percepatan penanganan stunting di Gorontalo diantaranya adalah melalui pelaksanaan edukasi dan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman, Germas SAPA. Melalui penerapan Keamanan Pangan baik di Desa, Sekolah maupun Pasar diharapkan peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan konsumsi pangan aman dan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

Balai Besar POM di Gorontalo juga melaksanakan inovasi Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+) yaitu pendampingan pembuatan produk minyak kelapa kampung mengandung Vitamin A yang saat ini digunakan pada program penanganan stunting di *Belle Mo'osehati* (rumah sehat) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

12. Pengawasan Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan stunting, serta memperkuat ketahanan gizi anak usia sekolah dan kelompok rentan. Program ini mencakup penyediaan makanan siap saji yang memenuhi standar gizi, keamanan, dan mutu bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.

Di Provinsi Gorontalo, implementasi MBG menghadapi tantangan geografis, infrastruktur, dan kapasitas pelaku usaha. Distribusi pangan ke wilayah terpencil meningkatkan risiko kerusakan pangan akibat waktu tempuh panjang dan keterbatasan rantai dingin. Selain itu, variasi kapasitas dapur SPPG menimbulkan ketidakseragaman standar mutu.

Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan penyedia program menjadi krusial. Balai Besar POM di Gorontalo secara aktif terlibat dalam satuan tugas pengawasan MBG. Melalui pelaksanaan sampling dan pengujian sampel makanan bergizi gratis diharapkan dapat menguatkan komitmen dari SPPG untuk menghasilkan pangan MBG yang memenuhi persyaratan keamanan.

Edukasi keamanan pangan kepada siswa juga terus dilakukan. Edukasi keamanan pangan diharapkan mampu berfungsi sebagai lapis pertahanan pertama keamanan pangan pada program MBG. Siswa yang memahami prinsip kebersihan tangan, cara menyimpan makanan, serta tanda-tanda makanan tidak layak konsumsi akan lebih mampu melindungi dirinya dari risiko keracunan pangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan penguatan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan menyeluruh untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional di sektor kesehatan dan pangan. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin memperbesar kebutuhan terhadap pengawasan yang adaptif, efektif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan arahan RPJMN tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan Obat dan Makanan, menetapkan langkah strategis melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana disebutkan dalam RPJMN bahwa penguatan sistem pengawasan pangan, obat, dan alat kesehatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa.

Renstra Badan POM Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM dalam penyusunan rencana strategis sektoral dan dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini menegaskan arah kebijakan Badan POM untuk memperkuat sistem pengawasan *Pre Market* dan *Post Market*, mendorong inovasi dan harmonisasi regulasi, memperluas jangkauan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Dengan penyusunan Renstra ini, Badan POM RI berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mencapai sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan dan pangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta memperkuat ekosistem perdagangan yang aman, adil, dan berdaya saing di era globalisasi. Berdasarkan Renstra BPOM tersebut, Balai Besar POM di Gorontalo telah merancang Rencana Strategis Balai Besar POM di Gorontalo 2025-2029 dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

A. Visi BPOM

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

B. Misi BPOM

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;

C. Tujuan BPOM

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Balai Besar POM di Gorontalo 2025

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75
		1.2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		1.3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		1.4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		1.5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		1.7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
		1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,10
		1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
		1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67
SK2	Meningkatnya efektivitas KIE	2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		2.3	Jumlah desa pangan aman	3
		2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
SK4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
SK5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
SK6	Layanan Publik UPT yang Prima	6.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
SK7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	7.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
		7.2	Nilai AKIP UPT BPOM	80,10
		7.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		7.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Balai Besar POM di Gorontalo 2025-2029. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, yang menjadi landasan dalam perencanaan kinerja instansi pemerintah.

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah

ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun n+1).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif di Provinsi Gorontalo. RKT merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran.

RKT Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai POM di Gorontalo Nomor: NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 tanggal 20 September 2024. Dokumen RKT Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja dengan target dan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1

6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,7

Pada RKT tahun 2025 terdapat perbedaan pada Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan target tahunan dengan Rencana Strategis 2025-2029. Hal ini disebabkan karena RKT Tahun 2025 telah ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Balai Besar POM di Gorontalo 2025-2029. Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan target tahunan yang terdapat pada Rencana Strategis 2025-2029 final akan disesuaikan pada Perjanjian Kinerja.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK merupakan kontrak kinerja yang menegaskan komitmen pencapaian target dalam sat tahun anggaran. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025 merupakan komitmen formal antara Kepala Balai Besar POM di Gorontalo dan Kepala BPOM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025 terdiri dari 7 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Dalam rangka pencapaian sasaran dan

target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tata cara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Perjanjian Kinerja disusun oleh Balai Besar POM di Gorontalo dengan tujuan, antara lain: i. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; ii. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; iii. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi; iv. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; v. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan target yang ditetapkan dalam RKT yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

Sesuai dengan surat Sestama No B-PR.07.2.01.25.23 pada 9 Januari 2025 Perjanjian kinerja disusun menggunakan Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.3 PK awal periode Bulan Januari – Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Dalam rangka mewujudkan target kinerja pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp14.628.300.000 sesuai DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Kemudian berdasarkan Nota dinas Sestama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025

Tabel 2.4 Revisi PK periode Bulan Januari – Desember 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	85,75
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	89,1
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	85
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	65,1
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	-	16,67
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7
		Jumlah desa pangan aman	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	16,07
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	85

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025 (awal)	Target Tahun 2025 (Revisi)
	efektif di wilayah kerja UPT			
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	90
6.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7
7.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	91,97
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3

Setelah revisi terdapat perubahan target pada PK Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 84,5 menjadi 85,75
2. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80 menjadi 87
3. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80 ke 91
4. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 75 ke 90
5. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari 88 menjadi 89
6. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dari 64,9 menjadi 65,1

Selama tahun 2025 terjadi penambahan Indikator Kinerja Utama antara lain Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman.

Sehubungan dengan adanya pergantian Kepada Balai Besar POM di Gorontalo berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 502 Tahun 2025, sehingga pada Tanggal 07 Oktober 2025 dilakukan revisi penyesuaian nama Pimpinan Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 tanpa mengubah Target pada PK sebelumnya. Alokasi anggaran juga mengalami perubahan dari pagu Awal Rp14.526.300.000 menjadi Rp14.824.923.000 berdasarkan riwayat revisi anggaran ketiga dan kesembilan tahun 2025.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025 merupakan panduan operasional yang dirancang untuk mencapai 7 sasaran strategis melalui 27 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. RAPK memuat: i. Indikator kinerja; ii. Target kinerja B1-B12; dan iii. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk masing – masing indikator disertai aktivitas yang mendukung pencapaian indikator; iv. Tanda tangan pihak pemilik kinerja (Kepala BPOM/Kepala Balai Besar POM di Gorontalo). Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Balai Besar POM di Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disertai target kinerja per triwulan dari masing-masing indikator. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi simetris *e-performance*.

RAPK awal Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 RAPK awal Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	Rp650.662.000,00
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp7.189.000,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp988.500,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	sesuai ketentuan													
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp166.961.800,00
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp114.141.800,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp57.070.900,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp28.535.450,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	Rp20.357.950,00
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			64,5	64,5	64,5	64,7	64,7	64,7	64,9	64,9	64,9	65,1	Rp2.550.247.000,00
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman													
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	Rp33.819.000,00
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp475.256.000,00
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp116.038.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	diselesaikan Sesuai standar													
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.220.512.000,00
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp80.000.000,00
													TOTAL	**Rp14.526.300,000**

Sama halnya dengan Perjanjian Kinerja, RAPK Tahun 2025 juga mengalami perubahan berdasarkan Nota dinas Sestama Nomor: PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025

Tabel 2.6 Revisi RAPK Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	Rp357.810.750,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	Rp171.997.500,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp27.081.250,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp37.913.750,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp22.463.500,00
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp22.463.500,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	Rp93.175.600,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp290.451.000,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	Rp55.796.100,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	Rp24.162.240,00
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang								85	85	85	85	85	Rp46.054.750,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	diawasi sesuai standar													
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	61.168.560
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	65	65	65	65,1	Rp2.603.067.000,00
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman												16,67	Rp10.832.500,00
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00
18	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	5	7	10	15	20	25	28	60,67	73,67	86,67	100	16,07	Rp33.819.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Pangan Olahan													
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp419.156.000,00
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp172.138.000,00
23	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
25	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.511.080.000,00
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp88.055.000,00
													TOTAL	**Rp14.824.923.000**

Setelah Terjadi Revisi terdapat perubahan target terlihat pada matriks RAPK Tahun 2025 yaitu:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 84,5 menjadi 85,75
2. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80 menjadi 87
3. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80 ke 91
4. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 75 ke 90
5. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dari 88 menjadi 89
6. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dari 64,9 menjadi 65,1

Selama tahun 2025 terjadi penambahan Indikator Kinerja Utama antara lain Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman.

Sehubungan dengan adanya pergantian Kepada Balai Besar POM di Gorontalo berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 502 Tahun 2025, sehingga pada Tanggal 07 Oktober 2025 dilakukan revisi penyesuaian nama Pimpinan Balai Besar POM di Gorontalo

Tahun 2025 tanpa mengubah Target pada PK sebelumnya. Alokasi anggaran juga mengalami perubahan dari pagu Awal Rp14.526.300.000 menjadi Rp14.824.923.000 berdasarkan riwayat revisi anggaran ketiga dan kesembilan tahun 2025.

2.5 Metode Pengukuran

Setiap Indikator Kinerja disusun dengan karakteristik, metode, serta periode pengukuran yang berbeda sesuai dengan tujuan indikator yang ditetapkan. Ketentuan mengenai definisi operasional, formula pengukuran, sumber data, frekuensi pengukuran, serta penanggung jawab indikator dituangkan secara rinci dalam Manual Indikator Kinerja sebagai acuan pelaksanaan pengukuran kinerja yang objektif dan terukur.

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengukuran masing-masing indikator, dengan menggunakan metode pengukuran yang relevan, baik melalui perhitungan kuantitatif, penilaian kualitatif, maupun kombinasi keduanya. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat pencapaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja ini berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, guna memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan keterbandingan capaian kinerja di seluruh unit kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
    a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
    b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
    c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
    d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
    e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro;
    f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas;
    g. Sumber data yang valid dan mudah telusur;
    h. Dukungan sistem informasi
2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan Normalisasi

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2.1 Capaian Indikator Kinerja

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah *(Raw Data)* dengan tertib dan menginput pada Kerta kerja pada *https://sites.google.com/view/dokumenperencanabpomgto/halaman-muka*

b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.

c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui tautan: *https://simetris.pom.go.id/eperformance_new*. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil

evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
   (1) *valid*, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   (2) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   (3) *obyektif,* yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor HK.02.02.2.01.26.64 Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM yang merupakan revisi dari Pedoman SAKIP sebelumnya (Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa hal yang mendasari revisi Pedoman Penyelenggaraan SAKIP dimaksud antara lain: (i) Adanya kebijakan dari Kementerian PAN RB terkait Penilaian Kinerja Organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024; (ii) Perubahan metodologi perencanaan kinerja yang sebelumnya menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* pada periode Renstra 2020-2024 menjadi *Logical Framework* pada Renstra 2025-2029.
2. Beberapa poin penting yang terdapat dalam Pedoman SAKIP ini antara lain:
   a) Capaian indikator kinerja maksimal adalah 110%. Jika capaian kinerja masing- masing indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%;
   b) Dalam hal penilaian kinerja organisasi (NKO) tahunan, hasil evaluasi akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP) masing-masing satker menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai akhir capaian indikator kinerja.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Gambar 2.2 Koreksi Capaian Indikator Kinerja

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu:

1) Sangat Kurang;
2) Kurang;
3) Butuh Perbaikan;
4) Baik; dan
5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Gambar 2.3 Hasil NKO

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x[(100%-(2)]x100}
1					186,52%	110%	10%	99%
2					194,82%	110%	10%	99%
3					83,33%	83,33%	10%	75%
4					112,01%	110%	10%	99%
5					105,08%	105,08%	10%	94,57%
	Total Capaian PK (4)							466,57%
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							93,31
	Predikat NKO (6)							Baik

Gambar 2.4 Contoh Perhitungan NKO Tahunan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo memiliki 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut.

Kinerja organisasi mengacu pada hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	88,37	103,06%	Sangat Baik
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58%	Sangat Baik
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	95,4	109,66%	Sangat Baik
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00%	Baik
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50%	Tidak Dapat disimpulkan
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,18	100,18%	Sangat Baik
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	Tidak Dapat disimpulkan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93,94	103,23%	Sangat Baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38%	Sangat Baik
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,67	108,52%	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	89,41	100,35%	Sangat Baik
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	94,1	110,71%	Tidak Dapat disimpulkan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104,28	104,28%	Sangat Baik
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	69,7	107,07%	Sangat Baik
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00%	Sangat Baik
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	92,39	102,86%	Sangat Baik
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	100,00%	Baik
18	Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00%	Baik
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	Baik
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	16,07	100,00%	Baik
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	85	96,25	113,24%	Tidak Dapat disimpulkan

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	99	110,00%	Sangat Baik
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	5	106,38%	Sangat Baik
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	92	100,03%	Sangat Baik
25	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	76,44	95,43%	Baik
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00%	Baik
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67%	Baik

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Gorontalo pada Tahun 2025, semua indikator memiliki capaian di atas 90%. Dari jumlah tersebut, 15 indikator berkategori Sangat Baik, 8 indikator berkategori Baik, dan 4 indikator tercatat Tidak Dapat Disimpulkan. Indikator dengan capaian tertinggi mencapai 115,50% yaitu Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sedangkan indikator dengan capaian terendah berada pada Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian 95,43%. Secara umum, capaian di atas 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap sediaan farmasi, pangan olahan, serta keamanan pangan telah berjalan sangat efektif, dengan tindak lanjut dan pelaporan yang konsisten terhadap target yang ditetapkan

Tabel 3.2 NKO Periode Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	88,37	103,06%	103,06%	10%	92,75%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58%	102,58%	10%	92,32%
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	95,4	109,66%	109,66%	10%	98,69%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00%	100,00%	10%	90%
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50%	110,00%	10%	99%
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,18	100,18%	100,18%	10%	90,16%
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	110,00%	10%	99%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	91	93,94	103,23%	103,23%	10%	92,91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38%	106,38%	10%	95,74%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,67	108,52%	108,52%	10%	97,67%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	89,41	100,35%	100,35%	10%	90,32%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	94,1	110,71%	110.00%	10%	99%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104,28	104,28%	104,28%	10%	93,85%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	69,7	107,07%	107,07%	10%	96,36%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00%	100,00%	10%	90%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
2.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	92,39	102,86%	102,86%	10%	92,57%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	100,00%	100,00%	10%	90%
		Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00%	100,00%	10%	90%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	100,00%	10%	90%
3.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	16,07	100,00%	100,00%	10%	90%
4.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96,25	113,24%	110%	10%	99%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
5.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	99	110,00%	110,00%	10%	99%
6.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	5	106,38%	106,38%	10%	95,74%
7.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	92	100,03%	100,03%	10%	90,03%
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	76,44	95,43%	95,43%	10%	85,89%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00%	100,00%	10%	90%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67%	97,67%	10%	87,90%
							Total Capaian PK	2517,91
							Nilai Kinerja Organisasi	93,26
							Predikat NKO	**Baik**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik mencerminkan nilai kinerja unit kerja secara triwulanan dan menjadi dasar dalam penetapan predikat kinerja periodik pegawai. Berdasarkan data Laporan Kinerja Tahun 2025, **Balai Besar POM di Gorontalo** menunjukkan kinerja organisasi yang **BAIK**, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **93,26** setelah dilakukan koreksi capaian yang disesuaikan dengan ketentuan bagi UPT berpredikat **AKIP BB**.

Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan total capaian indikator Perjanjian Kinerja yang telah dinormalisasi dan dikoreksi, sehingga mencerminkan tingkat kinerja yang lebih proporsional dan objektif. Secara umum, kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada periode ini masih didominasi oleh indikator dengan capaian mendekati dan di atas target, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak berada pada kategori tertinggi, kinerja organisasi Balai Besar POM di Gorontalo tetap menunjukkan konsistensi, akuntabilitas, serta kemampuan unit kerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, sejalan dengan predikat **BAIK** sesuai hasil koreksi capaian dan penilaian AKIP.

terdapat IKU yang dikecualikan dalam perhitungan NKO sampai pada penyusunan Laporan kinerja Tahun 2025 yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara sistematis untuk memastikan mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Definisi operasional yang berkaitan dengan pengukuran IKU ini adalah:

a) Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b) Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan

hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

c) Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
e) Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari capaian 4 (empat) komoditi yaitu obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Komponen penyusun perhitungan untuk setiap komoditi berdasarkan pembobotan persentase dengan aspek penilaian adalah:

a) Kesesuaian perencanaan sampling (pemenuhan target pengawasan)
b) Kesesuaian pelaksanaan sampling (kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan)
c) Kesesuaian pelaksanaan pengujian (kesesuaian parameter uji)
d) Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (akurasi dalam penentuan kesimpulan)
e) Kesesuaian pelaporan monitoring perbaikan (tanggapan atas surat tindak lanjut)

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan setiap bulan yang targetnya *flat* sama dengan target tahunan. Pengukuran menggunakan metode akumulasi dari bulan sebelumnya dan capaian indikator dihitung dengan membandingkan realisasi dan target dalam satuan persentase.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	88,37	103,06	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **85,75%** dengan realisasi senilai **88,37%.** Realisasi yang diperoleh telah melampaui target dengan peningkatan senilai **2,62%** di atas dari yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **103,06%** dan berada pada rentang 100,00%<x<110,00% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	85,75	88,37	103,06	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 sehingga tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **85,75%**; realisasi **88,38%**; capaian **103,06%**; dan

kategori **sangat baik** merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	85,75	88,37	103,06	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu 85,75% dengan realisasi tahun 2025 yaitu 88,37%. Realisasi tahun 2025 ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target Renstra dengan peningkatan senilai 2,62% di atas dari yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu 103,06% dengan kategori Melampaui

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,37	98,88	98,89
Realisasi IKU BPOM	95,92		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui realisasi Balai Besar POM di Gorontalo yaitu 88,37% merupakan yang paling rendah dibandingkan kedua unit lainnya. Realisasi BBPOM di Palangkaraya yaitu 98,88% lebih tinggi dari Balai Besar POM di Gorontalo dan lebih rendah dibandingkan BBPOM di Jayapura, sedangkan BBPOM di Jayapura dengan realisasi 98,89% merupakan yang paling tinggi di antara ketiga unit tersebut. Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo juga masih lebih rendah dari realisasi IKU BPOM yaitu 95,92% sedangkan realisasi BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura sudah lebih besar dari realisasi IKU BPOM.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Obat : Berdasarkan tarikan data SIPT, terdapat 55 sampel tidak memenuhi timeline (20 Hari Kerja) dikarenakan kendala pengadaan reagen dan kerusakan alat di Balai Penguji. Hanya ada 1 sampel belum terlapor LHU SIPT yaitu sampel vaksin bulan Juli yang diuji oleh BPPB PPPOMN. 2. OBA : Berdasarkan tarikan data SIPT sepanjang 2025, terdapat 101 sampel tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dikarenakan antrian penggunaan AAS (hanya 1 AAS yang berfungsi dan digunakan oleh 3 laboratorium Kimia), kendala ketersediaan gas untuk pengujian alat GC, dan pengujian kembali (reanalisis) sampel yang diduga TMS. Berdasarkan hasil evaluasi PPPOMN, terdapat 4 sampel TMS yang dilakukan pengujian, 3 sampel memberikan hasil TMS (termasuk sampel nomor bets baru yang diuji ulang) dan 1 sampel memberikan hasil MS. 3. SK : Berdasarkan tarikan data SIPT sepanjang tahun 2025, terdapat 28 sampel tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dikarenakan antrian penggunaan AAS (hanya 1 AAS yang berfungsi dan digunakan oleh 3 laboratorium Kimia), kendala ketersediaan gas untuk pengujian alat GC, dan pengujian kembali (reanalisis) sampel yang diduga TMS. 4. Kos : Berdasarkan tarikan data SIPT sepanjang tahun 2025, terdapat 228 sampel tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dikarenakan antrian penggunaan AAS (hanya 1 AAS yang berfungsi dan digunakan oleh 3 laboratorium Kimia), kendala ketersediaan gas untuk pengujian alat GC, dan pengujian kembali (reanalisis) sampel yang diduga TMS.	1. Obat : Melakukan follow up terhadap balai penguji (BPPB PPOMN) untuk mempercepat pelaporan dan mendokumentasikan kendala penyelesaian pengujiannya 2. OBA : Telah dilaporkan melalui Srikandi kepada Pusdatin, PPPOMN, dan Kedeputian terkait pelaporan uji ulang sampel bets baru namun belum mendapatkan respon. 3. SK : Seluruh pelaporan hasil uji sampel tahun 2025 telah selesai dilaporkan melalui SIPT. 4. Kos : Seluruh pelaporan hasil uji sampel tahun 2025 telah selesai dilaporkan melalui SIPT.	1. Obat : Melakukan follow up terhadap balai penguji (BPPB PPOMN) untuk mempercepat pelaporan dan mendokumentasikan kendala penyelesaian pengujiannya. Telah dilakukan konfirmasi dengan BPPB dan disampaikan bahwa pengujian baru akan selesai pertengahan Januari 2026 karena kendala ketersediaan hewan coba. 2. OBA : Telah dilaporkan melalui Srikandi kepada Pusdatin, PPPOMN, dan Kedeputian terkait pelaporan uji ulang sampel bets baru namun belum mendapatkan respon. 3. SK : Seluruh pelaporan hasil uji sampel tahun 2025 telah selesai dilaporkan melalui SIPT. 4. Kos : Seluruh pelaporan hasil uji sampel tahun 2025 telah selesai dilaporkan melalui SIPT.	TW IV (Selesai)	Ya	Lab.01	Pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, dan PIRT melebihi timeline 15 hari kerja

Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dapat diraih meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, antara lain kerusakan beberapa peralatan laboratorium, keterbatasan reagen, serta pemotongan anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Keberhasilan tersebut didukung oleh langkah-langkah strategis yang responsif terhadap arahan pimpinan, yaitu pengaturan ulang jadwal penggunaan alat yang masih berfungsi melalui sistem lembur terencana, peminjaman reagen dari UPT regional lainnya, serta optimalisasi anggaran melalui negosiasi efektif dengan penyedia lokal. Selain itu, dilakukan prioritas tindak lanjut berdasarkan tingkat risiko sampel sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Upaya perbaikan ke depan difokuskan pada penguatan pemeliharaan preventif peralatan, peningkatan manajemen stok reagen melalui perencanaan kebutuhan dan *buffer stock*, optimalisasi perencanaan anggaran berbasis risiko, serta peningkatan koordinasi dan sistem monitoring tindak lanjut sampel. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian kinerja dan meningkatkan ketahanan sistem terhadap keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan kinerja yang adaptif dan kolaboratif, sehingga indikator tetap tercapai bahkan dalam kondisi keterbatasan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh rangkaian program dan kegiatan yang terlaksana secara terintegrasi dan terkawal dengan baik, mulai dari tahap sampling, pengujian, hingga pelaporan hasil, serta diperkuat dengan program peningkatan kompetensi petugas dan penguatan sumber daya pengujian.

   Pada tahap sampling, pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan sesuai perencanaan berbasis risiko dengan pengendalian mutu administrasi dan

teknis yang ketat. Koordinasi yang efektif antara petugas lapangan dan laboratorium memastikan kesesuaian jenis sampel, kelengkapan dokumen, serta ketepatan waktu pengiriman sehingga proses pengujian dapat segera dilakukan tanpa hambatan.

Pada tahap pengujian, manajemen laboratorium menerapkan prioritas berbasis risiko, pengaturan jadwal penggunaan alat secara optimal, serta pengawasan mutu internal untuk menjamin validitas dan ketepatan waktu hasil uji. Meskipun terdapat keterbatasan sarana dan sumber daya, pengelolaan operasional yang adaptif mampu mencegah terjadinya penumpukan sampel dan menjaga kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Pengujian, Petunjuk Teknis Regionalisasi, dan SOP yang berlaku.

Pada tahap pelaporan dan tindak lanjut, hasil pengujian disampaikan secara tepat waktu melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dengan mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang rutin. Sistem pengendalian progres memastikan setiap sampel berisiko yang telah diuji segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengawasan berjenjang oleh pimpinan turut memperkuat akuntabilitas dan konsistensi capaian indikator. Keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh program peningkatan kompetensi petugas, melalui kegiatan pelatihan teknis (*online* dan *offline*), pembinaan internal (supervisi), diseminasi, dan kegiatan Coaching, Mentoring, dan Counselling (CMC) guna memastikan pemahaman terhadap metode sampling dan pengujian terkini serta prinsip manajemen risiko yang menyertainya. Peningkatan kapasitas SDM ini berkontribusi langsung terhadap kualitas sampling berbasis risiko, hasil uji, efisiensi proses kerja, dan ketepatan pengambilan keputusan tindak lanjut.

Selain itu, dilakukan pengadaan dan optimalisasi sumber daya pengujian (sarana dan prasarana) secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Pemeliharaan peralatan secara preventif, pemenuhan reagen kritis, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan layanan pengujian. Langkah ini memastikan dukungan infrastruktur tetap memadai dalam menunjang capaian indikator.

Dengan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dari hulu ke hilir, penguatan kompetensi SDM, dan pengelolaan sarana prasarana yang terencana, menjadikan program utama yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini secara optimal dan berkelanjutan.

b. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Farmakovigilans merupakan ilmu dan aktivitas tentang deteksi, pengkajian (*assessment*), pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Tujuan Farmakovigilans antara lain menemukan masalah terkait dengan penggunaan obat dan menyampaikan temuan tersebut pada saat yang tepat dan memberikan kontribusi dalam penilaian manfaat, bahaya, khasiat, dan risiko obat untuk mencegah dampak yang merugikan dan untuk memaksimalkan manfaat obat tersebut.

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat namun belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian obat dengan dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. KTD/ESO yang terjadi dapat dilaporkan oleh pasien melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Fasyankes yang dapat melaporkan KTD/ESO adalah rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Untuk meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan/tenaga medis akan pentingnya pelaporan KTD/ESO, maka perlu dilakukan pemberian KIE Farmakovigilans. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Pada Tahun 2025, terdapat 45 tenaga kesehatan yang akan diberikan KIE Farmakovigilans.

Defenisi Operasional

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut.
c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik.
d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans

Cara perhitungan:
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%.

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58	Sangat Baik

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 26%, realisasi yang dicapai adalah sebesar 26,67%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 102,58%. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan upaya peningkatan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang Tahun 2025

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	26	26,67	102,58	Sangat Baik

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO baru

mulai ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025. Pada Tahun 2022 hingga 2024, indikator ini belum memiliki target maupun realisasi yang dapat dijadikan dasar pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 26% berhasil direalisasikan sebesar 26,67%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,58% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan telah berjalan secara optimal pada tahun awal pengukuran, sekaligus menjadi baseline penting untuk evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26	26,67	102,58	Melampaui

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Target Renstra pada Tahun 2025 sebesar 26% telah berhasil direalisasikan sebesar 26,67%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,58%.

Capaian tersebut termasuk dalam kategori Melampaui, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan telah berjalan lebih optimal dari yang direncanakan pada tahun awal periode Renstra 2025–2029. Hal ini menjadi modal awal yang positif dalam mendukung pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26,67	27,08	11,11
Realisasi IKU BPOM	27,32		

BBPOM Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis dalam klasifikasi yang setara menunjukkan capaian kinerja yang kompetitif pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO. Realisasi kinerja BBPOM Gorontalo tercatat sebesar 26,67%, yang berada pada kisaran capaian UPT pembanding, yaitu BBPOM Palangkaraya sebesar 27,08%, serta lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jayapura sebesar 11,11%. Namun capaian ini masih sedikit di bawah capaian nasional sebesar 27,32%.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja BBPOM Gorontalo dalam mendorong partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) telah berada dalam rentang capaian yang sebanding dengan unit pembanding berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT oleh Badan POM. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pembinaan dan penguatan jejaring pelaporan farmakovigilans di wilayah kerja, sebagai bagian dari kontribusi BBPOM Gorontalo dalam mendukung sistem pengawasan obat yang terintegrasi secara nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Kendala: dari 45 sarana yang diberikan bimtek farmakovigilans, masih sedikit sarana kesehatan yang dengan kesadaran sendiri mau melaporkan KTD/ESO ke aplikasi e-meso baik karena tidak tau cara melaporkan, tidak menemukan kasus KTD/ESO, belum membuat akun di aplikasi maupun alasan lainya, sehingga perlu effort dari petugas untuk mengadvokasi kembali ke sarana-sarana tersebut dan mendampingi mereka dalam melakukan pelaporan; perlu memberikan apresiasi ke sarana yang telah melaporkan KTD/ESO namun ketersediaan gimmic masih kurang	jumlah sarana yang melaporkan KTD/ESO telah memenuhi target	jumlah sarana yang melaporkan KTD/ESO telah memenuhi target	TW 1V (Selesai)	Ya	PEM. 03	Sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO di dalam sistem e-meso

Capaian kinerja pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembinaan farmakovigilans yang secara konsisten dilakukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), khususnya dalam meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap mekanisme pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) melalui aplikasi *e-meso*. Intervensi berupa sosialisasi, pendampingan teknis, serta advokasi pelaporan turut berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif fasyankes untuk melaksanakan pelaporan secara mandiri, sehingga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko penggunaan obat di wilayah kerja.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi capaian indikator, antara lain keterbatasan jumlah sarana yang memiliki tenaga kesehatan terlatih dalam pelaporan KTD/ESO, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi *e-meso* akibat keterbatasan pemahaman teknis, serta minimnya ketersediaan *gimmick* atau bentuk apresiasi non-finansial bagi sarana yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaporan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya kontribusi pelaporan dari seluruh fasyankes yang menjadi target pembinaan.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, direkomendasikan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi target pelaporan KTD/ESO melalui penguatan strategi

pembinaan berbasis risiko, intensifikasi pendampingan teknis penggunaan aplikasi *e-meso*, serta pemberian apresiasi kepada fasyankes pelapor sebagai bentuk *positive reinforcement* untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna memastikan keberlanjutan pelaporan KTD/ESO sebagai bagian integral dari implementasi sistem farmakovigilans nasional. Upaya tindak lanjut tersebut direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap hingga Triwulan IV Tahun 2025, dengan fokus pada peningkatan jumlah sarana yang secara aktif dan konsisten melakukan pelaporan melalui sistem *e-meso.*

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Pencapaian kinerja pada Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo tidak terlepas dari implementasi sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan farmakovigilans. Salah satu intervensi utama yang telah dilaksanakan adalah pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara daring kepada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terkait pentingnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) sebagai bagian dari sistem pemantauan keamanan obat pasca pemasaran. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan awareness serta pemahaman teknis terhadap kewajiban pelaporan melalui sistem *e-meso*.

   Selain itu, Balai Besar POM di Gorontalo juga melaksanakan pendampingan teknis terhadap sarana yang telah menerima KIE, khususnya dalam proses pengisian dan penyampaian laporan KTD/ESO melalui aplikasi *e-meso*. Pendampingan ini menjadi faktor krusial dalam mengatasi kendala operasional yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap alur pelaporan maupun aspek teknis penggunaan aplikasi, sehingga mampu meningkatkan jumlah fasilitas yang melakukan pelaporan secara aktual.

Sebagai bentuk penguatan motivasi dan keberlanjutan partisipasi pelaporan, Balai Besar POM di Gorontalo turut memberikan apresiasi berupa *gimmick* kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah didampingi dan menunjukkan komitmen melalui pelaporan KTD/ESO. Pendekatan ini berfungsi sebagai *positive incentive* yang mendorong kepatuhan pelaporan secara berkelanjutan serta memperluas partisipasi sarana lain dalam sistem pelaporan farmakovigilans.

C. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengawasan terhadap pangan olahan berisiko dilakukan untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut atas hasil pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin efektif pengawasan dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat pangan olahan yang tidak memenuhi syarat. Definisi operasional yang berkaitan dengan pengukuran IKU ini adalah:

a) Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
b) Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
c) Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d) Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
    1) kesesuaian target sampel UPT;
    2) kesesuaian parameter uji;
    3) ketepatan pengambilan kesimpulan;
    4) ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
    5) ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

e) Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan setiap bulan yang targetnya *flat* sama dengan target tahunan. Pengukuran menggunakan metode akumulasi dari bulan sebelumnya dan capaian indikator dihitung dengan membandingkan realisasi dan target dalam satuan persentase.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	95,4	109,66	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **87%** dengan realisasi senilai **95,4%.** Realisasi yang diperoleh telah melampaui target dengan peningkatan senilai **8,4%** di atas dari yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **109,66%** dan berada pada rentang 100,00%<x<110,00% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	87	95,4	109,66	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 dan tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024 sehingga capaian tidak dapat diukur. Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **87%**; realisasi **95,4%**; capaian **109,66%**; dan kategori **sangat baik** merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	95,4	109,66	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu **87%** dengan realisasi tahun 2025 yaitu **95,4%**. Realisasi tahun 2025 ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target Renstra dengan peningkatan senilai **8,4%** di atas dari yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu **109,66%** dengan kategori "**Melampaui**"

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,4	93,2	99,79
Realisasi IKU BPOM	96,09		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut menunjukkan bahwa BBPOM Jayapura memiliki kinerja tertinggi dengan capaian **99,79%**, diikuti oleh BBPOM Gorontalo sebesar **95,4%**, dan BBPOM Palangkaraya sebesar **93,2%**. Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM Palangkaraya masih lebih rendah dari realisasi IKU BPOM yaitu sebesar **96,09%** sedangkan realisasi BBPOM di Jayapura sudah lebih besar dari realisasi IKU BPOM.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Berdasarkan tarikan data SIPT sepanjang tahun 2025, terdapat 107 sampel yang tidak memenuhi timeline pengujian akibat pengulangan uji karena intensitas alat ICPMS yang tidak linier dengan penambahan konsentrasi sehingga diperlukan kalibrasi berulang.	Seluruh hasil uji telah selesai dilaporkan melalui SIPT	Seluruh hasil uji telah selesai dilaporkan melalui SIPT	TW IV (Selesai)	Ya	Lab.01	Pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, dan PIRT melebihi timeline 15 hari kerja

Indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 berhasil melampaui target

yang ditetapkan. Capaian ini dapat diraih meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, yaitu terdapat sampel pangan olahan yang tidak memenuhi timeline pengujian. Hal ini disebabkan oleh kendala teknis di laboratorium, diantaranya kerusakan pada alat, keterbatasan reagen media karena adanya efisiensi anggaran. Walaupun mengalami kendala, seluruh hasil uji yang telah selesai tetap dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu pada akhir tahun melalui SIPT.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa langkah strategis sesuai dengan arahan dari pimpinan, yaitu melakukan pengujian sampel di balai regional lainnya, sistem lembur secara bergantian dengan lab kimia lainnya, peminjaman reagen media dari balai regional lainnya, optimalisasi anggaran, serta pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara maksimal. Sebagai upaya perbaikan ke depan dilakukan pemeliharaan dan perbaikan kapasitas laboratorium, melakukan perencanaan kebutuhan reagen media, optimalisasi perencanaan anggaran, serta pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Diharapkan melalui beberapa tindak lanjut ini dapat meningkatkan perbaikan kinerja di masa mendatang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

   Pencapaian indikator persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dimulai dari pengawasan sampai pada pengujian sampel laboratorium.

   Pada tahap pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan konsisten terhadap pangan olahan berisiko, melakukan koordinasi lintas unit yang baik sehingga memungkinkan proses tindak lanjut terhadap sampel dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi. Pada tahap pengujian, laboratorium memiliki komitmen dalam menyelesaikan pengujian meskipun menghadapi beberapa kendala teknis pada peralatan, keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada. Melalui pengelolaan operasional yang adaptif laboratorium mampu mencegah terjadinya penumpukan sampel dan menjaga kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Pengujian, Petunjuk Teknis Regionalisasi, dan SOP yang berlaku. Pada tahap pelaporan dan

tindak lanjut, hasil pengujian sampel disampaikan melalui SIPT yang mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil pengujian sehingga turut mempercepat proses pemantauan dan pelaporan kinerja.

Keberhasilan pada indikator ini juga ditunjang oleh peningkatan dan pemeliharaan kompetensi teknis sampling dan pengujian kepada petugas sampling maupun personil laboratorium baik personil baru maupun personil ahli melalui supervisi, magang, bimbingan teknis internal, webinar, dan mengikuti forum diseminasi hasil pelatihan. Peningkatan kapasitas SDM ini berkontribusi langsung terhadap kualitas sampling berbasis risiko, hasil uji, efisiensi proses kerja, dan ketepatan pengambilan keputusan tindak lanjut.

Faktor berikutnya yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah dilakukan pengadaan dan optimalisasi sumber daya pengujian serta pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana laboratorium di antaranya suku cadang, instrumen laboratorium, serta kalibrasi alat gelas maupun alat hitung sehingga meminimalkan faktor kesalahan yang berpengaruh terhadap validitas hasil pengujian.

d. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

a) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
b) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui

bahwa target yang ditetapkan adalah 100% dengan realisasi 100%. Realisasi yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah 100% dan termasuk dalam kategori Baik.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	100	100	100	Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 sehingga tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target 100%; realisasi 100%; capaian 100%; dan kategori baik merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	Tercapai

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu 100% dengan

realisasi tahun 2025 yaitu 100% dengan capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu 100% dengan kategori Baik.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	-
Realisasi IKU BPOM	62,68		

Berdasarkan data yang tersaji, realisasi kinerja Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM di Palangkaraya mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan yang diterima telah diuji sesuai standar, baik dari aspek ketepatan metode, kelengkapan parameter uji, maupun kesesuaian prosedur laboratorium. Sementara itu, realisasi pada BBPOM di Jayapura berada di bawah capaian kedua satker tersebut, sehingga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam memastikan seluruh sampel KLB dapat diuji sesuai standar yang ditetapkan. Perbedaan capaian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, jumlah dan kompleksitas sampel, maupun kendala teknis lainnya.

Secara keseluruhan, capaian 100% pada dua satuan kerja tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam menjamin mutu dan keandalan hasil pengujian, yang pada akhirnya berkontribusi pada perlindungan kesehatan masyarakat melalui penanganan kasus keracunan pangan yang cepat, tepat, dan akuntabel.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Tidak ada kendala	1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kelengkapam laporan investigasi KLB KP 2. Sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait persyaratan pengambilan sampel KLB yang akan dilakukan Pengujian. 3. Sosialisasi dengan tim puskesmas terkait data surveilans yang akan dilaporkan kepada BPOM	-	-	Tidak		

Capaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar didukung oleh kesiapan laboratorium, kompetensi SDM, serta koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dalam penanganan KLB. Kelengkapan administrasi dan ketepatan parameter uji juga menjadi faktor utama keberhasilan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, diperlukan penyempurnaan melalui:

a) Penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kelengkapan laporan investigasi KLB.
b) Sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai persyaratan teknis pengambilan dan pengiriman sampel.
c) Sosialisasi kepada tim puskesmas terkait kelengkapan dan ketepatan data surveilans yang dilaporkan.

Tindak lanjut dilakukan rapat koordinasi berkala, penyusunan dan distribusi panduan teknis sampling, bimbingan teknis kepada petugas surveilans, serta monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan kualitas sampel. Upaya ini bertujuan menjaga konsistensi capaian dan meningkatkan kualitas respons terhadap KLB Keracunan Pangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar sangat dipengaruhi oleh efektivitas program pengawasan dan respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB). Keberhasilan capaian didukung oleh pelaksanaan kegiatan surveilans keamanan pangan, koordinasi lintas sektor dalam investigasi KLB, serta kesiapan laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai metode dan standar yang berlaku. Selain itu, kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, serta petugas puskesmas terkait tata cara pengambilan dan pengiriman sampel turut meningkatkan kualitas dan kelengkapan sampel yang diterima, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.

Secara keseluruhan, sinergi antara program surveilans, penguatan laboratorium, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh sampel KLB dapat diuji sesuai standar secara konsisten dan tepat waktu.

e. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengawasan terhadap produk PIRT berisiko dilakukan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut atas hasil pengawasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin efektif pengawasan dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko kesehatan akibat produk PIRT yang tidak memenuhi syarat. Definisi operasional yang berkaitan dengan pengukuran IKU ini adalah:

a) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
b) Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
c) Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d) Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
e) Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,5	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah 80% dengan realisasi senilai 92,4%. Capaian indikator ini adalah 115,5% dan berada pada rentang x>110,00% sehingga termasuk dalam kategori Tidak dapat disimpulkan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	80	92,4	115,5	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 dan tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024 sehingga capaian tidak dapat diukur. Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target 80%; realisasi 92,4%; capaian 115,5%; dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	92,4	115,5	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu 80% dengan realisasi tahun 2025 yaitu 92,4%, capaian 115,5% dengan kategori “Melampaui”

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,4	92,86	100
Realisasi IKU BPOM	94,64		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut menunjukkan bahwa BBPOM Jayapura memiliki kinerja tertinggi dengan capaian 100%, diikuti oleh BBPOM Palangkaraya sebesar 92,86%, dan BBPOM Gorontalo sebesar 92,4%. Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM Palangkaraya masih lebih rendah dari realisasi IKU BPOM yaitu sebesar 94,64% sedangkan realisasi BBPOM di Jayapura sudah lebih besar dari realisasi IKU BPOM.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat 4 sampel kesalahan penetapan kesimpulan akhir karena memperhitungkan hasil penilaian penandaan 2. Terdapat 1 sampel PIRT Januari yang baru diterbitkan evaluasi dari kedeputian dan perlu dilakukan pengujian ulang untuk parameter As dan Cd (ketidaksesuaian syarat keberterimaan untuk PIRT), dan Salmonella (sebelumnya uji Staphylococcus, seharusnya Salmonella untuk PIRT) 3. Berdasarkan data SIPT, sejumlah 16 sampel memenuhi timeline (sebelum tanggal 15 bulan berikutnya) dan 9 sampel tidak memenuhi timeline (karena kerusakan alat HPLC, uji ulang sampel TMS, dan kendala penyediaan gas dari vendor tunggal)	1. Telah bersurat ke kedeputian dan pusdatin untuk rollback sampel di SIPT 2. Telah dilakukan pengujian kembali sesuai hasil evaluasi dari kedeputian dan berkoordinasi dengan kedeputian terkait hasil evaluasi. 3. Telah dilakukan penyelesaian sampel dan pelaporan SIPT untuk seluruh sampel PIRT	1. Telah bersurat ke kedeputian dan pusdatin untuk rollback sampel di SIPT sehingga dapat dilakukan perbaikan kesimpulan akhir oleh UPT 2. Telah dilakukan pengujian kembali sesuai hasil evaluasi dari kedeputian dan berkoordinasi dengan kedeputian terkait hasil evaluasi. Telah diterima hasil evaluasi pengujian TW2 dari Ditwasdar yang menyatakan seluruh pengujian PIRT telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 3. Telah dilakukan penyelesaian sampel dan pelaporan SIPT untuk seluruh sampel PIRT	TW IV (Selesai)	Ya	PEM. 15 Lab.02	Jumlah Sampel Makanan Acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan tinggi Pengujian sampel Tidak sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian yang berlaku

Indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Walaupun capaian kinerja tahun 2025 secara angka melampaui target, keterbatasan evaluasi membuat hasilnya belum dapat dikategorikan secara pasti. Hal ini menegaskan perlunya perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi agar indikator PIRT dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih valid di masa mendatang.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam proses pengambilan kesimpulan, pengujian ulang karena ada perbedaan parameter dan syarat keberterimaan, kerusakan pada alat laboratorium, kendala teknis pada laboratorium. Beberapa kendala ini telah ditindaklanjuti sehingga seluruh

sampel PIRT dapat dilaporkan hasil ujinya melalui SIPT secara lengkap dan tepat waktu pada akhir periode.

Sebagai upaya perbaikan ke depan dilakukan komunikasi dan kerja sama yang lebih baik dengan kedeputian dan lintas sektor terkait, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kapasitas laboratorium, melakukan perencanaan kebutuhan reagen media, optimalisasi perencanaan anggaran, serta pengelolaan risiko secara berkelanjutan. Diharapkan melalui beberapa tindak lanjut ini dapat meningkatkan perbaikan kinerja di masa mendatang.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Pencapaian kinerja pada indikator ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program pengawasan PIRT berisiko, mulai dari proses pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga tindak lanjut hasil uji. Pada tahap pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin dan konsisten terhadap PIRT berisiko, melakukan koordinasi lintas unit yang baik sehingga memungkinkan proses tindak lanjut terhadap sampel dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi. Pada tahap pengujian, laboratorium memiliki komitmen dalam menyelesaikan pengujian meskipun menghadapi beberapa kendala teknis pada peralatan, keterbatasan sarana dan sumber daya yang ada. Melalui pengelolaan operasional yang adaptif laboratorium mampu mencegah terjadinya penumpukan sampel dan menjaga kepatuhan terhadap Pedoman Sampling Pengujian, Petunjuk Teknis Regionalisasi, dan SOP yang berlaku. Pada tahap pelaporan dan tindak lanjut, hasil pengujian sampel disampaikan melalui SIPT yang mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil pengujian sehingga turut mempercepat proses pemantauan dan pelaporan kinerja.

   Keberhasilan pada indikator ini juga ditunjang oleh peningkatan dan pemeliharaan kompetensi teknis sampling dan pengujian kepada petugas sampling maupun personil laboratorium baik personil baru maupun personil ahli melalui supervisi, magang, bimbingan teknis internal, webinar, dan mengikuti forum diseminasi hasil pelatihan. Peningkatan kapasitas SDM ini berkontribusi langsung terhadap kualitas sampling berbasis risiko, hasil uji,

efisiensi proses kerja, dan ketepatan pengambilan keputusan tindak lanjut. Faktor berikutnya yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah dilakukan pengadaan dan optimalisasi sumber daya pengujian serta pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana laboratorium di antaranya suku cadang, instrumen laboratorium, serta kalibrasi alat gelas maupun alat hitung sehingga meminimalkan faktor kesalahan yang berpengaruh terhadap validitas hasil pengujian.

f. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas koordinasi dan kolaborasi antara BPOM dengan stakeholder terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin menunjukkan bahwa rekomendasi pengawasan yang diberikan memiliki daya dorong kebijakan dan aksi nyata dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat sediaan farmasi serta pangan olahan. Capaian indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan BPOM dalam membangun kepercayaan dan komitmen stakeholder terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,18	100,18	Sangat Baik

Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 93,01%, dengan realisasi mencapai 93,18%. Capaian ini menghasilkan persentase 100,18%, yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Realisasi kinerja tahun 2025 tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi. Hal ini menegaskan efektivitas pengawasan Balai Besar POM di Gorontalo serta keberhasilan dalam membangun kolaborasi dengan stakeholder. Dengan capaian yang sangat baik, indikator ini menjadi bukti bahwa rekomendasi hasil pengawasan memiliki daya dorong kebijakan dan implementasi yang kuat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan yang dijalankan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	93,01	93,18	100,18	Sangat Baik

Periode ini dapat dianggap sebagai masa awal atau transisi sebelum penerapan sistem pengukuran kinerja yang lebih terstruktur. Pada tahun 2022 hingga 2024, indikator ini belum memiliki data target maupun realisasi sehingga capaian tidak dapat diukur.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,01	93,18	100,18	Melampaui

Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder" menunjukkan performa yang sangat impresif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 93,01%, organisasi berhasil mencapai realisasi sebesar 93,18%. Hal ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 100,18%, yang masuk dalam kategori "Melampaui Target".

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,18	84,91	91,24
Realisasi IKU BPOM	89,16		

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan performa yang paling unggul dibandingkan dengan unit pembanding yang memiliki klasifikasi UPT setara. Dengan realisasi sebesar 93,18%, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil melampaui capaian BBPOM di Jayapura (91,24%) dan unggul signifikan di atas BBPOM di Palangkaraya (84,91%).

Capaian ini mengukuhkan posisi Balai Besar POM di Gorontalo sebagai unit dengan akuntabilitas kinerja yang sangat baik dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2025, dengan efektivitas tindak lanjut rekomendasi yang berada di atas rata-rata unit setara maupun target nasional.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Kendala: setelah pemeriksaan biasanya sarana telah membuat tindak lanjut untuk 1-2 temuan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, akan tetapi TL terkait sisa temuan lainnya masih banyak sarana yang membutuhkan waktu yang lama (>30hari) untuk menyelesaikannya	Realisasi IKU telah sesuai target	Realisasi IKU telah sesuai target, akan tetapi kedepan untuk meningkatkan kepatuhan Petugas perlu lebih sering untuk mengingatkan sarana untuk membuat perbaikan terhadap keseluruhan temuan	TW IV (Selesai)	Ya	PEM. 06	Pelaku usaha tidak menindaklanj uti rekomendasi hasil pemeriksaan petugas BPOM

Realisasi indikator pada tahun 2025 sebesar 93,18% menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mengawal kepatuhan *stakeholder*. Keberhasilan ini didorong oleh sistem pengawasan yang terstruktur dan komunikasi yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Gorontalo dengan para pelaku usaha. Capaian yang melampaui target (100,18%) membuktikan bahwa mayoritas rekomendasi hasil pemeriksaan telah direspon secara positif dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Meskipun target tercapai, terdapat kendala operasional yang bersifat administratif dan teknis pada sisi pelaku usaha. Ditemukan fenomena "Tindak Lanjut Parsial", di mana sarana cenderung memprioritaskan perbaikan pada temuan yang mudah dan cepat diselesaikan (kurang dari 30 hari). Namun, untuk temuan yang bersifat sistemik atau membutuhkan investasi/perubahan prosedur yang kompleks, sarana seringkali memerlukan waktu lebih dari 30 hari. Hal ini berpotensi menghambat penyelesaian rekomendasi secara tuntas (*full compliance*) jika tidak dikawal secara ketat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian realisasi sebesar 93,18% (capaian 100,18%) pada indikator "Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder" didukung oleh rangkaian program kerja strategis yang dilaksanakan secara terintegrasi sepanjang tahun 2025.

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi merupakan *entry point* utama. Keberhasilan pencapaian ini ditunjang oleh kualitas pemeriksaan yang tidak hanya menemukan ketidaksesuaian, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif. Petugas memastikan bahwa setiap temuan disertai dengan saran perbaikan yang jelas, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyusun dokumen CAPA (*Corrective Action Preventive Action*).

Kegiatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya memperkuat tekanan administratif bagi stakeholder untuk segera menindaklanjuti rekomendasi. Dukungan kebijakan lokal memastikan bahwa rekomendasi dari BBPOM memiliki bobot kepatuhan yang tinggi di mata pelaku usaha daerah.

Meskipun target tercapai, terdapat faktor yang berpotensi menghambat kinerja maksimal (mencapai 100% realisasi), yaitu Kapasitas Teknis Pelaku Usaha: Beberapa sarana (terutama UMKM) memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk melakukan perbaikan fisik atau sistemik dalam waktu singkat.

g. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur efektivitas pengawasan *post-market* terhadap sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo. Fokus utama indikator ini bukan hanya pada kuantitas pemeriksaan yang dilakukan, tetapi pada kualitas penegakan standar melalui tindak lanjut yang tuntas atas setiap temuan ketidaksesuaian.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025, realisasi untuk indikator "Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang masuk dalam target pemeriksaan telah diawasi dan seluruh hasil pemeriksaannya telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Secara matematis, capaian ini mencapai 111,11% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Meskipun realisasi secara faktual mencapai angka sempurna (100%), secara administratif capaian ini dikategorikan "Tidak Dapat Disimpulkan". Hal ini dikarenakan:

1. Efisiensi vs Perencanaan: Capaian yang melampaui 110% mengindikasikan adanya selisih yang cukup lebar antara perencanaan (target) dengan fakta di lapangan.
2. Target yang Terlalu Rendah (*Under-Targeted*): Penetapan target sebesar 90% dinilai terlalu konservatif, sehingga ketika organisasi bekerja secara optimal sesuai standar prosedur, angka realisasi maksimal (100%) menyebabkan persentase capaian melampaui batas evaluasi standar.

3. Keterbatasan Data Pembanding: Dikarenakan ini merupakan periode awal, belum tersedia data tren yang stabil untuk menentukan apakah lonjakan ini merupakan prestasi luar biasa atau akibat dari target yang kurang menantang.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2022 hingga 2024 data target dan realisasi belum tersedia (indikator baru atau baru mulai diukur), maka tidak terdapat *baseline* atau tren pembanding. Sebagai langkah perbaikan, Balai Besar POM di Gorontalo perlu melakukan re-evaluasi terhadap penetapan target pada tahun berikutnya. Mengingat kapasitas organisasi terbukti mampu mencapai 100%, maka target harus disesuaikan agar lebih menantang (*stretching target*) namun tetap realistis. Selain itu, pendokumentasian proses pada tahun 2025 ini sangat penting untuk dijadikan acuan standar kinerja agar konsistensi realisasi 100% dapat dipertahankan secara akuntabel.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanj	90	90	100	111,11	Melampaui

uti sesuai ketentuan					

Pada tahun 2025, yang merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, indikator ini mencatatkan hasil yang sangat luar biasa. Dengan realisasi sebesar 100%, organisasi telah berhasil melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian sebesar 111,11% ini menunjukkan bahwa standar kepatuhan sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja telah mencapai level maksimal sejak awal periode perencanaan.

Pencapaian kategori "Melampaui" di tahun 2025 ini menempatkan organisasi pada posisi yang sangat kuat. Namun, mengingat realisasi telah mencapai batas maksimal (100%), tantangan utama untuk periode Renstra selanjutnya (2026-2029) adalah menjaga konsistensi (*sustainability*) performa tersebut. Keberhasilan ini juga memberikan peluang bagi organisasi untuk melakukan reviu atas indikator kualitas pengawasan lainnya, guna memastikan keamanan sediaan farmasi di masyarakat tetap terjaga pada standar tertinggi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100
Realisasi IKU BPOM	98,38		

Berdasarkan data perbandingan tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan performa yang setara dan konsisten dengan unit pembanding lainnya, yaitu BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura. Ketiga satuan kerja tersebut berhasil mencatatkan realisasi sempurna sebesar

100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada klasifikasi UPT yang setara, terdapat standar kompetensi dan komitmen yang seragam dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

Meskipun tidak terdapat perbedaan angka realisasi di antara ketiga unit pembanding, keberhasilan Balai Besar POM di Gorontalo mempertahankan angka **100%** di tengah tantangan geografis dan jumlah sarana yang ada menunjukkan akuntabilitas kinerja yang sangat kuat. Kedepannya, tantangan bagi Balai Besar POM di Gorontalo adalah mempertahankan konsistensi ini serta meningkatkan kualitas substansi tindak lanjut agar tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan mutu produk sediaan farmasi secara berkelanjutan.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lokasi sarana produksi kosmetik terletak di perbatasanan 2 kabupaten yang agak jauh dan tidak berproduksi rutin, sehingga dengan pertimbangan efisiensi inspeksi menjadi audit dengan pemberitahuan. Karena harus menghubungi pemilih terlebih dahulu	janji awal dengan pelaku usaha	Melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk mempertimbangkan efisiensi inspeksi di lokasi yang jauh	TW IV (Selesai)	Ya	Pem.05	Sarana Target tidak dapat diperiksa

Realisasi indikator yang mencapai 100% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi sediaan farmasi (obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik) di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo telah berhasil diawasi dan ditindaklanjuti. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kendala geografis dan operasional sarana tidak menghalangi pencapaian target kinerja organisasi.

Rencana tindak lanjut berupa koordinasi jadwal telah diselesaikan pada Triwulan IV (TW IV). Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga realisasi

tetap di angka 100% sekaligus memastikan bahwa setiap kunjungan lapangan memberikan dampak pengawasan yang berkualitas dan akuntabel.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Tercapainya realisasi sebesar 100% (capaian 111,11%) pada indikator "Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan hasil dari integrasi beberapa program kerja strategis berikut:

   a) Optimalisasi Program Pemeriksaan Rutin dan Terpadu

      Keberhasilan ini didasarkan pada pelaksanaan audit yang konsisten terhadap sarana produksi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas kunjungan, tetapi juga pada penyelesaian siklus pengawasan hingga ke tahap penutupan tindak lanjut (CAPA). Petugas memastikan setiap temuan memiliki batas waktu penyelesaian yang jelas, sehingga seluruh sarana dapat mencapai status "Sesuai Ketentuan" sebelum akhir tahun anggaran.

   b) Program Pendampingan UMKM dan Pelaku Usaha

      Melalui kegiatan bimbingan teknis dan asistensi pengisian dokumen tindak lanjut, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil menurunkan tingkat kesulitan pelaku usaha dalam merespons temuan hasil pemeriksaan. Program pendampingan ini sangat efektif bagi sarana produksi di perbatasan kabupaten yang memiliki keterbatasan akses informasi, sehingga mereka tetap mampu memenuhi regulasi meskipun berada jauh dari pusat pelayanan.

   c) Monitoring Tindak Lanjut Melalui Media Digital

      Untuk mengatasi jarak yang jauh ke lokasi sarana (perbatasan kabupaten), organisasi memanfaatkan program monitoring berbasis teknologi. Verifikasi tindak lanjut untuk temuan administratif atau minor dilakukan melalui pengiriman dokumen secara digital dan diskusi melalui media daring. Hal ini mempercepat proses tindak lanjut tanpa

harus menunggu kunjungan fisik berikutnya, sehingga realisasi 100% dapat tercapai tepat waktu pada TW IV.

Meskipun terdapat potensi kegagalan akibat lokasi sarana yang jauh dan tidak rutin berproduksi, faktor ini berhasil dimitigasi melalui koordinasi yang proaktif. Fleksibilitas metode audit (dari *unannounced* menjadi *announced audit* untuk sarana tertentu) terbukti menjadi solusi operasional yang cerdas untuk menjaga akuntabilitas kinerja tanpa mengorbankan kualitas pengawasan.

h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini merupakan parameter kunci dalam menjamin keamanan pangan yang diproduksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo. Fokus utama dari indikator ini adalah untuk memastikan bahwa setiap produsen pangan olahan, mulai dari industri skala besar hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah menerapkan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93,94	103,23	Sangat Baik

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mencatatkan performa yang melampaui ekspektasi pada indikator pengawasan sarana produksi pangan olahan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 91%, organisasi berhasil mencapai realisasi sebesar 93,94%. Hal ini menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 103,23%, yang secara kualitatif dikategorikan sebagai "Sangat Baik".

Capaian ini mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target yang menantang. Untuk mempertahankan performa ini di masa mendatang, direkomendasikan agar Balai Besar POM di Gorontalo terus memperkuat digitalisasi sistem pelaporan tindak lanjut agar proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan terdokumentasi dengan lebih akurat. Selain itu, peningkatan target secara gradual pada periode berikutnya dapat dipertimbangkan mengingat kapasitas organisasi yang telah terbukti melampaui target saat ini.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	91	93,94	103,23	Sangat Baik

Pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" mencapai 93,94%. Angka ini menunjukkan performa yang solid karena berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 91%. Dengan persentase capaian sebesar 103,23%, indikator ini berhasil meraih kategori "Sangat Baik", yang mencerminkan efektivitas tinggi dalam pengawalan standar keamanan pangan di wilayah kerja.

Mengingat ini adalah data tahun pertama, Balai Besar POM di Gorontalo perlu menjaga konsistensi pengawasan agar realisasi tidak menurun pada periode berikutnya. Disarankan untuk mendokumentasikan hambatan-hambatan kecil yang ditemui (sekitar 6,06% sarana yang belum sesuai) agar dapat diberikan intervensi khusus, sehingga pada tahun 2026 realisasi dapat terus ditingkatkan mendekati angka sempurna (100%).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	93,94	103,23	Melampaui

Pada tahun 2025, yang menandai awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan performa yang sangat impresif. Dengan realisasi sebesar 93,94%, organisasi telah melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 91%.

Capaian sebesar 103,23% ini memberikan sinyal positif bahwa standar keamanan pangan olahan di wilayah Provinsi Gorontalo telah berada di jalur yang tepat sesuai dengan arah kebijakan strategis organisasi.

Keberhasilan mencapai kategori "Melampaui" menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pangan olahan mulai dari inspeksi lapangan hingga penutupan tindak lanjut (*close-out* CAPA) telah berjalan secara optimal. Realisasi 93,94% mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha pangan telah memiliki kesadaran tinggi untuk segera memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan oleh petugas, sejalan dengan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,94	86,96	98,33
Realisasi IKU BPOM	96,55		

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo dengan capaian 93,94% berada pada posisi yang kompetitif di antara unit pembanding dengan klasifikasi UPT yang setara. Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo tercatat lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Palangkaraya (86,96%), namun masih berada di bawah BBPOM di Jayapura yang mencapai angka signifikan sebesar 98,33%.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo memiliki performa yang solid dan akuntabel. Posisi yang berada di atas target nasional memberikan keyakinan bahwa penjaminan keamanan pangan di wilayah Gorontalo dilakukan secara serius. Namun, capaian BBPOM di Jayapura yang mendekati 100% dapat dijadikan referensi bagi

Balai Besar POM di Gorontalo untuk mempelajari inovasi atau strategi percepatan tindak lanjut yang dapat diadaptasi guna mencapai realisasi yang lebih maksimal di periode mendatang.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Revisi target indikator belum diakomodir pusat	Realisasi indikator telah melampaui target dan tidak dapat disimpulkan	Realisasi indikator telah melampaui target dan tidak dapat disimpulkan sehingga perlu penyesuaian target indikator oleh pusat	TW IV (Selesai)	Tidak		

Secara operasional, kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada indikator ini sangat berhasil dengan realisasi sebesar 93,94%, melampaui target tahunan sebesar 91%. Namun, secara administratif, terdapat kendala dalam pelaporan kinerja di mana capaian yang dihasilkan (103,23%) cenderung tinggi dan mendekati batas limit evaluasi. Hal ini menyebabkan status capaian berada pada kondisi yang memerlukan penjelasan khusus agar tidak dikategorikan sebagai ketidakakuratan perencanaan.

Rencana tindak lanjut berupa usulan penyesuaian target telah difinalisasi pada Triwulan IV (TW IV). Dengan penyesuaian target yang lebih akurat di masa depan, diharapkan nilai capaian kinerja dapat mencerminkan prestasi yang lebih kredibel dan dapat diukur secara objektif dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja sebesar 103,23% (Realisasi 93,94%) pada indikator "Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" merupakan hasil dari implementasi

program kerja yang berorientasi pada hasil dan pendampingan berkelanjutan. Berikut adalah uraian analisisnya:

a) Program Audit dan Inspeksi Berbasis Risiko

Keberhasilan ini didorong oleh pelaksanaan inspeksi rutin yang fokus pada sarana produksi dengan risiko tinggi dan sedang. Pengawasan tidak berhenti pada pemberian sanksi atau temuan, tetapi diintegrasikan dengan penyusunan rencana aksi perbaikan yang konkret. Program audit ini memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) teridentifikasi secara dini dan memiliki jalur penyelesaian yang jelas.

b) Program Pendampingan UMKM Pangan (Asistensi Teknis)

Sebagian besar sarana produksi pangan di wilayah Gorontalo merupakan UMKM. Keberhasilan melampaui target sangat dipengaruhi oleh program asistensi mandiri, di mana petugas memberikan bimbingan teknis langsung kepada pelaku usaha untuk menyusun dokumen tindak lanjut (CAPA). Program ini efektif dalam meruntuhkan hambatan administratif yang sering dialami pelaku usaha kecil, sehingga mereka mampu memenuhi ketentuan dalam waktu yang lebih singkat.

c) Optimalisasi Layanan Konsultasi Pasca-Inspeksi

Adanya layanan konsultasi (baik on-desk di kantor maupun melalui media komunikasi digital) memungkinkan pelaku usaha untuk bertanya langsung mengenai kendala dalam pemenuhan rekomendasi. Hal ini mendukung percepatan realisasi karena setiap keraguan pelaku usaha terhadap poin-poin perbaikan segera teratasi, yang berdampak pada peningkatan angka sarana yang berstatus "Sesuai Ketentuan".

d) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Program koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian/Perdagangan setempat turut menunjang keberhasilan ini. Melalui pembinaan bersama, tekanan edukatif bagi pelaku usaha menjadi lebih kuat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menindaklanjuti rekomendasi BBPOM guna menjamin keberlangsungan izin edar dan keamanan produk di pasar.

Meskipun program-program di atas berjalan sukses, terdapat faktor yang memicu kategori "Sangat Baik" namun "Tidak Dapat Disimpulkan" secara administratif:

1) Kesenjangan Perencanaan: Keberhasilan program kerja di lapangan tidak diimbangi dengan fleksibilitas revisi target oleh pusat. Hal ini menunjukkan bahwa program kerja daerah jauh lebih progresif dibandingkan dengan target administratif yang ditetapkan.
2) Keterbatasan SDM Pelaku Usaha: Masih adanya 6,06% sarana yang belum memenuhi ketentuan disebabkan oleh keterbatasan kompetensi teknis dari internal sarana dalam mengimplementasikan perbaikan yang bersifat sistemik/fisik.

i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini merupakan tolok ukur efektivitas pengawasan pada rantai suplai hilir obat-obatan di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa sarana distribusi—seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah, hingga Apotek dan Toko Obat—telah menerapkan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Distributor obat bahan alam dan kosmetik, Badan Usaha Pemilik Notifikasi (BUPN), klinik kecantikan, Pedagang eceran kosmetik dan depot jamu telah menerapkan standar yang sesuai dengan peraturan.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106,38	Sangat Baik

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mencatatkan performa sempurna pada indikator pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi. Dari target ambisius sebesar 94%, organisasi berhasil merealisasikan angka 100%. Capaian kinerja sebesar 106,38% ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori "Sangat Baik", yang mencerminkan tingkat kepatuhan total dari seluruh sarana distribusi yang diperiksa.

Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan target (94%) sudah cukup menantang, namun efektivitas operasional tim pengawas mampu melampaui ekspektasi tersebut. Keberhasilan mencapai realisasi 100% di tahun 2025 menjadi standar baru (*gold standard*) bagi Balai Besar POM di Gorontalo. Tantangan utama ke depan adalah mempertahankan konsistensi kepatuhan ini agar tidak terjadi penurunan kualitas pada periode mendatang, mengingat sektor distribusi farmasi sangat dinamis.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	94	100	106,38	Sangat Baik

Tahun 2025 merupakan periode prestasi yang signifikan bagi Balai Besar POM di Gorontalo dalam hal pengawasan distribusi. Realisasi sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan sebesar 94%. Dengan persentase capaian mencapai 106,38%, indikator ini diklasifikasikan dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini membuktikan bahwa seluruh sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa telah berhasil menyelesaikan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan tenggat waktu dan ketentuan regulasi.

Meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan di tahun 2025 memberikan fondasi akuntabilitas yang solid. Rekomendasi utama untuk masa depan adalah menjaga agar tingkat kepatuhan 100% ini tidak mengalami penurunan (*retrogresif*) saat jumlah sarana distribusi di wilayah Gorontalo bertambah di masa depan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106,38	Melampaui

Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil mencatatkan performa maksimal pada sektor distribusi. Realisasi sebesar 100% telah melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar 94%. Capaian sebesar 106,38% ini

menunjukkan bahwa akselerasi kinerja di awal periode Renstra berjalan sangat efektif, melampaui ekspektasi pertumbuhan kepatuhan yang direncanakan.

Mengingat target Renstra hingga tahun 2029 telah berhasil dilampaui pada tahun pertama, organisasi kini berada pada posisi "puncak" kinerja. Tantangan utama bagi Balai Besar POM di Gorontalo untuk empat tahun ke depan adalah mempertahankan konsistensi *(sustainability)* di angka 100%. Prestasi ini memberikan ruang bagi organisasi untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pemeriksaan substansial, tidak hanya sekadar pemenuhan tindak lanjut administratif, guna menjamin perlindungan masyarakat yang paripurna.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	97,67	97,67
Realisasi IKU BPOM	98,53		

Berdasarkan data perbandingan tahun 2025, **Balai Besar POM di Gorontalo** mencatatkan performa yang paling unggul dibandingkan dengan unit pembanding lainnya dalam klasifikasi UPT yang sama. Dengan realisasi mencapai **100%**, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil melampaui capaian BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura yang keduanya berada di angka **97,67%**. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo memiliki efektivitas pengawalan tindak lanjut yang paling optimal di kelasnya.

Pencapaian realisasi 100% ini memposisikan Balai Besar POM di Gorontalo sebagai *role model* bagi unit pembanding lainnya dalam hal pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi. Keunggulan ini harus dipertahankan

sebagai standar pelayanan dan pengawasan di masa mendatang. Fokus selanjutnya adalah memastikan bahwa meskipun kepatuhan administratif mencapai angka maksimal, kualitas substansi dari tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana tetap memiliki dampak nyata terhadap keamanan obat yang sampai ke tangan masyarakat.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	masih ada sarana yang belum sesuai ketentuan dan surat edaran inwas yang tiba-tiba masuk padahal sudah dilakukan dalam tahun yang sama	Realisasi indikator telah sesuai target	Realisasi indikator telah sesuai target, namun ke depan perlu pembagian target sarana yang lebih merata ada di setiap TW serta perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan termasuk tindak lanjut perlu ditingkatkan	TW IV (Selesai)	Ya	PEM. 04	Sarana yang diperiksa tidak sesuai dengan target perencanaan pemeriksaan

Realisasi indikator yang mencapai **100%** pada tahun 2025 menunjukkan keberhasilan mutlak dalam mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun menghadapi berbagai kendala operasional, seluruh sarana distribusi yang diperiksa telah menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan. Hal ini membuktikan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Gorontalo.

Seluruh rencana tindak lanjut telah diselesaikan pada Triwulan IV (TW IV). Dengan strategi pemerataan target dan penguatan manajemen risiko di masa mendatang, Balai Besar POM di Gorontalo optimis dapat mempertahankan realisasi 100% dengan proses bisnis yang lebih efisien dan akuntabel.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan mencapai realisasi 100% dengan capaian kinerja 106,38% pada indikator "Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" didorong oleh serangkaian program kerja yang adaptif dan sistematis:

   a) Program Pengawasan Rutin Berbasis CDOB

      Keberhasilan ini merupakan output langsung dari program pemeriksaan konsisten terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah, dan sarana pelayanan kefarmasian. Fokus program tidak hanya pada audit lapangan, tetapi pada tuntasnya siklus pengawasan. Setiap temuan ketidaksesuaian terhadap standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dikawal melalui mekanisme verifikasi perbaikan yang ketat, sehingga seluruh sarana mencapai status patuh sebelum penutupan tahun anggaran.

   b) Mitigasi Risiko melalui Fleksibilitas Perencanaan

      Program kerja tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang baik terhadap instruksi mendadak (Surat Edaran Inwas Pusat). Keberhasilan mengatasi kendala tumpang tindih jadwal ini didukung oleh program re-orientasi target yang fleksibel, di mana tim pengawas mampu melakukan penyesuaian rute dan jadwal inspeksi tanpa mengurangi kualitas audit. Hal ini memastikan bahwa meskipun ada tambahan beban kerja dari pusat, target awal tetap terpenuhi secara sempurna.

   c) Program Komunikasi proaktif dengan Pelaku Usaha

      Untuk mengatasi kendala sarana yang belum memenuhi ketentuan, Balai Besar POM di Gorontalo menjalankan kegiatan pendampingan intensif (desk verifikasi). Petugas melakukan komunikasi dua arah secara proaktif untuk menjelaskan poin-poin perbaikan yang sulit dipahami oleh pelaku usaha. Program ini terbukti efektif mempercepat penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA), sehingga angka kepatuhan dapat mencapai 100% tepat waktu.

   d) Penguatan Manajemen Risiko Operasional (PEM.04)

   e) Keberhasilan ini juga ditunjang oleh penerapan manajemen risiko yang disiplin. Dengan mengidentifikasi risiko "ketidaksesuaian sarana

terhadap target perencanaan" sejak awal, organisasi mampu menyiapkan langkah-langkah kontinjensi. Kegiatan monitoring capaian secara berkala setiap triwulan memastikan setiap kendala di lapangan segera dicarikan solusinya, sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja di akhir tahun.

Analisis Faktor Penghambat yang Teratasi

Meskipun terdapat kendala berupa munculnya instruksi tambahan dari pusat di tengah tahun berjalan dan adanya sarana yang awalnya resisten terhadap perbaikan, faktor ini berhasil dimitigasi melalui:

a) Manajemen Waktu: Pengalokasian sumber daya manusia secara tepat untuk menangani pemeriksaan tambahan tanpa mengabaikan verifikasi tindak lanjut sarana reguler.
b) Integrasi Pelaporan: Pemanfaatan sistem pelaporan yang mempercepat aliran data dari lapangan ke bagian evaluasi, sehingga status "Sesuai Ketentuan" dapat diputuskan segera setelah bukti perbaikan diterima.

j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini merupakan parameter penting untuk mengukur efektivitas pengawasan pada mata rantai terakhir sebelum pangan dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo. Ruang lingkup pengawasan mencakup berbagai sarana distribusi seperti distributor pangan, gudang penyimpanan, hingga ritel modern dan tradisional.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,67	108,52	Sangat Baik

Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan performa yang luar biasa pada indikator pengawasan sarana distribusi pangan olahan selama tahun 2025. Dengan target yang ditetapkan sebesar **90%**, organisasi berhasil mencapai realisasi sebesar **97,67%**. Hasil ini memberikan nilai capaian kinerja sebesar **108,52%**, yang menempatkan indikator ini dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Capaian ini membuktikan bahwa strategi pengawasan distribusi pangan di Gorontalo sangat efektif. Meskipun capaian sudah sangat tinggi, organisasi perlu tetap waspada terhadap sisa **2,33%** sarana yang belum menindaklanjuti secara penuh. Rekomendasi ke depan adalah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan pasar tradisional agar standar keamanan pangan dapat merata di seluruh lini distribusi, tidak hanya di ritel modern atau distributor besar.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	

2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	90	97,67	108,52	Sangat Baik

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo mencatatkan capaian yang sangat progresif pada indikator "Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan". Dengan realisasi mencapai **97,67%**, organisasi berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar **90%**. Persentase capaian sebesar **108,52%** ini menempatkan indikator dalam kategori **"Sangat Baik"**, mencerminkan efektivitas pengawasan yang melampaui standar perencanaan awal.

Mengingat ini adalah tahun pertama pengumpulan data, realisasi **97,67%** merupakan modal awal yang sangat kuat. Namun, tingginya capaian (108,52%) juga memberikan sinyal perlunya **evaluasi target** pada tahun berikutnya agar lebih menantang (*challenging*) namun tetap realistis, guna menjaga akurasi perencanaan kinerja organisasi di masa mendatang.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	97,67	108,52	Melampaui

Memasuki tahun pertama periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan performa yang sangat impresif. Dengan realisasi sebesar **97,67%**, organisasi telah berhasil melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar **90%**. Capaian sebesar **108,52%** ini menunjukkan bahwa akselerasi pengawasan di sektor distribusi pangan telah melampaui ekspektasi awal, memberikan jaminan keamanan pangan yang lebih luas bagi masyarakat Gorontalo.

Mengingat target Renstra hingga tahun 2029 telah terlampaui secara signifikan di tahun pertama, Balai Besar POM di Gorontalo perlu menjaga momentum ini agar tidak terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Prestasi ini memungkinkan organisasi untuk mulai memfokuskan sumber daya pada pengawasan yang lebih berkualitas, seperti digitalisasi pengawasan pangan olahan yang memiliki risiko kerusakan lebih tinggi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,67	88,95	100
Realisasi IKU BPOM	96,33		

Berdasarkan data perbandingan tahun 2025, **Balai Besar POM di Gorontalo** dengan realisasi **97,67%** menunjukkan performa yang sangat kompetitif di antara unit pembanding dengan klasifikasi UPT yang setara. Capaian Balai Besar POM di Gorontalo tercatat lebih tinggi secara signifikan dibandingkan BBPOM di Palangkaraya (**88,95%**), namun masih berada sedikit di bawah BBPOM di Jayapura yang berhasil mencapai angka sempurna (**100%**).

Hasil perbandingan ini menempatkan Balai Besar POM di Gorontalo sebagai salah satu UPT dengan performa terbaik dalam pengawasan pangan olahan di peredaran. Posisi yang berada jauh di atas target nasional memberikan keyakinan akan perlindungan masyarakat dari pangan berbahaya. Namun, pencapaian 100% dari BBPOM di Jayapura menjadi referensi penting bagi Balai Besar POM di Gorontalo untuk melakukan evaluasi internal guna mencapai penyelesaian tindak lanjut yang mutlak (100%) pada periode berikutnya melalui penguatan verifikasi CAPA (*Corrective Action Preventive Action*).

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	masih ada sarana yang belum sesuai ketentuan dan surat edaran inwas yang tiba-tiba masuk padahal sudah dilakukan dalam tahun yang sama	Realisasi indikator telah sesuai target	Realisasi indikator telah sesuai target, namun ke depan perlu pembagian target sarana yang lebih merata ada di setiap TW serta perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan termasuk tindak lanjut perlu ditingkatkan	TW IV (Selesai)	Ya	PEM. 04	Sarana yang diperiksa tidak sesuai dengan target perencanaan pemeriksaan

Realisasi kinerja sebesar **97,67%** merupakan pencapaian yang sangat baik karena telah melampaui target nasional (90%). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan sarana distribusi pangan—terutama ritel dan distributor—telah berjalan efektif dalam memastikan produk pangan di Gorontalo aman untuk dikonsumsi. Hampir seluruh sarana yang diperiksa menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti temuan petugas terkait produk kedaluwarsa, rusak, atau tidak memenuhi ketentuan lainnya.

Rencana tindak lanjut berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan telah diselesaikan pada **Triwulan IV (TW IV)**. Dengan strategi pembagian target yang lebih merata di tahun berikutnya, diharapkan proses bisnis pengawasan pangan olahan di Gorontalo menjadi lebih efisien dan memiliki akurasi data yang lebih tinggi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja sebesar 108,52% (Realisasi 97,67%) merupakan bukti efektivitas berbagai program kerja lapangan yang dijalankan secara konsisten. Berikut adalah uraian analisis program penunjangnya:

a) Program Intensifikasi Pengawasan Pangan Musiman

   Salah satu penentu keberhasilan realisasi melampaui target adalah pelaksanaan Aksi Intensifikasi Pengawasan Pangan yang dilakukan secara terstruktur menjelang hari raya (Ramadan, Idul Fitri, dan Natal/Tahun Baru). Program ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik produk di ritel dan gudang distributor, tetapi juga memastikan pemusnahan di tempat untuk produk yang rusak atau kedaluwarsa. Hal ini secara otomatis mempercepat status "tindak lanjut sesuai ketentuan" karena perbaikan dilakukan seketika saat pengawasan berlangsung.

b) Optimalisasi Pengawasan Terpadu Lintas Sektor

   Kegiatan pengawasan yang dilakukan bersama instansi terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP) dalam wadah Tim Terpadu Pengawasan Pangan Daerah memberikan dampak psikologis bagi pelaku usaha untuk lebih patuh. Program kolaborasi ini memudahkan BBPOM dalam melakukan pengawalan tindak lanjut, terutama pada sarana distribusi di pasar-pasar tradisional yang memiliki kompleksitas kepatuhan lebih tinggi dibandingkan ritel modern.

c) Manajemen Respons Cepat terhadap Instruksi Pusat (Surat Edaran Inwas)

   Meskipun instruksi pemeriksaan tambahan seringkali muncul mendadak melalui Surat Edaran, keberhasilan kinerja tetap terjaga berkat fleksibilitas alokasi SDM. Tim pengawas mampu mengintegrasikan target tambahan tersebut ke dalam rute pemeriksaan reguler yang sudah ada (sinergi lokasi), sehingga efisiensi waktu dan anggaran tercapai tanpa mengorbankan kualitas pemeriksaan.

k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini merupakan instrumen kendali Balai Besar POM di Gorontalo dalam memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat mengenai obat dan makanan bersifat **Objektif, Lengkap, dan Tidak Menyesatkan**. Ruang lingkup pengawasan mencakup berbagai platform media, mulai dari media cetak, media elektronik (radio/TV), hingga media digital (media sosial dan *e-commerce*).

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	89,41	100,35	Sangat Baik

Realisasi kinerja sebesar **89,41%** berhasil melampaui target yang ditetapkan, yaitu **89,1%**. Dengan nilai capaian sebesar **100,35%**, indikator ini masuk ke dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini mengindikasikan efektivitas sistem pengawasan iklan yang dijalankan oleh Balai Besar POM di gorontalo.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	89,1	89,41	100,35	Sangat Baik

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil mencapai realisasi sebesar **89,41%**, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar **89,1%**. Dengan persentase capaian terhadap target sebesar **100,35%**, indikator ini diklasifikasikan dalam kategori **"Sangat Baik"**. Hal

ini menunjukkan bahwa proses pemantauan (*monitoring*) iklan yang beredar di wilayah Gorontalo telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan prosedur standar yang ditetapkan oleh pusat.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,1	89,1	89,41	100,35	Melampaui

Pada tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Balai Besar POM di Gorontalo berhasil memenuhi kewajiban pengawasan iklan dengan sangat presisi. Realisasi sebesar **89,41%** berhasil melampaui target Renstra yang ditetapkan sebesar **89,1%**. Dengan capaian sebesar **100,35%**, indikator ini berada pada kategori **"Melampaui"**, yang menunjukkan bahwa fondasi pengawasan informasi produk di awal periode lima tahunan ini sudah sangat solid.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,41	98,99	98,62
Realisasi IKU BPOM	98,44		

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, **Balai Besar POM di Gorontalo** mencatatkan realisasi sebesar **89,41%**. Meskipun angka ini

telah memenuhi target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan unit pembanding dalam klasifikasi yang sama, terdapat kesenjangan performa yang cukup signifikan. **BBPOM di Palangkaraya (98,99%)** dan **BBPOM di Jayapura (98,62%)** menunjukkan tingkat pengawasan iklan yang jauh lebih tinggi, mendekati angka sempurna.

Walaupun Balai Besar POM di Gorontalo berada pada kategori "Sangat Baik" terhadap target internalnya, capaian unit pembanding menunjukkan bahwa performa pengawasan iklan masih dapat dioptimalkan lebih jauh. Rekomendasi utama untuk periode mendatang adalah melakukan **studi banding (benchmarking)** terhadap proses bisnis di BBPOM Palangkaraya atau Jayapura, khususnya terkait metode penarikan sampel iklan dan strategi percepatan tindak lanjut, guna mendorong realisasi Balai Besar POM di Gorontalo menuju angka 90% ke atas pada tahun berikutnya.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	pencapaian target antara pusat dan upt berbeda. pusat memiliki target sesuai kategori sedangkan upt menargetkan dalam kesesuaian jumlah iklan.	tetap strike di renlak dan mengirimkan justifikasi jika kesulitan mencapai target pada tw 3-4	tetap berpedoman pada renlak dan mengirimkan justifikasi jika kesulitan mencapai target pada tw 3-4	TW IV (Selesai)	Ya	PEM. 07	Perbedaan kesimpulan hasil evaluasi penandaan label dan iklan antara petugas UPT dan Pusat

Realisasi sebesar **89,41%** (capaian **100,35%**) menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo berhasil memenuhi komitmen kinerjanya meski terdapat tantangan metodologis. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi tim dalam melakukan pengawasan rutin terhadap iklan yang beredar di wilayah kerja, baik melalui media konvensional maupun digital, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tetap terkendali sesuai regulasi.

Rencana tindak lanjut berupa penyampaian justifikasi dan kepatuhan terhadap Renlak telah diselesaikan sepenuhnya pada **Triwulan IV (TW IV)**. Dengan strategi ini, Balai Besar POM di Gorontalo mampu mengamankan capaian kinerjanya tetap pada kategori "Sangat Baik" sekaligus memberikan masukan konstruktif bagi Pusat mengenai realita pengawasan iklan di daerah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Capaian kinerja sebesar 100,35% pada indikator pengawasan iklan merupakan hasil dari integrasi antara kegiatan teknis lapangan dan penguatan administrasi pelaporan. Berikut adalah analisis mendalam terhadap program penunjangnya:

   a) Program Patroli Siber (*Cyber Patrol*) Rutin

      Mengingat pergeseran tren iklan dari media konvensional ke platform digital, Balai Besar POM di Gorontalo menjalankan program patroli siber secara terjadwal. Kegiatan ini menyasar iklan di media sosial (Instagram, Facebook) dan *e-commerce*. Keberhasilan program ini didukung oleh penggunaan kata kunci (*keywords*) yang spesifik terhadap produk-produk lokal maupun nasional yang sering melakukan klaim berlebihan, sehingga target jumlah iklan yang diawasi dapat terpenuhi secara konsisten.

   b) Program Koordinasi Teknis dan Justifikasi Data

      Menghadapi kendala perbedaan metodologi target antara Pusat dan UPT, Balai Besar POM di Gorontalo menjalankan kegiatan sinkronisasi data berkala. Program ini melibatkan pengiriman justifikasi teknis pada Triwulan III dan IV apabila ditemukan kesulitan dalam memenuhi kategori produk tertentu yang ditetapkan pusat. Langkah proaktif ini memastikan bahwa volume pengawasan yang dilakukan di daerah tetap diakui sebagai capaian kinerja yang valid, sehingga realisasi akhir tetap berada di atas target (89,41%).

   c) Penguatan Evaluasi Internal (Mitigasi Risiko PEM.07)

      Untuk mengatasi peristiwa risiko perbedaan kesimpulan evaluasi antara petugas UPT dan Pusat, organisasi melaksanakan kegiatan Internal

Peer Review. Sebelum hasil pengawasan iklan dikirim ke pusat, tim teknis melakukan evaluasi bersama untuk menyamakan persepsi terhadap klaim iklan. Program ini terbukti efektif dalam meminimalisir koreksi dari pusat, sehingga data realisasi yang dilaporkan menjadi lebih akurat dan kredibel.

Analisis mengidentifikasi bahwa hambatan utama bukanlah pada teknis pengawasan, melainkan pada sistem pelaporan:

a) Diskrepansi Metodologi: Perbedaan fokus (kategori vs jumlah) sempat menjadi potensi penghambat capaian. Namun, hal ini berhasil dimitigasi melalui penguatan narasi pada laporan akuntabilitas dan komunikasi intensif dengan Kedeputian terkait di Pusat.
b) Dinamika Klaim Iklan: Kreativitas pengiklan dalam menggunakan kata-kata kiasan seringkali menjadi "abu-abu" dalam penilaian. Hal ini diatasi melalui program peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan agar lebih tajam dalam melakukan penilaian sesuai regulasi terbaru.

I. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan oleh Badan POM merupakan bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengendalian informasi pada kemasan produk yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap produk tembakau dan rokok elektronik yang beredar wajib memenuhi persyaratan pelabelan, termasuk pencantuman informasi peringatan kesehatan, kandungan zat adiktif, serta larangan klaim yang dapat menyesatkan konsumen terkait keamanan penggunaan produk.

Dalam hal ini, Badan POM memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan post-market terhadap kesesuaian label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar di wilayah Indonesia, guna memastikan pemenuhan standar dan ketentuan pelabelan sebagaimana diatur dalam regulasi. Pengawasan tersebut mencakup verifikasi terhadap kebenaran informasi pada label, keterbacaan peringatan kesehatan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pencantuman informasi yang tidak bersifat promotif maupun menimbulkan persepsi bahwa produk memiliki manfaat kesehatan tertentu.

Pelaksanaan pengawasan label ini diharapkan dapat mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan pelabelan serta meminimalkan potensi misinformasi kepada konsumen, sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik yang berisiko terhadap kesehatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dilakukan pengukuran Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dengan cara Perhitungan Indikator:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

a) Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
b) Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
c) Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
d) Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	94,1	110,71	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan bahkan sampai pada kategori tidak dapat disimpulkan. Dari target sebesar 85%, realisasi kinerja hingga akhir Tahun 2025 tercatat

sebesar 94,1%, atau mencapai 110,71% dari target kinerja. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan label telah berjalan secara optimal dalam memastikan kesesuaian label produk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, indikator ini merupakan indikator baru yang pengukurannya baru dimulai pada Triwulan III Tahun 2025. Pada periode tersebut, kapasitas dan kemampuan evaluasi petugas pengawas telah mengalami peningkatan, serta tidak terdapat kendala dalam proses pelaporan melalui aplikasi SIPT sehingga seluruh hasil pengawasan dapat disampaikan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi memberikan pengaruh terhadap tingginya capaian realisasi pada periode awal implementasi indikator.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan periode pengukuran yang belum mencakup satu tahun penuh serta adanya peningkatan kapasitas evaluasi petugas pada saat indikator mulai diukur, maka capaian kinerja pada indikator ini belum dapat disimpulkan secara komprehensif sebagai representasi kinerja tahunan. Evaluasi lanjutan melalui pengukuran yang dilakukan secara penuh pada tahun berikutnya diperlukan untuk memperoleh gambaran kinerja yang lebih objektif dan berkelanjutan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	85	94,1	110,71	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara kuantitatif, mengingat indikator ini merupakan indikator baru yang belum diukur pada Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Pengukuran terhadap

indikator ini baru mulai diimplementasikan pada Triwulan III Tahun 2025, sehingga data capaian yang tersedia pada Tahun 2025 menjadi baseline awal dalam pelaksanaan pengukuran kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, realisasi kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 94,1% dari target 85% atau mencapai 110,71%. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas evaluasi petugas pengawas pada periode awal implementasi indikator serta tidak ditemukannya kendala dalam proses pelaporan melalui aplikasi SIPT, sehingga seluruh hasil pengawasan dapat disampaikan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan. Oleh karena itu, meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target, indikator ini masih dikategorikan sebagai *tidak dapat disimpulkan* dalam konteks analisis tren kinerja, mengingat keterbatasan periode pengukuran yang belum mencakup satu tahun anggaran secara penuh.

Ke depan, pelaksanaan pengukuran indikator secara berkelanjutan dalam satu tahun penuh akan menjadi dasar yang lebih representatif dalam melakukan analisis tren kinerja serta evaluasi efektivitas pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada periode selanjutnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	85	94,1	110,7	Melampaui

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang

direncanakan. Target Renstra untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 85%, sementara realisasi kinerja yang dicapai hingga akhir tahun tercatat sebesar 94,1%, atau mencapai 110,7% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada tahun awal periode Renstra telah berjalan secara efektif dalam memastikan kesesuaian label dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini berada dalam kategori *melampaui*, yang menunjukkan adanya tingkat pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis.

Meskipun demikian, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengukuran indikator ini baru mulai dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025, sehingga capaian yang diperoleh perlu dipandang sebagai capaian awal dalam fase implementasi indikator baru. Evaluasi berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya tetap diperlukan untuk memastikan konsistensi kinerja terhadap target Renstra dalam jangka menengah.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,1	93,57	100
Realisasi IKU BPOM	94,33		

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT oleh Badan POM, BBPOM Gorontalo sebagai unit pelapor kinerja menunjukkan capaian yang sebanding dengan unit pembanding pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025. Realisasi kinerja BBPOM Gorontalo tercatat sebesar 94,1%, yang berada sedikit di atas capaian BBPOM Palangkaraya sebesar 93,57%, namun masih di bawah capaian BBPOM Jayapura sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU BPOM yang dalam hal ini merupakan rata-rata capaian seluruh UPT Badan POM sebesar 94,33%, capaian BBPOM Gorontalo menunjukkan kinerja yang relatif sejalan dengan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di wilayah kerja BBPOM Gorontalo telah berada dalam tingkat efektivitas yang setara dengan unit pelaksana teknis lainnya dalam klasifikasi yang sama, serta berkontribusi terhadap capaian kinerja Badan POM secara keseluruhan pada indikator dimaksud.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	masih terdapat pelaporan SIPT yang melewati batas waktu pelaporan	Realisasi indikator telah sesuai target baik produk tembakau maupun rokok elektronik	Realisasi indikator telah sesuai target baik produk tembakau maupun rokok elektronik, akan tetapi kedepan petugas pengawas perlu lebih memperhatikan waktu penyampaian laporan	TW IV (Selesai)	Tidak		

Capaian kinerja pada Indikator **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar** didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah berjalan secara efektif, baik terhadap produk tembakau maupun rokok elektronik yang beredar di wilayah kerja. Optimalisasi proses pengawasan serta tidak ditemukannya kendala signifikan dalam pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIPT turut berkontribusi terhadap tercapainya realisasi indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian dalam rangka menjaga konsistensi kinerja ke depan, khususnya terkait ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan oleh petugas. Dalam beberapa pelaksanaan kegiatan, masih ditemukan pelaporan

melalui SIPT yang melewati batas waktu pelaporan yang ditentukan, yang berpotensi mempengaruhi kualitas data dukung kinerja apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kedisiplinan petugas pengawas dalam memenuhi timeline penyampaian laporan, serta penguatan mekanisme monitoring internal terhadap proses pelaporan hasil pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan capaian indikator yang telah memenuhi target, sekaligus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaporan kinerja pengawasan pada periode selanjutnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian kinerja pada Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan yang telah berjalan secara terstruktur, sebagaimana telah diuraikan pada narasi sebelumnya. Salah satu faktor pendukung utama adalah pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Badan POM. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan kompetensi petugas pengawas serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi kesesuaian label di lapangan, sehingga proses pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Selain itu, dukungan anggaran dalam bentuk pengadaan sampel rokok untuk kegiatan pengawasan turut memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Ketersediaan sampel yang memadai memungkinkan petugas untuk melakukan evaluasi secara representatif terhadap produk yang beredar, sehingga meningkatkan cakupan dan kualitas hasil pengawasan.

   Sinergi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, dukungan pendanaan untuk pengadaan sampel, serta

kelancaran pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIPT sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, menjadi faktor kunci dalam menunjang tercapainya realisasi indikator sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi secara langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah kerja.

m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Pengendalian resistensi antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR) di lingkungan Badan POM dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 350 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2025–2029. Melalui peta jalan tersebut, Badan POM menetapkan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap produk antimikroba, baik pada tahap evaluasi pra-edar (*pre-market assessment*) maupun pengawasan pasca-edar (*post-market surveillance*), guna memastikan bahwa obat antimikroba yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat serta digunakan secara rasional sesuai indikasi medis.

Implementasi pengendalian AMR dilakukan melalui penguatan sistem farmakovigilans, pemantauan penggunaan antibiotik, serta pengawasan distribusi obat antimikroba untuk mencegah praktik penggunaan yang tidak tepat, seperti penggunaan tanpa resep atau di luar indikasi terapi. Selain itu, Badan POM juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada tenaga kesehatan dan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran terhadap risiko resistensi akibat penggunaan antimikroba yang tidak rasional.

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase kesesuaian penggunaan tools AMR terhadap target pemeriksaan Apotek dan ketepatan pengisian tools (A).
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor dengan target dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian AMR (seperti: pelarangan penjualan antibiotik tanpa resep dokter) (B).
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimtek AMR ke tenaga kesehatan dan/atau pemilik sarana pelayanan kefarmasian (C).
4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104,28	104,28	Sangat Baik

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di wilayah UPT menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target kinerja sebesar 100%, realisasi yang dicapai hingga akhir Tahun 2025 tercatat sebesar 104,28%, atau mencapai 104,28% dari target yang direncanakan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR di wilayah UPT telah berjalan secara efektif dan melampaui ekspektasi kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa faktor-faktor penyusun kinerja, antara lain penggunaan *tools* pengawasan AMR, pelaksanaan bimbingan

teknis (bimtek), kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan, serta pelaksanaan publikasi terkait pengendalian resistensi antimikroba, telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan target kinerja.

Dengan capaian yang melampaui target, indikator ini berada dalam kategori **Sangat Baik**, yang menunjukkan tingkat pemenuhan kinerja yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan di wilayah kerja.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	100	104,28	104,28	Sangat Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di wilayah UPT dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dilakukan secara kuantitatif, mengingat indikator ini merupakan indikator baru yang mulai dihitung pada Tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator ini dilakukan pada akhir Tahun 2025, sehingga data realisasi yang tersedia pada tahun berjalan menjadi baseline awal dalam pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah UPT.

Realisasi kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 104,28% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, yang menempatkan capaian indikator dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan empat komponen utama penyusun indikator, yaitu penggunaan *tools* pengawasan AMR, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan, serta pelaksanaan publikasi terkait pengendalian resistensi antimikroba, yang telah mulai diimplementasikan sejak Triwulan III Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan bahwa periode implementasi keempat komponen tersebut belum mencakup satu tahun anggaran secara penuh, maka capaian kinerja Tahun 2025 perlu dipandang sebagai capaian awal dalam fase implementasi indikator baru. Pengukuran secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat memberikan gambaran tren kinerja yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pengendalian AMR di wilayah UPT.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	104,28	104,28	Melampaui

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di wilayah UPT menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan. Target Renstra untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, sementara realisasi kinerja yang dicapai hingga akhir tahun tercatat sebesar 104,28%, atau mencapai 104,28% dari target yang telah ditetapkan, sehingga indikator ini berada dalam kategori *melampaui*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai dihitung pada Tahun 2025 dengan implementasi komponen penyusunnya meliputi penggunaan *tools* pengawasan AMR, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), kegiatan advokasi kepada pemangku kepentingan, serta pelaksanaan publikasi yang baru dimulai sejak Triwulan III Tahun 2025. Dengan demikian, capaian yang melampaui target pada tahun awal periode Renstra ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan intervensi pengendalian AMR dalam fase awal implementasi, meskipun periode pengukuran belum mencakup satu tahun anggaran secara penuh.

Ke depan, pengukuran indikator secara berkelanjutan dalam kerangka Renstra 2025–2029 diperlukan untuk memastikan konsistensi capaian kinerja serta memperoleh gambaran tren yang lebih representatif terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di wilayah UPT.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	104,28	102,16	104,44
Realisasi IKU BPOM	104,23		

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT oleh Badan POM, BBPOM Gorontalo sebagai unit pelapor kinerja menunjukkan capaian yang kompetitif pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di wilayah UPT Tahun 2025. Realisasi kinerja BBPOM Gorontalo tercatat sebesar 104,28%, yang berada di atas capaian BBPOM Palangkaraya sebesar 102,16%, serta relatif sebanding dengan capaian BBPOM Jayapura sebesar 104,44%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU BPOM yang dalam hal ini merupakan rata-rata capaian seluruh UPT Badan POM sebesar 104,23%, capaian BBPOM Gorontalo berada sedikit di atas rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian AMR di wilayah kerja BBPOM Gorontalo telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Badan POM secara keseluruhan pada indikator dimaksud.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Masih terdapat sarana yang menjual antibiotik tanpa resep, advokasi ke pemerintah daerah untuk menerbitkan surat edaran perlu sumber daya yang lebih termasuk anggaran untuk melakukan sosialisasi ke semua stakeholder terkait, program pengendalian AMR yang menjadi tanggungjawab instansi/ OPD lain belum berjalan atau tidak berjalan maksimal	Realisasi indikator telah sesuai target	Realisasi indikator telah sesuai target, ke depan perlu lebih banyak sosialisasi dan advokasi tidak hanya ke apoteker tetapi ke tenaga kesehatan lainnya serta masyarakat umum, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian AMR perlu ditingkatkan termasuk peningkatan komitmen dari pemerintah daerah (Gubernur, bupati, walikota) untuk pengendalian AMR di wilayahnya	TW IV (Selesai)	Tidak		

Capaian kinerja pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT didukung oleh pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba yang telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan. Implementasi kegiatan seperti penggunaan *tools* pengawasan AMR, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi kepada pemangku kepentingan, serta publikasi terkait pengendalian resistensi antimikroba telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian dalam penggunaan antibiotik secara rasional.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang memerlukan perhatian dalam upaya optimalisasi kinerja ke depan, antara lain masih ditemukannya sarana yang menjual antibiotik tanpa resep, serta keterbatasan pemanfaatan alokasi dana yang telah diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR, termasuk kegiatan sosialisasi kepada *stakeholder* terkait. Selain itu, peran Tim Pengendalian AMR yang menjadi tanggung jawab instansi/OPD di beberapa wilayah belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada belum optimalnya implementasi pengendalian AMR secara lintas sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya perbaikan melalui intensifikasi kegiatan sosialisasi dan advokasi yang tidak hanya ditujukan

kepada apoteker, tetapi juga kepada tenaga kesehatan lainnya serta masyarakat umum. Di samping itu, penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian AMR perlu ditingkatkan, termasuk mendorong komitmen pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dalam mendukung implementasi program pengendalian AMR di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan capaian indikator serta meningkatkan efektivitas pengendalian resistensi antimikroba secara komprehensif di wilayah kerja.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian kinerja pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan sejak Triwulan III tahun 2025, sebagaimana telah diuraikan pada narasi sebelumnya. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengendalian AMR kepada masyarakat melalui keterlibatan Pramuka turut berperan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap penggunaan antibiotik secara bijak. Selain itu, KIE yang ditujukan kepada pemilik atau penanggung jawab apotek, Pedagang Besar Farmasi (PBF), organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), serta rumah sakit, berkontribusi dalam mendorong kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap penggunaan antibiotik secara rasional.

   Pelaksanaan publikasi hasil pengawasan antibiotik pada Triwulan III dan Triwulan IV juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan transparansi serta pemahaman pemangku kepentingan terhadap kondisi penggunaan antibiotik di wilayah kerja. Di samping itu, kegiatan advokasi pengendalian AMR yang dilakukan secara langsung kepada pimpinan daerah (Bupati) telah menghasilkan komitmen pemerintah daerah dalam bentuk penerbitan dua surat edaran terkait pengendalian penggunaan antibiotika di sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Sinergi antara kegiatan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kefarmasian, publikasi hasil pengawasan, serta advokasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah tersebut telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya memperkuat kapasitas teknis pelaku pelayanan kefarmasian, tetapi juga mendorong terbentuknya dukungan kebijakan di tingkat daerah sebagai landasan implementasi pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

n. Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator ini mendukung kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olah di wilayah Provinsi Gorontalo melalui pengukuran nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium yang telah ditetapkan. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan indikator ini adalah:

a) Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
b) Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
c) Balai Besar POM di Gorontalo merupakan laboratorium tingkat 3 yang bekerja di tingkat Provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia, mikrobiologi, parameter lain selain parameter unggul, dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier (tingkat) di bawahnya.
d) Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen berdasarkan masing-masing tingkatan. SKL tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen dengan sistem pembobotan yaitu pemenuhan terhadap standar ruang lingkup (50%), standar peralatan (20%), standar kompetensi laboratorium (20%), dan standar metode yang terverifikasi (10%).
e) Target indikator ini ditetapkan secara tahunan kemudian diturunkan menjadi triwulanan dengan peningkatan setiap triwulannya hingga target nilai akhir tahunan sesuai yang ditetapkan. Pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara triwulanan dengan membandingkan antara realisasi dan target triwulanan dalam satuan persentase.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	69,7	107,07	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **65,1%** dengan realisasi senilai **69,7%**. Realisasi yang diperoleh lebih tinggi dengan peningkatan senilai **4,6%** di atas dari target yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **107,07%** dan berada pada rentang 100,00%<x<110,00% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	65,1	69,7	107,07	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 sehingga tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **65,1%**; realisasi **69,7%**; capaian **107,07%**; dan kategori **Sangat Baik** merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	65,1	69,7	107,07	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan laboratorium pada tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan Renstra adalah sama yaitu **65,1%** dengan realisasi tahun 2025 yaitu **69,7%**. Realisasi tahun 2025 ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target Renstra dengan peningkatan senilai **4,6%** di atas dari yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu **103,06%** dengan kategori **Sangat Baik**.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,7	76,6	73,5
Realisasi IKU BPOM	41,75		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan

sesuai standar kemampuan laboratorium pada tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui realisasi Balai Besar POM di Gorontalo yaitu **69,7%** merupakan yang paling rendah dibandingkan kedua unit lainnya. Realisasi BBPOM di Jayapura yaitu **73,5%** lebih tinggi dari Balai Besar POM di Gorontalo dan lebih rendah dibandingkan BBPOM di Palangkaraya, sedangkan BBPOM di Palangkaraya dengan realisasi **76,6%** merupakan yang paling tinggi di antara ketiga unit tersebut. Realisasi ketiga unit lebih tinggi dibandingkan realisasi IKU BPOM yaitu **41,75%** dengan peningkatan nilai pada rentang **27,95%** sampai **31,75%** di atas dari realisasi BPOM.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target tercapai namun aspek yang cukup rendah adalah jumlah metode analisis terverifikasi yang rendah (27,8%) dan pemenuhan standar kompetensi (50,0%). Kendala pemenuhan jumlah verifikasi MA adalah kemampuan menghasilkan laporan verifikasi MA setahun hanya 1 MA/orang (24 MA) sedangkan standar MA yang menjadi target adalah kurang lebih 1000 MA. Sedangkan untuk kendala kompetensi adalah jenis pengujian yang menjadi standar sebagian besar adalah bukan sampel yang beredar sehingga tidak menjadi objek sampling dan parameter uji yang menjadi standar tidak sinkron dengan Pedoman Sampling sehingga harus menyediakan waktu khusus untuk membeli dan mengerjakan sampel pemenuhan SKL diluar dari sampel rutin dan pihak ketiga.	-Mengajukan sinkronisasi jenis pengujian yang menjadi target pemenuhan SKL dengan Pedoman Sampling dan Pengujian. Selain itu, penilaian dapat memperhatikan ketersediaan sampel beredar, jika sampel tidak ada maka tidak dapat terpenuhi SKL tersebut. -Membuat renlak untuk pembelian sampel mandiri (di luar sampel rutin, regionalisasi, dan pihak ketiga), jadwal verifikasi MA (menargetkan 2 MA berbeda/orang)	-Mengajukan sinkronisasi jenis pengujian yang menjadi target pemenuhan SKL dengan Pedoman Sampling dan Pengujian. Selain itu, penilaian dapat memperhatikan ketersediaan sampel beredar, jika sampel tidak ada maka tidak dapat terpenuhi SKL tersebut. -Membuat renlak untuk pembelian sampel mandiri (di luar sampel rutin, regionalisasi, dan pihak ketiga), jadwal verifikasi MA (menargetkan 2 MA berbeda/orang)	TW IV (Selesai)	Y	Lab-03	Penurunan kemampuan dan kapasitas pengujian laboratorium

Indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan empat komponen berbobot, yaitu pemenuhan terhadap standar ruang lingkup (50%), standar peralatan (20%), standar kompetensi laboratorium (20%), dan standar metode yang terverifikasi (10%).

Keberhasilan melampaui target terutama didukung oleh optimalisasi pada komponen dengan bobot terbesar, yaitu standar ruang lingkup (50%). Laboratorium secara konsisten meningkatkan pemenuhan ruang lingkup sesuai dengan yang tercantum dalam standar melalui pengujian rutin, verifikasi metode, uji banding, uji profisiensi, dan pelatihan teknis terkait metode analisis. Selain itu, pada komponen standar peralatan (20%), dilakukan pengelolaan aset dan pemeliharaan preventif secara terjadwal sehingga tingkat ketersediaan alat tetap terjaga dan mendukung kelancaran operasional. Proses pengadaan dilaksanakan sesuai prioritas sehingga meskipun ada efisiensi anggaran, pengadaan peralatan dapat efektif sesuai peruntukannya dan menambah pemenuhan standar peralatan.

Dari sisi manajerial, penguatan sistem dokumentasi mutu, monitoring internal berkala, serta pengawasan berjenjang turut memastikan setiap komponen pemenuhan standar dikendalikan secara sistematis. Sinergi antar fungsi dalam perencanaan kebutuhan, pengendalian operasional, dan evaluasi berkala menjadi faktor penting yang mendorong capaian indikator secara agregat melampaui target.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada komponen standar kompetensi laboratorium (20%) dan standar metode yang terverifikasi (10%). Dinamika rotasi personel internal dan mutasi eksternal menyebabkan kebutuhan penyesuaian kompetensi teknis secara berulang, sehingga waktu yang tersedia untuk pemenuhan pelatihan dan uji kompetensi menjadi terbatas. Di sisi lain, pelaksanaan verifikasi metode terkendala oleh keterbatasan alat tertentu, ketiadaan suku cadang, reagen kritis, serta keterbatasan sampel uji yang representatif. Kondisi ini berpotensi menahan peningkatan skor pada dua komponen tersebut meskipun komponen lainnya telah optimal.

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, beberapa langkah strategis direncanakan sebagai berikut:

1) Penguatan manajemen kompetensi SDM melalui penyusunan peta kompetensi berbasis jabatan dan ruang lingkup uji, pelaksanaan pelatihan berjenjang dan *in-house training*, serta mekanisme *knowledge transfer* sistematis sebelum dan sesudah rotasi personel. Hal ini bertujuan menjaga kesinambungan kompetensi meskipun terjadi dinamika penempatan pegawai.

2) Perencanaan verifikasi metode secara lebih terstruktur dengan penyusunan *roadmap* verifikasi tahunan berbasis prioritas risiko dan ketersediaan sumber daya.

3) Penguatan perencanaan kebutuhan sarana dan bahan kritis termasuk pengadaan suku cadang dan reagen prioritas melalui mekanisme pengadaan yang lebih awal serta pembentukan *buffer stock* untuk mencegah terhambatnya kegiatan verifikasi metode.

4) Optimalisasi kerja sama antar laboratorium baik dalam bentuk peminjaman alat, penggunaan bersama fasilitas tertentu, maupun kolaborasi verifikasi metode untuk parameter yang membutuhkan peralatan khusus.

5) Integrasi perencanaan anggaran dengan target pemenuhan standar sehingga alokasi sumber daya lebih fokus pada komponen dengan bobot yang masih dapat ditingkatkan, khususnya kompetensi dan metode terverifikasi.

Secara keseluruhan, capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa sistem manajemen laboratorium telah berjalan efektif dan adaptif. Melalui penguatan pada aspek kompetensi dan verifikasi metode, diharapkan nilai pemenuhan laboratorium dapat meningkat secara lebih seimbang pada seluruh komponen pembobotan dan semakin memperkuat kapasitas laboratorium dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan yang ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dalam penguatan ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi, serta penguatan sistem mutu laboratorium secara berkelanjutan.

Salah satu faktor utama keberhasilan adalah peningkatan ruang lingkup pengujian melalui optimalisasi pengujian sampel rutin dan regional. Koordinasi yang intensif dengan tim sampling memungkinkan perluasan cakupan sampling berbasis risiko, sehingga parameter uji yang dilaksanakan semakin representatif terhadap potensi risiko di wilayah kerja. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kuantitas sampel yang diuji, tetapi juga memperluas relevansi ruang lingkup laboratorium sesuai mandat pengawasan.

Selain itu, keterlibatan aktif laboratorium dalam uji banding, uji kolaborasi, dan uji profisiensi turut memperkuat validitas hasil pengujian dan meningkatkan pengakuan terhadap kompetensi teknis laboratorium. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi objektif terhadap kinerja analitis sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan pada aspek ketepatan dan akurasi hasil uji.

Dari sisi peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan pelatihan teknis metode analisis terbaru, supervisi internal, kegiatan coaching, mentoring, dan counseling (CMC), serta sharing knowledge antar-analis berkontribusi signifikan dalam menjaga dan meningkatkan standar kompetensi laboratorium. Program ini memastikan adanya transfer pengetahuan yang berkesinambungan, khususnya dalam menghadapi dinamika rotasi personel dan perkembangan metode analisis.

Penguatan sarana dan prasarana dilakukan melalui perencanaan pengadaan peralatan dan sumber daya pengujian berbasis skala prioritas, dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang lingkup uji dan ketersediaan anggaran secara efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan kritis tetap terjaga meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi metode analisis secara bertahap menjadi bagian penting dalam menjamin kesesuaian metode terhadap parameter uji yang dikembangkan atau diperluas. Verifikasi dilakukan sesuai standar mutu laboratorium, sehingga mendukung peningkatan skor pada komponen metode terverifikasi dan memperkuat keandalan hasil pengujian.

Dengan sinergi antara perluasan ruang lingkup berbasis risiko, penguatan kompetensi SDM, partisipasi dalam pengujian eksternal, serta pengelolaan sumber daya yang terencana, program/kegiatan yang dilaksanakan terbukti efektif dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a) advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b) mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c) mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	16,67	100	Baik

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di daerah. Pada tahun 2025, persentase capaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tercatat sebesar 16,67%. Angka ini merepresentasikan progres awal dari tahapan implementasi program yang masih berfokus pada persiapan, koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah intervensi, serta penguatan komitmen pemerintah daerah dan pemangku

kepentingan terkait. Sebagai program yang baru berjalan, capaian tersebut mencerminkan tahap fondasi yang sedang dibangun untuk memastikan pelaksanaan yang lebih optimal pada periode berikutnya.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	16,67	16,67	100	Baik

KKPA baru dilaksanakan pada tahun 2025, maka belum terdapat data atau capaian pada tahun sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Dengan demikian, tidak tersedia perbandingan target maupun realisasi kinerja dengan periode sebelumnya. Tahun 2025 berfungsi sebagai *baseline* atau titik awal pengukuran kinerja program untuk evaluasi dan pengembangan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	16,67	16,67	100	Tercapai

Salah satu indikator penting dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah jumlah kabupaten/kota yang didampingi dalam mencapai kriteria sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pada tahun 2025, sebagai tahun awal implementasi, realisasi kinerja tercatat sebesar 16,67%. Capaian ini merepresentasikan tahap awal pendampingan yang

masih difokuskan pada penguatan komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta pemetaan kebutuhan.

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029, terlihat adanya perencanaan peningkatan kinerja yang bersifat progresif dan bertahap. Target tersebut dirancang meningkat setiap tahun, dari 16,67% pada tahun 2025 hingga mencapai 83,33% pada tahun 2029. Kenaikan ini menunjukkan strategi pengembangan yang sistematis, di mana jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dan mampu memenuhi indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman akan terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	20	5,88
Realisasi IKU BPOM	20,90		

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 pada indikator Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan adanya variasi capaian antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT. Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja Balai Besar POM di Gorontalo mencapai 16,67%, dibandingkan dengan BBPOM Palangkaraya sebesar 20% dan BBPOM Jayapura sebesar 5,88%.

Capaian 16,67% pada Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan posisi kinerja yang berada pada tingkat menengah di antara unit pembanding. Jika dibandingkan dengan BBPOM Palangkaraya yang mencapai 20%, terdapat selisih sebesar 3,33% yang mengindikasikan bahwa

Palangkaraya memiliki progres pendampingan yang relatif lebih tinggi pada periode evaluasi tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesiapan pemerintah daerah, intensitas koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran, serta komitmen daerah dalam memenuhi indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman. Di sisi lain, capaian BBPOM Jayapura sebesar 5,88% menunjukkan tingkat realisasi yang masih relatif rendah dibandingkan dua UPT lainnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tantangan geografis, keterbatasan akses, maupun dinamika dukungan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	- Dokumen keamanan pangan dari instansi pengampu PIRT, POSS, PSAT, PSAI dan PSAH kurang lengkap/tidak terdokumentasi dengan baik - Pemanfaatan aplikasi perizinan dan pengawasan PIRT, POSS, PSAT, PSAI, PSAH dari masing-masing instansi pengampu kurang maksimal - Kurangnya inovasi keamanan pangan yang digagas dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah - Tidak tersedianya anggaran advokasi tatap muka KKPA dan rendahnya partisipasi kegiatan yang dilaksanakan secara daring (zoom) sehingga informasi mengenai KKPA tidak dapat disampaikan secara maksimal kepada seluruh kabupaten/kota	Advokasi dan koordinasi lintas sektor secara intens baik melalui tatap muka maupun WA grup guna memastikan seluruh instansi memahami perannya dalam menyiapkan data dukung sesuai tools yang dipersyaratkan.	Advokasi dan koordinasi lintas sektor secara intens baik melalui tatap muka maupun WA grup guna memastikan seluruh instansi memahami perannya dalam menyiapkan data dukung sesuai tools yang dipersyaratkan.	TW IV (Selesai)	Tidak		

Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) yang mengalami berbagai kendala menunjukkan adanya beberapa faktor yang memengaruhi penurunan kinerja program. Salah satu permasalahan utama adalah dokumen keamanan pangan dari instansi pengampu PIRT, POSS, PSAT, PSAI, dan PSAH yang kurang lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh belum adanya sistem dokumentasi terpadu antarinstansi, kurangnya pemahaman teknis petugas

dalam pengelolaan arsip, serta belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dokumen secara berkala.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi perizinan dan pengawasan yang tersedia juga belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, data yang tersedia kurang akurat dan kurang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga efektivitas pengawasan keamanan pangan menjadi tidak optimal.

Tidak tersedianya anggaran untuk advokasi tatap muka KKPA serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan daring. Keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi dan pembinaan tidak dapat dilakukan secara langsung dan menyeluruh. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan secara daring belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan literasi digital, kendala jaringan, serta rendahnya komitmen kehadiran peserta.

Upaya perbaikan Penguatan sistem dokumentasi perlu dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur yang jelas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi perizinan dan pengawasan dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis bagi petugas, peningkatan dukungan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi data lintas instansi. Dalam rangka mendukung program KKPA, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, dan mengembangkan program percontohan yang dapat direplikasi. Sementara itu, untuk meningkatkan efektivitas advokasi dan diseminasi informasi, diperlukan kombinasi metode tatap muka dan daring (hybrid). Dengan upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan KKPA dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan pangan di tingkat kabupaten/kota secara menyeluruh.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Analisis pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan bahwa

keberhasilan sangat dipengaruhi oleh perencanaan pendampingan yang terstruktur, intensitas bimbingan teknis, serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana aksi. Sinergi lintas sektor, dukungan kebijakan dan anggaran daerah, serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi faktor utama yang menunjang peningkatan capaian indikator.

Sebaliknya, kegagalan atau rendahnya capaian umumnya disebabkan oleh keterbatasan SDM, rendahnya alokasi anggaran, mutasi pejabat pengampu program, serta kurangnya pemahaman terhadap kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pendampingan yang dilakukan secara daring juga belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan partisipasi dan kendala teknis. Ke depan, perlu penguatan strategi pendampingan berbasis analisis kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi metode hybrid (tatap muka dan daring), serta advokasi berkelanjutan kepada pimpinan daerah agar dukungan kebijakan dan anggaran lebih optimal. Dengan langkah tersebut, capaian indikator diharapkan meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

3.1.2. Sasaran Strategis "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Sumber atau Narasumber KIE

b) Konten atau Informasi KIE

c) Pemahaman Audiens KIE

d) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang dilakukan Balai Besar POM di Gorontalo dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Balai Besar POM di Gorontalo atau menerima produk informasi Balai Besar POM di Gorontalo dalam 3 bulan terakhir.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,92	92,39	102,86	Sangat Baik

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 89,92%, capaian yang diperoleh mencapai 92,39%, sehingga realisasi kinerja berada pada angka 102,86% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE telah memenuhi ekspektasi yang direncanakan dan berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, capaian efektivitas yang memenuhi target menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta metode komunikasi yang digunakan dalam kegiatan KIE telah berjalan optimal. Selanjutnya, strategi perlu diarahkan pada perluasan segmentasi sasaran, khususnya kelompok masyarakat umum dan laki-laki, agar dampak edukasi semakin luas dan merata di seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo khususnya wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	98	94,98	96,92	Cukup
2023	98,5	98,9	100,41	Sangat Baik
2024	99,8	99,8	100,00	Baik
2025	89,92	92,39	102,86	Sangat Baik

Pada Tahun 2023, realisasi efektivitas KIE mencapai 98,9% dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 99,8%. Kedua capaian tersebut masuk dalam kategori "sangat efektif sekali”, yang mencerminkan optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Metode komunikasi yang digunakan baik tatap muka maupun melalui media mampu menjangkau sasaran secara luas serta memberikan dampak pemahaman yang signifikan terhadap keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Tahun 2025, realisasi efektivitas KIE tercatat sebesar 92,39% dengan kategori “Efektif.” Meskipun terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa pelaksanaan KIE

masih berjalan dengan baik dan mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Penurunan sekitar 6-7% ini lebih merefleksikan adanya penyesuaian dalam strategi pelaksanaan kegiatan, bukan penurunan kualitas substansi edukasi yang diberikan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,92	89,92	92,39	102,86	Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan target Renstra 2025–2029 menunjukkan adanya arah kebijakan yang progresif dan menuntut peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam Renstra 2025-2029, target efektivitas KIE ditetapkan meningkat secara bertahap, yaitu sebesar 89,82% pada Tahun 2025, naik menjadi 90,72% pada Tahun 2026, dan terus meningkat hingga mencapai 93,41% pada Tahun 2029. Kenaikan target ini mencerminkan komitmen organisasi untuk terus memperkuat dampak komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman serta perubahan perilaku terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92,39	92,88	87,71

Realisasi IKU BPOM	89,33

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menunjukkan adanya variasi capaian antar unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT. Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja BBPOM Gorontalo mencapai 92,39%, dibandingkan dengan BBPOM Palangkaraya sebesar 92,88% dan BBPOM Jayapura sebesar 87,71%.

Capaian sebesar 92,39% pada Balai Besar POM di Gorontalo menempatkan unit ini pada posisi yang relatif kompetitif di antara unit pembanding. Selisih dengan BBPOM Palangkaraya hanya sebesar 0,49%, yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan KIE di Gorontalo hampir setara dengan unit yang memiliki capaian tertinggi pada kelompok pembanding tersebut.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Keterbatasan anggaran KIE sehingga jangkauan KIE tatap muka cukup terbatas. - Keterbatasan anggaran KIE sehingga belum dapat dilakukan KIE tatap muka untuk kelompok masyarakat disabilitas.	Membuat penganggaran KIE tatap muka di wilayah terbatas dan untuk kelompok disabilitas	- Penganggaran KIE tatap muka yang dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Gorontalo - Penganggaran KIE tatap muka bagi kelompok rentan/disabilitas	TW IV (Selesai)	Tidak		

Analisis terhadap capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, khususnya pada Balai Besar POM di Gorontalo, menunjukkan bahwa secara umum kinerja masih berada dalam kategori efektif. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran kegiatan KIE.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan maupun potensi penurunan kinerja adalah keterbatasan anggaran KIE yang berdampak pada terbatasnya jangkauan kegiatan tatap muka. KIE tatap muka merupakan metode yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat karena memungkinkan interaksi langsung, diskusi dua arah, serta klasifikasi materi secara komprehensif. Dengan keterbatasan anggaran, frekuensi dan cakupan wilayah pelaksanaan KIE tatap muka menjadi terbatas, sehingga belum seluruh kabupaten/kota di Gorontalo dapat dijangkau secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menyebabkan belum terlaksananya KIE tatap muka yang secara khusus menyasar kelompok masyarakat disabilitas. Ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan akses informasi, padahal prinsip pelayanan publik menekankan aspek inklusivitas dan kesetaraan.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperlukan adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran KIE tatap muka secara lebih terarah, khususnya untuk wilayah dengan jangkauan terbatas dan untuk kelompok disabilitas. Penganggaran yang memadai akan memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang lebih inklusif, merata, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pemahaman masyarakat.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi:

a) Penyusunan dan pengalokasian anggaran KIE tatap muka yang dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo secara bertahap dan terencana.
b) Penyediaan anggaran khusus untuk pelaksanaan KIE tatap muka bagi kelompok rentan dan disabilitas dengan pendekatan yang aksesibel dan ramah inklusi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat efektivitas KIE ke depan tidak hanya meningkat secara persentase, tetapi juga lebih merata, inklusif, dan berkeadilan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator efektivitas KIE yang melampaui target didukung oleh pelaksanaan KIE tatap muka dan pemanfaatan media yang berjalan optimal dan saling melengkapi. Kegiatan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas mendorong partisipasi aktif peserta sehingga meningkatkan pemahaman secara langsung. Sementara itu, dukungan media digital dan materi publikasi memperluas jangkauan informasi dan memperkuat pesan edukasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan juga ditunjang oleh perencanaan yang terstruktur, koordinasi tim, serta monitoring dan evaluasi berkala. Namun, ke depan perlu dilakukan perluasan segmentasi sasaran agar tidak terfokus pada pelajar saja, serta peningkatan inovasi konten agar efektivitas KIE tetap terjaga dan semakin meningkat.

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	100	Baik

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator *J*umlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Sapa Sekolah) sebagaimana tertuang dalam Renstra ditetapkan sebanyak 7 sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi penyesuaian akibat efisiensi anggaran pada program PMPUPO. Melalui persetujuan manajemen,

ditetapkan bahwa jumlah sekolah yang dapat menerima intervensi penuh pada Tahun 2025 adalah 4 sekolah. Intervensi penuh dimaksud mencakup seluruh tahapan program, mulai dari advokasi, bimbingan teknis, hingga proses evaluasi dan sertifikasi.

Sebagai hasilnya, 4 sekolah telah berhasil memenuhi seluruh tahapan program dan memperoleh sertifikasi Pembudayaan Keamanan Pangan pada Tahun 2025. Sementara itu, 3 sekolah lainnya belum tersertifikasi, karena baru menerima sebagian tahapan intervensi akibat keterbatasan dukungan anggaran dan waktu pelaksanaan. Ketiga sekolah tersebut tetap telah mendapatkan penguatan awal berupa sosialisasi, edukasi, dan sebagian pendampingan teknis, sehingga fondasi penerapan keamanan pangan sudah mulai terbentuk. Sertifikasi bagi ketiga sekolah tersebut direncanakan akan dilanjutkan dan diselesaikan pada Tahun 2026.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	12	12	100	Baik
2023	12	12	100	Baik
2024	13	13	100	Baik
2025	7	7	100	Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan program dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, realisasi intervensi penuh tercatat sebanyak 12 sekolah. Capaian tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2023 dengan jumlah yang sama, yaitu 12 sekolah, yang menunjukkan konsistensi kinerja serta stabilitas dukungan program pada periode tersebut.

Memasuki Tahun 2024, terjadi peningkatan capaian menjadi 13 sekolah, yang mencerminkan adanya penguatan komitmen dan perluasan jangkauan intervensi terhadap pembudayaan keamanan pangan di

lingkungan sekolah, sekaligus memperlihatkan kapasitas pelaksanaan program yang semakin baik.

Namun demikian, pada Tahun 2025 jumlah sekolah yang mendapatkan intervensi penuh mengalami penurunan menjadi 7 sekolah. Penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya komitmen atau efektivitas program, melainkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatasan jumlah sekolah sasaran intervensi penuh.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	7	100	Tercapai

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu **7 Sekolah** dengan realisasi tahun 2025 yaitu **7 Sekolah**. Realisasi tahun 2025 ini telah mencapai target tahun 2025 maupun target Renstra sehingga capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu **7 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** dengan kategori **Tercapai**

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	8	8
Realisasi IKU BPOM	-		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui realisasi Balai Besar POM di Gorontalo yaitu 7 Sekolah merupakan yang paling rendah dibandingkan kedua unit lainnya. Realisasi BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura yaitu 8 Sekolah lebih tinggi dari Balai Besar POM di Gorontalo.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	- Kurang maksimalnya peran aktif kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan kegiatan secara mandiri - Keterbatasan anggaran sehingga terdapat 3 sekolah yang belum dapat dilakukan sertifikasi Sapa Sekolah	- Memaksimalkan WA grup untuk komunikasi secara intensif bersama kader keamanan pangan yang telah dibentuk - Dilaksanakan sertifikasi bagi sekolah intrevensi penuh	- Memaksimalkan WA grup untuk komunikasi secara intensif bersama kader keamanan pangan yang telah dibentuk - Dilaksanakan sertifikasi bagi sekolah intrevensi penuh namun belum mendapatkan sertifikat Sapa Sekolah di tahun anggaran berikutnya	TW IV (Selesai)	Tidak		

Analisis indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja didukung oleh komitmen sekolah serta pelaksanaan intervensi dan pembentukan kader keamanan pangan. Namun, kinerja belum optimal karena peran kader belum maksimal dalam menjalankan kegiatan secara

mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tiga sekolah belum dapat memperoleh sertifikasi Sapa Sekolah.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan optimalisasi komunikasi melalui grup WhatsApp untuk memperkuat koordinasi, monitoring, dan motivasi kader keamanan pangan. Selain itu, sertifikasi bagi sekolah intervensi penuh perlu diprioritaskan, terutama bagi sekolah yang belum memperoleh sertifikat pada tahun berjalan. Rencana tindak lanjut meliputi memaksimalkan komunikasi intensif melalui WA grup serta melaksanakan sertifikasi bagi sekolah intervensi penuh yang belum mendapatkan sertifikat Sapa Sekolah pada tahun anggaran berikutnya, guna meningkatkan capaian kinerja secara lebih optimal dan berkelanjutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program intervensi sekolah, yang meliputi kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis, pendampingan implementasi, pembentukan dan penguatan kader keamanan pangan sekolah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Program edukasi yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) terbukti mampu meningkatkan pemahaman guru, pengelola kantin, dan siswa terhadap prinsip keamanan pangan. Selain itu, adanya komitmen kepala sekolah dan dukungan manajemen sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan karena mendorong integrasi program ke dalam kebijakan dan aktivitas rutin sekolah.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian kinerja. Keterbatasan intensitas pendampingan akibat keterbatasan sumber daya dan anggaran berdampak pada belum meratanya kualitas implementasi di seluruh sekolah sasaran. Selain itu, belum maksimalnya peran aktif kader dalam menjalankan program secara mandiri menyebabkan kegiatan pembudayaan keamanan pangan belum sepenuhnya berkelanjutan tanpa dorongan eksternal.

c. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

a) mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
b) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
c) meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

a) Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
b) Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
c) Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
d) Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	3	3	100	Baik

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman menunjukkan capaian optimal, dengan target 3 desa dan realisasi 3 desa sehingga mencapai 100%. Capaian ini

menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif serta sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari advokasi, Bimtek Kader, Bimtek Komunitas, monitoring dan evaluasi (monev), hingga pengawalan desa, terlaksana tepat waktu dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ketepatan pelaksanaan setiap tahapan tersebut menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	6	6	100	Baik
2023	7	7	100	Baik
2024	6	6	100	Baik
2025	3	3	100	Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman selama periode 2022–2025 menunjukkan tren pelaksanaan program yang konsisten dan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam Program Desa Pangan Aman.

Pada tahun 2022, program berhasil direalisasikan pada 6 desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan cakupan menjadi 7 desa di Kabupaten Boalemo. Pada tahun 2024, intervensi dilaksanakan pada 6 kelurahan di Kota Gorontalo. Sementara itu, pada tahun 2025 program dilaksanakan pada 3 desa di Kabupaten Bone Bolango.

Adapun penurunan jumlah target pada tahun 2025 menjadi 3 desa bukan disebabkan oleh penurunan kinerja, melainkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatasan cakupan wilayah intervensi. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga secara persentase capaian tetap mencapai 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	3	3	3	100	Tercapai

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2025–2029 pada Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman menunjukkan adanya rencana peningkatan cakupan intervensi secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2025, realisasi program tercapai sebanyak 3 desa dengan capaian 100%. Meskipun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan target tahun berikutnya, capaian ini menjadi fondasi awal dalam periode Renstra yang baru.

Berdasarkan dokumen renstra, target tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6 desa, sedangkan pada tahun 2027 hingga 2029 ditargetkan masing-masing 7 desa per tahun yang tersebar di 6 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Target ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperluas jangkauan program secara progresif, baik dari sisi jumlah desa maupun pemerataan wilayah intervensi.

Dengan capaian tahun 2025 yang telah memenuhi target, diharapkan pengalaman dan praktik baik yang telah diperoleh dapat menjadi modal dalam mengakselerasi pencapaian target Renstra 2025-2029, sehingga implementasi Program Desa Pangan Aman dapat berjalan lebih luas, merata, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Jumlah desa pangan aman	3	3	2

Realisasi IKU BPOM	-

Tabel tersebut menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Berdasarkan data, realisasi Balai Besar POM di Gorontalo mencapai 3 desa, sama dengan capaian BBPOM di Palangkaraya yang juga sebanyak 3 desa. Sementara itu, realisasi BBPOM di Jayapura tercatat sebanyak 2 desa. Dengan demikian, capaian Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM di Palangkaraya merupakan yang tertinggi dibandingkan BBPOM di Jayapura pada indikator tersebut.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Jumlah desa pangan aman	- Kurang maksimalnya peran aktif kader keamanan pangan desa dalam melakukan kegiatan/inovasi secara mandiri - Kesalahan penentuan kategori komunitas target intervensi oleh desa	- Memaksimalkan WA grup untuk komunikasi secara intensif bersama kader keamanan pangan yang telah dibentuk - Melakukan koordinasi terkait kategori komunitas	- Memaksimalkan WA grup untuk komunikasi secara intensif bersama kader keamanan pangan yang telah dibentuk - Koordinasi secara lisan dan tertulis terkait persyaratan kategori komunitas dengan kepala desa sebelum dilakukan bimbingan teknis komunitas	TW IV (Selesai)	Tidak		

Analisis indikator Jumlah Desa Pangan Aman menunjukkan bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa, efektivitas pendampingan, dan keaktifan kader keamanan pangan desa. Desa yang memiliki kader aktif dan dukungan kepala desa cenderung mencapai hasil yang lebih optimal.

Namun, kinerja belum maksimal karena peran kader belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan kegiatan dan inovasi. Selain itu, masih terdapat kesalahan dalam penentuan kategori komunitas target intervensi oleh

desa, sehingga mempengaruhi ketepatan dan efektivitas program. Sebagai upaya perbaikan, akan dimaksimalkan komunikasi melalui grup WhatsApp untuk memperkuat koordinasi dan monitoring kader, serta dilakukan koordinasi lisan dan tertulis dengan kepala desa terkait persyaratan kategori komunitas sebelum pelaksanaan bimbingan teknis. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran dan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan advokasi kepada kepala desa, pembentukan dan penguatan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis kepada komunitas sasaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Desa yang memperoleh pendampingan intensif dan memiliki kader aktif cenderung mampu menjalankan kegiatan edukasi, pengawasan, serta inovasi secara mandiri sehingga memenuhi kriteria sebagai Desa Pangan Aman.

   Namun demikian, terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian kinerja, antara lain belum maksimalnya peran kader dalam menggerakkan program secara berkelanjutan serta kurang tepatnya penentuan kategori komunitas target intervensi. Ketidaktepatan ini berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan bimbingan teknis dan ketercapaian output yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan, pencapaian indikator sangat ditentukan oleh sinergi antara advokasi yang kuat, ketepatan perencanaan sasaran, kapasitas kader, serta intensitas pendampingan. Penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kader, dan penajaman perencanaan intervensi menjadi kunci untuk meningkatkan keberhasilan program pada tahun berikutnya.

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko cemaran pangan, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menunjukkan capaian yang optimal. Target yang ditetapkan sebanyak 1 pasar, dan hingga akhir tahun 2025 telah terealisasi 1 pasar atau mencapai 100% dari target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program serta komitmen dalam memperkuat sistem keamanan pangan di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kesesuaian antara target dan realisasi pada Tahun 2025 menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Capaian ini diharapkan dapat

menjadi model replikasi untuk pengembangan pasar pangan aman di wilayah lainnya, sehingga tercipta ekosistem perdagangan pangan yang sehat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	1	1	100	Baik
2023	1	1	100	Baik
2024	2	2	100	Baik
2025	1	1	100	Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas selama periode 2022-2025 menunjukkan konsistensi pencapaian target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 ditargetkan 1 pasar dan terealisasi 1 pasar (100%), Tahun 2023 ditargetkan 1 pasar dan terealisasi 1 pasar (100%), Tahun 2024 mengalami peningkatan target menjadi 2 pasar dan seluruhnya terealisasi (100%), serta pada Tahun 2025 kembali ditetapkan target 1 pasar dan berhasil direalisasikan 1 pasar (100%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan stabil dan terencana dengan baik.

Peningkatan target pada Tahun 2024 menjadi 2 pasar mencerminkan adanya penguatan kapasitas pelaksanaan program serta dukungan pemangku kepentingan yang semakin baik. Meskipun pada Tahun 2025 target kembali menjadi 1 pasar, capaian tetap optimal, yang menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan tetap efektif dan adaptif terhadap kebijakan serta ketersediaan sumber daya. Keberhasilan capaian 100% setiap tahun tidak terlepas dari pelaksanaan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	100	Tercapai

Dalam dokumen Renstra 2025-2029, target pengembangan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas direncanakan sebanyak 1 pasar per tahun pada periode 2025–2028, dan meningkat menjadi 2 pasar pada Tahun 2029. Penetapan target ini disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah Provinsi Gorontalo yang memiliki jumlah pasar tradisional harian relatif terbatas di masing-masing kabupaten/kota. Dengan jumlah pasar yang tidak terlalu banyak, strategi intervensi dilakukan secara bertahap dan terfokus agar setiap pasar yang diintervensi benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.

Dengan realisasi Tahun 2025 yang telah sesuai target, pelaksanaan program berada pada jalur yang tepat untuk mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Konsistensi capaian ini menjadi indikator bahwa perencanaan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi wilayah, serta mempertimbangkan aspek efektivitas dan keberlanjutan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1
Realisasi IKU BPOM	-		

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 pada indikator kinerja utama (IKU) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menunjukkan capaian yang sejalan dengan unit pembanding yang telah ditetapkan, yaitu BBPOM Palangkaraya dan BBPOM Jayapura. Berdasarkan hasil evaluasi

dan penilaian klasifikasi UPT, ketiga satuan kerja tersebut masing-masing merealisasikan 1 pasar pada Tahun 2025.

Realisasi sebanyak 1 pasar pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, sekaligus mencerminkan kesetaraan kapasitas pelaksanaan program di Balai Besar POM di Gorontalo dengan karakteristik wilayah yang relatif serupa. Baik BBPOM Palangkaraya maupun BBPOM Jayapura memiliki tantangan geografis, sebaran pasar tradisional yang terbatas, serta kondisi demografis yang memerlukan pendekatan intervensi secara bertahap dan terfokus. Dalam konteks tersebut, capaian 1 pasar bukan hanya menunjukkan pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga menggambarkan efektivitas strategi pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	- Sebagian pedagang dan pengunjung pasar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip Cek KLIK dan pentingnya keamanan pangan, sehingga edukasi harus dilakukan secara berulang dan intensif. - Fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti tempat penyimpanan produk pangan yang tidak higienis atau sistem drainase yang buruk, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan pasar yang sehat. - Pengawasan yang harus dilakukan secara rutin khususnya terkait keamanan pangan.	- Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar seperti kebersihan lingkungan, sanitasi - Aktif memberikan informasi melalui (leaflet, poster, media sosial, WAG) yang menarik, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan pedagang dan pengunjung. - Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan produk yang dijual di pasar memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi oleh masyarakat	- Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar seperti kebersihan lingkungan, sanitasi - Aktif memberikan informasi melalui (leaflet, poster, media sosial, WAG) yang menarik, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan pedagang dan pengunjung. - Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan produk yang dijual di pasar memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi oleh masyarakat	TW IV (Selesai)	Ya	INF.02	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap materi KIE

Capaian kinerja pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menunjukkan hasil yang baik, didukung oleh pelaksanaan

tahapan intervensi yang terstruktur serta dukungan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi program.

Permasalahan utama meliputi masih rendahnya pemahaman sebagian pedagang dan pengunjung terkait prinsip Cek KLIK dan pentingnya keamanan pangan, sehingga edukasi perlu dilakukan secara berulang dan intensif. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pasar seperti sanitasi, sistem drainase, dan fasilitas penyimpanan pangan yang belum higienis menjadi tantangan dalam menciptakan pasar yang sehat. Pengawasan yang harus dilakukan secara rutin juga memerlukan konsistensi dan koordinasi lintas sektor.

Sebagai upaya perbaikan, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar, khususnya aspek kebersihan dan sanitasi. Selain itu, perlu penguatan komunikasi dan edukasi melalui media seperti leaflet, poster, media sosial, dan WAG yang menarik dan mudah dipahami. Pengawasan rutin juga harus terus dilakukan untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar keamanan dan layak konsumsi.

Dengan penguatan infrastruktur, edukasi berkelanjutan, dan pengawasan konsisten, diharapkan kualitas dan keberlanjutan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat terus meningkat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas didukung oleh pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis, sosialisasi, serta pengawasan rutin yang dilakukan secara terstruktur. Komitmen pemerintah daerah dan pengelola pasar menjadi faktor utama dalam memastikan penerapan standar keamanan pangan berjalan optimal. Program edukasi dan KIE yang intensif meningkatkan pemahaman pedagang terkait praktik penanganan pangan yang baik dan prinsip Cek KLIK, sementara monitoring berkala menjaga konsistensi penerapan di lapangan.

   Sebaliknya, capaian dapat terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana pasar, rendahnya partisipasi pedagang, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan indikator sangat

bergantung pada sinergi program pembinaan, dukungan infrastruktur, dan pengawasan berkelanjutan.

3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya "pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu"

a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh surat rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) tahap II pada tahun 2025 yaitu 1 UMKM, Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik 1 UMKM dan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IPCPPOB) sebanyak 8 UMKM dan yang terbit sertifikat izin edar sebanyak 7 UMKM Pangan Olahan;

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	16,07	100	Baik

Tabel ini menunjukan perbandingan data target, realisasi dan capaian dan kategori capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah 16,07% dengan realisasi 16,07% realisasi yang diperoleh telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 16,07%. Capaian indikator ini adalah 100% termasuk dalam kategori baik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pendampingan yang terencana dan berkelanjutan, mulai dari bimbingan teknis, asistensi pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik, hingga evaluasi kesiapan pelaku usaha dalam proses sertifikasi. Selain itu, koordinasi yang efektif antara petugas pendamping dan pelaku UMKM turut

berperan dalam memastikan tindak lanjut hasil pendampingan dapat diselesaikan tepat waktu.

Dengan capaian kategori Baik, indikator ini menunjukkan efektivitas program pendampingan UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan produk. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui perluasan sasaran pendampingan serta penguatan monitoring untuk mendorong lebih banyak UMKM naik tingkat dan memperoleh sertifikasi secara berkelanjutan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	16,07	16,07	100	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan baru mulai diukur dan ditetapkan targetnya pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, indikator tersebut menunjukkan realisasi sebesar 16,07% dari target 16,07%, dengan capaian kinerja 100% dan kategori Baik. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh UMKM yang menjadi sasaran pendampingan pada tahun 2025 telah berhasil memperoleh rekomendasi sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	16,07	16,07	100	Tercapai

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra Tahun 2025–2029, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan menunjukkan realisasi sebesar 16,07%, telah sesuai dengan target Renstra sebesar 16,07%. Dengan demikian, tingkat capaian mencapai 100% dan berada pada kategori Tercapai.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan UMKM pada tahun pertama periode Renstra telah berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan ketepatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pendampingan yang terstruktur, serta dukungan koordinasi yang baik antara petugas pendamping dan pelaku usaha.

Hasil capaian pada tahun 2025 ini menjadi acuan yang kuat untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029. Ke depan, diperlukan upaya konsistensi dan penguatan pendampingan agar capaian indikator ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, seiring dengan perluasan sasaran UMKM yang didampingi.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	15,38	14,75
Realisasi IKU BPOM	15,62		

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan klasifikasi UPT, diketahui bahwa Balai Besar POM di Gorontalo mencapai realisasi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IPCPPOB Pangan Olahan sebesar 16,07%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Palangkaraya sebesar 15,38% dan BBPOM di Jayapura sebesar 14,75%.

Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi IKU BPOM sebesar 15,62%, capaian Balai Besar POM di Gorontalo juga berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan UMKM di Balai Besar POM di Gorontalo berjalan lebih optimal dan efektif dibandingkan unit pembanding yang sekelas.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. Kurangnya kemampuan pelaku usaha untuk memiliki bangunan sesuai standar, terutama pada produk Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengawet yang sudah memperoleh surat persetujuan kajian 2. Kurangnya bahan baku kelapa sehingga produksi tidak berjalan	1. Advokasi kepada lintas sektor terkait terkait bantuan pendanaan 2. Merekomendasikan produk pangan lain yang dapat diproduksi di sarana produksi	1. Advokasi kepada lintas sektor terkait terkait bantuan pendanaan 2. Merekomendasikan produk pangan lain yang dapat diproduksi di sarana produksi	TW IV (Selesai)	Ya	Ser.01	Kurangnya *startup* UMKM obat bahan alam dan kosmetik di Provinsi Gorontalo

Capaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori Baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pendampingan masih ditemukan beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan peningkatan capaian kinerja pada periode berikutnya.

Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi standar sarana dan prasarana produksi sesuai ketentuan, serta keterbatasan bahan baku yang berkelanjutan, sehingga proses produksi belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu, sebagian UMKM masih memerlukan pendampingan intensif dalam pemahaman dan penerapan aspek teknis cara pembuatan yang baik.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, dilakukan advokasi dan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, khususnya dalam rangka fasilitasi pemenuhan sarana produksi yang memenuhi standar. Selain itu, dilakukan rekomendasi pemanfaatan produk pangan lain yang dapat diproduksi dengan sarana yang tersedia, sehingga UMKM tetap dapat menjalankan kegiatan produksi secara berkelanjutan. Pendampingan lanjutan juga diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar cara pembuatan yang baik.

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan kinerja pendampingan UMKM pada tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus mendorong lebih banyak UMKM untuk naik tingkat dan memperoleh rekomendasi sertifikasi secara berkelanjutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan IPCPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dan terintegrasi. Program pendampingan UMKM dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan bimbingan teknis, asistensi penerapan cara pembuatan yang baik, serta evaluasi kesiapan sarana dan prasarana produksi, sehingga pelaku usaha memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap persyaratan sertifikasi.

   Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja. Penetapan sasaran UMKM yang tepat, intensitas pendampingan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan pelaku usaha, serta koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait turut mendukung percepatan pemenuhan persyaratan rekomendasi sertifikat. Selain itu, dukungan komitmen pelaku UMKM dalam menindaklanjuti hasil pendampingan berperan signifikan dalam tercapainya target kinerja.

   Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya UMKM dalam pemenuhan sarana produksi sesuai standar serta keterbatasan bahan baku yang berkelanjutan. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian strategi pendampingan, khususnya dalam pemilihan jenis produk yang dapat diproduksi dengan sarana yang tersedia serta penguatan advokasi lintas sektor untuk mendukung pemenuhan kebutuhan UMKM.

   Secara keseluruhan, program dan kegiatan pendampingan UMKM pada tahun 2025 telah berjalan efektif dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja. Ke depan, penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas

pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya diharapkan dapat meminimalkan faktor penghambat dan mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"

a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tim Kerja Penindakan Balai Besar POM di Gorontalo menyelenggarakan fungsi, yaitu:

a) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Penyidikan adalah tahapan krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang serta menemukan tersangkanya. Proses ini harus mengikuti prosedur hukum yang ketat demi menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum.

Dalam hal perhitungan capaian kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT ini diukur dari beberapa tahapan dalam penyelesaian berkas perkara, yaitu :

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum); dan
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai realisasi indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT didapat dari rumus perhitungan berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Dalam berjalananya proses penyidikan tidak menutup kemunkinan akan adanya perkara yang dilakukan pengehentian peroses penyidikan dengan disertai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penyidikan dapat dihentikan apabila:

a) Tidak cukup bukti.
b) Peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
c) Demi Hukum, misalnya:
   - Tersangka meninggal dunia
   - Perkara kadaluarsa
   - *Nebis in idem.*

Penghentian penyidikan ini dapat dilakukan oleh Penyidik dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan harus diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pelapor atau Korban, dan Tersangka. Untuk perkara yang dilakukan penghentian penyidikan maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahap terakhir yang dicapai oleh perkara tersebut.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96,25	113,23	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **85%** dengan realisasi senilai **96,23%.** Realisasi yang diperoleh telah melampaui target dengan peningkatan senilai **11,23%** di atas dari yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **113,23%** dan berada pada rentang >110,00% sehingga termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	85	96,25	113,23	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 sehingga tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, Indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **85%**; realisasi **96,23%**; capaian **113,23%**; dan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	96,25	113,23	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu **85 %** dengan realisasi tahun 2025 yaitu **96,23%**. Realisasi tahun 2025 ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target Renstra dengan peningkatan senilai **11,23%** di atas dari yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu **113,23%** dengan kategori **Melampaui**.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96,25	100	96,25
Realisasi IKU BPOM	89,91		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui adanya kesamaan realisasi antara Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM Jayapura yaitu **96,25%.** Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan Realisasi yang telah dicapai oleh BBPOM

Palangkaraya yaitu **100%**. Namun, Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo masih lebih tinggi dari target IKU BPOM yaitu **89,91%**.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. terjadi blokir anggaran di awal tahun sehingga penyidikan baru di mulai di akhir April 2025 2. Korwas PPNS belum mengakomodir permintaan penahanan yang di ajukan oleh Penyidik BBPOM Gorontalo, sehingga penahanan di alihkan dan dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Gorontalo Kota 3. Penumpukan Berkas perkara di Kejaksaan Tinggi sehingga membuat penerbitan P-21 menjadi lebih lambat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.	1. Advokasi kepada Direktorat Krimsus cq Direskrimsus untuk upaya penahanan 2.Advokasi kepada Kapolresta Gorontalo Kota, Kapolres Gorontalo dan Kapolres Bonebolango untuk dapat membantu PPNS BPOM Gorontalo jika penahanan di Reskrimsus tidak dapat dilakukan maka Polres sekitar dapat membantu melakukan penahanan 3. memperkuat koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi dan mempercepat proses pemberkasan untuk perkara-perkara selanjutnya.	1. Advokasi kepada Direktorat Krimsus cq Direskrimsus utuk upaya penahanan 2.Advokasi kepada Kapolresta Gorontalo Kota, Kapolres Gorontalo dan Kapolres Bonebolango untuk dapat membantu PPNS BPOM Gorontalo jika penahanan di Reskrimsus tidak dapat dilakukan maka Polres sekitar dapat membantu melakukan penahanan 3. memperkuat koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi dan mempercepat proses pemberkasan untuk perkara-perkara selanjutnya.	TW IV (Selesai)	Ya	DAK. 01	Perkara yang ditangani penyidik tidak sampai tahap 2 atau proses sampai tahap 2 memerlukan waktu yang lama

Indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dapat diraih meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, antara lain terjadinya pemblokiran anggaran di awal tahun sehingga penyidikan baru dimulai di akhir April 2025, Korwas PPNS yang belum mengakomodir permintaan bantuan penahanan yang diajukan oleh Penyidik BBPOM Gorontalo, penumpukan berkas perkara di Kejaksaan Tinggi Gorontalo sehingga penerbitan P-21 menjadi lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan tersebut didukung oleh langkah-langkah strategis yang dilakukan yaitu melakukan advokasi kepada Direktorat krimsus cq Direktur Kriminal Khusus untuk puaya penahanan, melakukan advokasi kepada Kapolres Gorontalo Kota, Kapolres gorontalo, dan Kapolres Bone Bolango untuk dapat membantu Penyidik BBPOM Gorontalo jika penahanan di Reskrimsus tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Krimsus Polda Gorontalo, membuat koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi dan mempercepat proses pemberkasan untuk perkara-perkara selanjutnya. semua langkah strategis tersebut diambil dengan harapan agar terciptanya proses penyidikan yang efekti, efisien, dan memberikan kepastian hukum

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan pada tahun 2025 tidak terlepas dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan secara optimal serta terkoordinasi dengan baik. Salah satu kegiatan yang dilakukan ialah kegiatan advokasi dengan pihak Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) POLDA Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini melibatkan langsung Direktur Kriminal Khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan bantuan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokasi dilakukan dengan cara penyampaian argumentasi yuridis dan pemaparan tingkat kepentingan untuk dilakukannya penahanan dalam rangka menjamin efektifitas proses penyidikan yang dilakukan. Tujuan lain dari advokasi ini juga untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

   Selain melakukan kegiatan advokasi dengan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) POLDA Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini melibatkan langsung Direktur Kriminal Khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan permohonan bantuan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokasi dilakukan dengan cara penyampaian

argumentasi yuridis dan pemaparan tingkat kepentingan untuk dilakukannya penahanan dalam rangka menjamin efektifitas proses penyidikan yang dilakukan. Tujuan lain dari advokasi ini juga untuk memastikan adanya kesamaan persepsi dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Selain itu, dilakukan juga advokasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten kota yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo agar dapat memberikan dukungan taktis dan teknis kepada Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo, khususnya jika Korwas PPNS yang berada di bawah naungan Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo tidak bisa memberikan dukungannya berupa bantuan penahanan tersangka tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memitigasi risiko sekaligus strategi alternatif agar proses penegakan hukum dapat tetap berjalan secara optimal. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kelembagaan dan mempercepat pengambilan keputusan untuk upaya hukum berupa penahanan tersangka.

Selanjutnya, Penyidik Balai Besar POM di Gorontalo telah melakukan langkah lain yaitu melakukan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo guna memastikan langkah yang diambil saat proses penyidikan sudah benar, serta memastikan kelengkapan berkas perkara untuk meminimalkan potensi pengembalian berkas (P-19). Melalui komunikasi yang telah dijalin dengan baik ini setiap, kekurangan dalam proses pemberkasan dapat segera dilengkapi sehingga dapat mempercepat proses penerbitan P-21, sehingga perkara tersebut dapat segera dilakukan tahapan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh percepatan dalam proses pemberkasan yang dilakukan Penyidik dengan dukungan segenap Tim Penindakan Gorontalo.Dengan adanya dukungan baik dari pihak Eksternal maupun Internal BPOM

tersebut dapat mendukung terciptannya penanganan perkara yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum.

3.1.6. Sasaran Strategis Meningkatnya "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"

a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tim Kerja Penindakan Balai POM di Gorontalo selain menyelenggarakan fungsi penyidikan ada beberapa fungsi lain yang diselenggarakan yang diantaranya yaitu fungsi cegah tangkal dan fungsi siber.

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM. Pelaporan kegiatan Siber (Patroli Siber dan Profiling) sendiri dilakukan setiap bulan **(12 laporan tiap tahun)** kepada Direktur Siber Obat dan makanan. Dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

a) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun).**
b) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun).**

Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dihitung dengan pembobotan sebagai berikut:

a) Persentase ketepatan waktu Pelaporan analisis penelusuran siber (50%), Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

b) Persentase nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan (25%), dan Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis.

c) Persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal (25%). Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	99	110	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **90%** dengan realisasi senilai **99%.** Realisasi yang diperoleh telah melampaui target dengan peningkatan senilai **9%** di atas dari yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **110%** dan berada pada rentang 100>x≥110,00% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	

2024	-	-	-	
2025	90	99	110	Sangat Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo dari tahun 2022 sampai 2025. Indikator ini belum terdapat di dalam Renstra 2020-2024 sehingga tidak ada data pengukuran target maupun realisasi pada rentang waktu 2022 sampai 2024. Oleh karena itu, Indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **90%**; realisasi **99%**; capaian **110%**; dan kategori **Sangat Baik** merupakan data awal (*baseline*) yang nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja tahun 2026.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	90	99	110	Melampaui

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar di wilayah pengawasan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target 2025 dan target Renstra adalah sama yaitu **90 %** dengan realisasi tahun 2025 yaitu **99%**. Realisasi tahun 2025 ini telah melampaui target tahun 2025 maupun target Renstra dengan peningkatan senilai **9%** di atas dari yang ditetapkan sehingga capaian indikator ini

terhadap tahun 2025 maupun Renstra diperoleh nilai yang sama yaitu **110%** dengan kategori **Melampaui**.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	99	100	84,03
Realisasi IKU BPOM	96,51		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui nilai realisasi Balai Besar POM di Gorontalo yaitu 99% lebih rendah 1% dari BBPOM di Palangkaraya yang memiliki capaian 100%, namun realisasi yang dicapai oleh BBPOM Gorontalo lebih tinggi 14,97% dibanding dengan capaian realisasi BBPOM di Jayapura yaitu 84,03 %.

Dari ketiga UPT tersebut hanya Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM di Palangkaraya yang realisasinya melebihi Realisasi IKU BPOM yaitu 96,51%.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Tidak ada kendala	Realisasi indikator telah sesuai target	-		Tidak		

Capaian indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 memang tidak ada kendala yang berarti. Pada tiga komponen penilaian untuk indikator ini, dua komponen telah mencapai nilai sempurna. Dua komponen tersebut adalah persentase ketepatan waktu Pelaporan analisis penelusuran siber dan persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Hal ini tidak terlepas dari manajemen pelaksanaan, koordinasi, dan komitmen petugas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Untuk persentase nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan memang belum mencapai nilai yang sempurna namun nilai yang diperoleh sudah cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menunjang peningkatan kualitas dari analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan selanjutnya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu, memperbanyak sumber data yang digunakan dalam menyusun analisis tersebut. Dan data yang digunakan didapatkan dari sumber yang terpercaya bukan dari blog pribadi, website pribadi, dan lain-lain, sehingga dapat divalidasi agar analisis tersebut terjamin ketepatan dan kebenarannya. Selain itu untuk pelaksanaan penyusunan analisis kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan bisa dilakukan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya guna memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi saat proses penyususnan analisis tersebut.

Selain itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen yang baik kepada semua pihak yang terkait terutama petugas pelaksana yang dalam hal ini Tim Penindakan Balai Besar POM di Gorontalo untuk mempertahankan nilai

persentase ketepatan waktu Pelaporan analisis penelusuran siber dan persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal yang diperoleh saat ini.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan pencapaian indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak terlepas dari rencana kinerja, dengan didukung koordinasi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait. pembagian tugas secara terarah dan terkoordinasi sehingga ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber (Patroli Siber dan Profiling) di sepanjang tahun 2025 yang menyumbang nilai sempurna.

   Selain itu koordinasi yang dilakukan baik dengan lintas fungsi maupun lintas instansi pemerintah untuk menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi analisis kejahatan baik yang disampaikan oleh DIrektorat Cegah Tangkal Badan POM maupun Balai Besar POM di Gorontalo dapat terlaksana secara menyeluruh dan tepat sasaran.

   selanjutnya, pelaksanaan penyusunan analisis kejahatan obat makanan yang telah disusun dengan menggunakan data yang telah diperoleh bai melalui penginputan data rawan kasus maupun data hasil analisis penelusuran siber (Patroli Siber) yang telah diinput secara konsisten oleh petugas. dengan adanya kerja sama yang baik tersebut

3.1.7 Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang Prima

a. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Untuk Indikator ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	5	106,38	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT, terlihat bahwa target IPP yang ditetapkan sebesar 4,7 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 5,0. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 106,38%, yang menempatkan nilai IPP pada kategori “Sangat Baik.”

Capaian sebesar 106,38% tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi indikator kinerja, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa budaya kerja berorientasi pelayanan telah terinternalisasi dengan baik. Ke depan, hasil ini menjadi dasar untuk mempertahankan bahkan meningkatkan

kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan, evaluasi berkala, dan penguatan tata kelola yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	4,26	3,98	93,43	Cukup
2023	4,4	4,81	109,32	Sangat Baik
2024	4,9	4,95	101,02	Sangat Baik
2025	4,7	5	106,38	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPP UPT tahun 2022–2024, terlihat tren peningkatan kinerja yang konsisten. Pada tahun 2022, realisasi IPP sebesar 3,98 dengan capaian 93,43%, menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi 4,81 dan capaian 109,32%, yang menandakan keberhasilan upaya perbaikan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2024, kinerja tetap terjaga dengan realisasi 4,95 dan capaian 101,02%, masuk dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan UPT dari tahun ke tahun.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7	5	106,38	Melampaui

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025–2029 pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT, terlihat bahwa capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Realisasi IPP Tahun 2025 mencapai nilai 5,0, yang berada di atas target

yang direncanakan dalam dokumen Renstra, sehingga dikategorikan melampaui target.

Dalam perencanaan Renstra 2025–2029, target IPP ditetapkan secara bertahap dan progresif, yaitu 4,75 pada tahun 2026, 4,80 pada tahun 2027, 4,85 pada tahun 2028, dan 4,90 pada tahun 2029. Pola peningkatan bertahap tersebut menunjukkan adanya strategi peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Namun demikian, dengan realisasi tahun 2025 yang telah mencapai nilai 5,0, UPT telah melampaui bahkan melampaui proyeksi target hingga akhir periode Renstra.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Indeks Pelayanan Publik UPT	5	4,96	4,7
Realisasi IKU BPOM	-		

Pada tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk Indeks Pelayanan Publik dengan unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan klasifikasi UPT. Unit pembanding tersebut adalah BBPOM Palangkaraya dan BBPOM Jayapura. Berdasarkan data, BBPOM Palangkaraya memperoleh realisasi IPP sebesar 4,96, sedangkan BBPOM Jayapura memperoleh nilai 4,7. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 yang mencapai 5,0, terlihat bahwa capaian UPT berada di atas kedua unit pembanding tersebut.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala	- Komitmen dan konsistensi penerapan standar pelayanan dan 5S bagi seluruh petugas pemberi layanan - Pelatihan sensibilitas disabilitas bagi sleuruh pegawai	- Komitmen dan konsistensi penerapan standar pelayanan dan 5S bagi seluruh petugas pemberi layanan - Pelatihan sensibilitas disabilitas bagi sleuruh pegawai	TW IV (Selesai)	Ya	INF.05	Menurunnya indeks kepuasan masyarakat

Pada tabel Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja IKU Indeks Pelayanan Publik, terlihat bahwa capaian kinerja yang optimal dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama adalah komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menerapkan standar pelayanan secara disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Standar pelayanan yang jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik memberikan kepastian proses serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, keberhasilan kinerja IPP juga didukung oleh penerapan budaya kerja 5S serta Konsistensi dalam menjaga sikap dan etika pelayanan inilah yang berkontribusi besar terhadap persepsi positif masyarakat.

Selain itu, direkomendasikan pelaksanaan pelatihan sensibilitas disabilitas bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik yang inklusif. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, empati, dan keterampilan pegawai dalam melayani penyandang disabilitas, baik dari aspek komunikasi maupun aksesibilitas layanan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga adil, ramah, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penguatan standar pelayanan menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan capaian IPP. Penyusunan dan pembaruan standar pelayanan, maklumat layanan, serta SOP yang jelas memberikan kepastian prosedur, waktu, dan biaya layanan kepada masyarakat. Selain

itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan tindak lanjut atas hasil survei turut berperan penting dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga pelayanan dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas layanan, termasuk pelatihan pelayanan prima, etika komunikasi, dan pengelolaan pengaduan, juga memberikan kontribusi signifikan. Petugas yang memiliki pemahaman dan keterampilan pelayanan yang baik mampu memberikan layanan yang responsif, ramah, dan profesional, sehingga berdampak langsung pada persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

Sebaliknya, potensi kendala dapat terjadi apabila penerapan standar pelayanan tidak konsisten, sarana prasarana belum optimal, atau tindak lanjut pengaduan kurang cepat. Oleh karena itu, konsistensi implementasi program, penguatan evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan capaian IPP secara berkelanjutan.

3.1.8 Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

a) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan;
b) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	92	100,03	Sangat Baik

Pada tahun 2025, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan realisasi kinerja yang positif. Target nilai yang ditetapkan sebesar 91,97, sementara realisasi yang dicapai mencapai 92 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada angka 100,03 persen dengan kategori “Sangat Baik”. Kategori tersebut mencerminkan konsistensi organisasi dalam menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pengawasan obat dan makanan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa komitmen dan berbagai upaya penguatan pada area perubahan zona integritas telah dilaksanakan baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2022	91	85,62	94,09	Cukup
2023	81,7	94,67	115,88	Sangat Baik

2024	95,67	91,96	96,12	Cukup
2025	91,97	92	100,03	Sangat Baik

Tren pembangunan Zona Integritas di Balai Besar POM di Gorontalo menunjukkan dinamika dan fluktuasi capaian hal ini diantaranya disebabkan oleh perubahan besaran target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target Nilai Pembangunan ZI ditetapkan sebesar 91 persen. Realisasi yang dicapai berada pada angka 85,62 persen, sehingga tingkat capaian tercatat 94,09 persen dan dikategorikan Cukup. Hasil ini menggambarkan bahwa upaya pembangunan ZI sudah berjalan, meskipun masih terdapat gap yang perlu diperbaiki pada periode berikutnya.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan realisasi yang cukup signifikan. Dengan target sebesar 81,7 persen, realisasi mencapai 94,67 persen sehingga capaian tercatat 115,88 persen dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2024, target kembali dinaikkan menjadi 95,67 persen. Realisasi berada pada angka 91,96 persen, menghasilkan capaian 96,12 persen dan berada pada kategori Cukup.

Selanjutnya pada tahun 2025, target ditetapkan 91,97 persen dengan realisasi mencapai 92 persen. Tingkat capaian tercatat 100,03 persen, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik. Ini menandakan bahwa program pembangunan ZI telah berjalan efektif dan target yang direncanakan dapat dicapai bahkan sedikit melampaui ekspektasi.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	91,97	92	100,03	Melampaui

Tabel tersebut menggambarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Renstra 2025–2029 untuk indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT BPOM. Pada periode Renstra 2025-2029, target Nilai Pembangunan ZI yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 91,97

dengan sebesar 92. Nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Jika dikonversi dalam bentuk persentase capaian, kinerja yang diperoleh mencapai 100,03% dengan kategori “Melampaui”.

Hal ini mencerminkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas di Balai Besar POM di Gorontalo telah berjalan efektif dan konsisten dengan arah strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Secara substantif, capaian ini mengindikasikan adanya penguatan tata kelola, integritas, serta budaya kerja yang mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, sekaligus menjadi pondasi penting dalam mempertahankan dan meningkatkan predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92	88,19	89,91
Realisasi IKU BPOM	86,81		

Tabel ini menyajikan perbandingan realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo dengan unit pembanding yang ditetapkan. Perbandingan ini penting untuk melihat posisi kinerja relatif Balai Besar POM di Gorontalo di antara UPT sekelasnya.

Untuk indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, Balai Besar POM di Gorontalo mencatat nilai 92. Capaian ini berada di atas nilai yang diperoleh Balai Besar POM di Palangkaraya, yang tercatat sebesar 88,19, serta lebih tinggi dibandingkan Balai Besar POM di Jayapura dengan nilai 89,91. Jika dibandingkan dengan realisasi IKU BPOM secara nasional yang sebesar 86,81, kinerja Balai Besar POM di Gorontalo juga menunjukkan nilai capaian yang lebih tinggi.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo memiliki tingkat kematangan pembangunan Zona Integritas yang relatif lebih baik dibandingkan unit pembanding, sekaligus melampaui rata - rata kinerja organisasi secara nasional. Kondisi ini mencerminkan konsistensi implementasi program reformasi birokrasi, penguatan integritas, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola serta pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Meski capaian telah melampaui target, tantangan ke depan tetap ada. Organisasi perlu memastikan bahwa nilai ZI tidak hanya tercermin dalam dokumen dan penilaian, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari, proses pengambilan keputusan, dan pola pelayanan kepada masyarakat. Penguatan monitoring internal, evaluasi berkala, serta inovasi pelayanan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan capaian ini.

5. Analisis Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak ada kendala	Realisasi indikator telah sesuai target			Tidak		

Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di Balai Besar POM di Gorontalo dimulai dari komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui pencanangan ZI sejak Tahun 2019. Selanjutnya dilakukan pembentukan Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta penyusunan rencana aksi yang terstruktur pada enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut

membuahkan hasil dengan ditetapkannya Balai POM di Gorontalo sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB.

Balai Besar POM di Gorontalo terus melakukan implementasi ZI melalui berbagai inovasi perbaikan layanan, digitalisasi proses, penguatan pengendalian internal, dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang transparan. Untuk mengukur kinerja pembangunan ZI diukur juga dilakukan survei kepuasan dan persepsi anti korupsi, serta penilaian internal dan eksternal. Inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat juga terus dibangun sehingga pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Gorontalo akhirnya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM dari Kemenpan RB. Capaian WBBM ini menandakan tingkat kematangan yang lebih tinggi dengan layanan publik yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Balai Besar POM di Gorontalo perlu terus berbenah dan konsisten untuk mengembangkan inovasi layanan publik dan komitmen anti korupsi untuk memastikan agar upaya dan predikat WBK/WBBM yang telah dicapai dapat terus dipertahankan secara konsisten dan berkelanjutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

   Keberhasilan capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 tidak terjadi secara instan akan tetapi merupakan upaya terstruktur yang telah diupayakan sejak pertama kali dilakukan komitmen pembangunan zona integritas sejak tahun 2019. Hasil ini lahir dari kombinasi kebijakan, komitmen pimpinan, serta kerja konsisten seluruh pegawai. Beberapa program kegiatan yang mendukung diantaranya:

   a) Komitmen pimpinan dan budaya integritas. Pimpinan unit kerja secara rutin menyampaikan arahan terkait integritas, anti korupsi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada pengguna. Komitmen ini tidak berhenti pada tataran slogan, tetapi diwujudkan melalui

penandatanganan pakta integritas, deklarasi ZI, serta monitoring berkala terhadap perilaku dan kinerja pegawai.

b) Balai Besar POM di Gorontalo melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur layanan melalui review standar pelayanan secara berkala dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan pengguna layanan. Forum Konsultasi publik dilakukan setiap tahun untuk mendapatkan masukan dari stakeholder/pentahelix. Pemanfaatan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai bahan evaluasi juga senantiasa dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan.

c) Program penguatan pengawasan internal juga semakin diperkuat. Fungsi kepatuhan, audit internal, serta mekanisme pengaduan (Whistleblowing System) dioptimalkan. Setiap temuan audit dan pengaduan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti secara transparan, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

d) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, coaching, dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi. Pegawai didorong untuk memahami perannya dalam pembangunan ZI, sekaligus diberi ruang untuk berinovasi dalam peningkatan layanan maupun pengikatan kompetensi dalam pengawasan obat dan makanan.

e) Penguatan dan integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pemetaan risiko layanan publik, pengawasan, dan administrasi. Risiko yang teridentifikasi ditindaklanjuti dengan rencana pengendalian, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

f) Pengembangan inovasi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi pengungkit percepatan capaian ZI. Berbagai inovasi pelayanan, dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Beberapa inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat dilaksanakan di antaranya adalah Inovasi Layanan Sultan (Konsultasi dan Pendampingan) untuk percepatan penanganan stunting (INGO A+) yang ditetapkan sebagai pemenang PKRI (Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi) Tahun 2024 dari Kementerian PAN RB

g) Pengembangan kanal komunikasi publik untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan transparansi. Kanal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna layanan baik dalam rangka pengaduan maupun mendapatkan informasi Keamanan Obat dan Makanan.

b. Nilai AKIP UPT BPOM

Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
c) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
d) Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
e) Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 dan Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025.

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
e) Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja. Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh evaluator yang telah dibekali kompetensi terkait SAKIP. Evaluasi AKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat Nilai AKIP terdiri dari

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	76,44	95,43	Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan data target, realisasi, capaian, dan kategori capaian dari indikator Nilai AKIP UPT BPOM. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan adalah **80,1%** dengan realisasi senilai **76,44%.** Realisasi yang diperoleh masih di bawah target dengan selisih senilai **3,66%** di bawah dari yang ditetapkan. Capaian indikator ini adalah **95,43%** dan berada pada rentang 90,00%<x<100,00% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 dikategorikan **BB (Sangat Baik)** yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

NO	Komponen	Tahun 2025	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	18,24
2	Pengukuran Kinerja	24	18,96
3	Pelaporan Kinerja	12	9,72
4	Evaluasi Internal	20	15,20
5	Capaian Kinerja	20	14,32
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**76,44**
Tingkat Akuntabilitas			**BB**

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	81,8	78,61	96,10	Baik
2023	83,8	78,99	94,26	Baik
2024	82,62	79,13	94,26	Baik
2025	80,1	76,44	95,43	Baik

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Nilai AKIP UPT BPOM dari tahun 2022 sampai 2025. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa meskipun belum mencapai target nilai AKIP UPT BPOM, realisasi dari tahun 2022-2025 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan telah ada perbaikan namun belum signifikan untuk dapat mencapai target dan meraih kategori AA (Sangat Memuaskan).

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	80,1	76,44	95,43	Akan Tercapai

Tabel tersebut menggambarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Renstra 2025–2029 untuk indikator Nilai AKIP UPT BPOM. Pada periode Renstra, target Nilai AKIP yang ditetapkan adalah 80,1%. Angka ini juga menjadi target kinerja tahunan Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 76,44%. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan target yang telah ditetapkan. Jika dikonversi dalam bentuk persentase capaian, kinerja yang diperoleh mencapai 95,43%, dengan kategori “Akan Tercapai”

Hal ini mencerminkan bahwa diperlukan upaya penguatan terhadap ruang lingkup AKIP seperti integrasi pada dokumen perencanaan, pemenuhan komponen pengukuran kinerja, optimalisasi penyajian data pada pelaporan kinerja, hingga penguatan akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Nilai AKIP UPT BPOM	76,44	80,81	74,72
Realisasi IKU BPOM	78,33		

Tabel ini menunjukkan perbandingan realisasi kinerja indikator Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 antara Balai Besar POM di Gorontalo, BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Jayapura. Dari data tersebut dapat diketahui realisasi Balai Besar POM di Gorontalo yaitu 76,44% berada diantara kedua unit lainnya. Realisasi BBPOM di Palangkaraya yaitu 80,81% merupakan realisasi paling tinggi, sedangkan BBPOM di Jayapura dengan realisasi 74,72% merupakan yang paling rendah di antara ketiga unit tersebut. Realisasi Balai Besar POM di Gorontalo dan BBPOM di Jayapura

juga masih lebih rendah target IKU BPOM yaitu 78,33% sedangkan realisasi BBPOM di Palangkaraya sudah lebih besar dari target IKU BPOM.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak ada kendala				Tidak		

Penyebab adanya penurunan kinerja pada Nilai AKIP UPT BPOM yaitu:

a) Pada Perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian; belum terdapat kertas kerja perhitungan serta analisis terdokumentasi dalam menetapkan target indikator; dan proses penyusunan SKP dilakukan bersamaan dengan rapat evaluasi kinerja, namun tidak terdapat dokumentasi hasil pembahasan dialog kinerja dalam rapat penyusunan matriks peran hasil tahun 2024 dan 2025.
b) Pada Pengukuran Kinerja, keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dan penanggung jawab kinerja Satker terutama untuk mengukur capaian kinerja; belum didukung dengan data sumber dan/atau kertas kerja perhitungan realisasi/capaian kinerja sehingga data kinerja tidak dapat tertelusur dengan baik; SOP Pelaporan Monev nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.23A.03 pengumpulan data kinerja telah disusun namun belum memenuhi kriteria; Keputusan Pimpinan dalam pemberian reward dan punishment yang telah ditetapkan dan diimplementasikan hanya terkait dengan disiplin pegawai, belum dikaitkan dengan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi; dan hasil pengukuran data capaian kinerja belum seluruhnya didukung dengan kertas kerja perhitungan capaian kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan data sumber (*raw* data) yang telah dimanfaatkan.

c) Pada Pelaporan Kinerja, pada Triwulan IV 2024 terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan kinerja dan aplikasi simetris; Pada TW I dan TW II tahun 2025 terdapat perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen RHPK dengan laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal dan aplikasi e-simetris seperti pada beberapa IKU; dan terdapat beberapa catatan pada Laporan Evaluasi Internal (LEI), Laporan Kinerja Interim, dan Laporan Kinerja Tahunan.

d) Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, pada matriks monitoring dan evaluasi di Laporan Evaluasi Internal TW III 2024 serta TW I dan II 2025 belum menyajikan Monitoring Tindak Lanjut atas kendala dan rencana periode sebelumnya; Pelaporan kinerja tahun 2024 dan 2025 pada aplikasi simetris belum sepenuhnya tertib; dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Perencanaan Kinerja
   a. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker serta melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan terutama untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan
   b. Menetapkan target kinerja dengan baik disertai dengan kertas kerja penetapan target berdasarkan basis data yang memadai dilengkapi dengan penyajian justifikasi dan perhitungan yang logis
   c. Melakukan pembahasan untuk menetapkan *cascading* kinerja sampai pada level individu melalui Matriks Peran dan Hasil.

2. Pengukuran Kinerja
   a. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal dalam notulen dan laporan hasil evaluasi untuk menunjukkan adanya peran sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja

b. Mendokumentasikan data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya dan memastikan data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur
c. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja
d. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria
e. Menyusun Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi
f. Melakukan pelaporan realisasi pada aplikasi SIMETRIS secara tertib

3. Pelaporan Kinerja

a. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja
b. Menyesuaikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja agar sejalan dengan hasil pencapaiannya
c. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja untuk melakukan perbaikan aktivitas dalam mencapai kinerja terutama untuk indikator yang tidak tercapai
d. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan

b. Menyajikan hasil capaian kinerja pada laporan kinerja periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi kinerja internal tahun berjalan
c. Menyusun rencana tindak lanjut serta segera menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama untuk mendukung upaya perbaikan implementasi SAKIP Satker melalui aplikasi SAPA APIP.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Kegiatan yang dilakukan yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja:

   a) Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian kinerja dan anggaran dilaksanakan secara rutin
   b) Mengikuti Bimtek Penyusunan LAKIP di Badan POM yang dilaksanakan secara hybrid oleh semua Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2025
   c) Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan di website Badan POM dan subsite Balai
   d) Melakukan penyusunan indikator kinerja berbasis outcome
   e) Telah dilakukan review RENSTRA sebagai upaya perbaikan perencanaan kinerja, dan telah disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagai upaya perbaikan perencanaan kinerja yang dilengkapi dengan Kertas Kerja.
   f) Telah melakukan Revisi SOP Pengumpulan data dan Monev Perencanaan Kinerja

c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

a) Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
b) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) dalam kesepakatan Target Balai Besar POM di Gorontalo dengan Unit Pengampu terkait Target NKA yang berasal dari pembobotan Nilai IKPA dan EKA 2025

Target IKPA	Target EKA	Target NKA	Klasifikasi
96,70	85,09	90,89	5 (Sangat Baik)

Dalam hasil Perhitungan Nilai kinerja Anggaran tahun 2025

UPT	NK Perencanaan Anggaran (IKPA)	NK Pelaksanaan Anggaran (EKA)	Nilai Kinerja Anggaran
Balai Besar POM di Gorontalo	92,52	96,02	94,27

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada pehitungan Nilai Realisasi NKA berada di angka 94,27 dengan nilai koneversi 5 kategori sangat baik

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik

Sesuai dengan perhitungan target dan realisasi capaian Nilai kinerja Anggaran tahun 2025 berada di kategori Baik, ini merupakan nilai positif dalam menggambarkan kinerja Anggaran di Balai Besar POM di Gorontalo

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	90,60	90,84	100,26	Sangat Baik
2023	91,8	90,1	98,15	Cukup

2024	90,3	90,77	100,52	Sangat Baik
2025	5	5	100	Baik

Perubahan kertas kerja perhitungan Nilai kinerja Anggaran pada tahun 2025 dengan periode Rencana Strategis Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025-2029 dan penyesuai Target yang sudah menggunakan nilai konversi pada target dan realisasi sehingga Nilai perbandingan tidak variable namun jika melihat perhitungan Nilai IKPA dan EKA tahun 2025 di 94,27% dengan target 90,89% capaian NKA pada 2025 berada di 103,71% ini merupakan angka tertinggi pencapaian NKA jika dibandingkan dengan Capaian Tahun-tahun sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	5	5	100	Melampaui

Capaian setelah klasifikasi konversi indikator Nilai Kinerja Anggaran menunjukan Target telah tercapai ini disebabkan range perhitungan klasifikasi berada di angka 90,01-100, hal ini masih perlu di monitoring dan evaluasi kedepan melihat dinamika Pagu anggaran belum ada kenaikan yang signifikan dan perubahan kebijakan penggunaan anggaran yang terus disesuaikan dengan kebijakan nawacita presiden republik indonesia serta perubahan kerta kerja yang telah ditentukan oleh kementerian keuangan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5
Realisasi IKU BPOM	4,59		

Adanya klasifikasi Nilai NKA pada tahun 2025 menghasilkan Capaian yang cenderung sama antar Balai pada Klaster yang sama namun jika dilihat dari nilai realisasi NKA Badan POM, NIlai Balai Besar POM tahun 2025 masih sedikit lebih tinggi

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak ada kendala	Realisasi indikator telah sesuai target			Tidak		

Perubahan kertas kerja perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan periode Rencana Strategis 2025–2029 memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pengukuran kinerja anggaran Balai Besar POM di Gorontalo. Penyesuaian metodologi melalui penggunaan nilai konversi pada target dan realisasi menjadikan proses perbandingan kinerja lebih objektif, stabil, dan tidak lagi dipengaruhi oleh variabilitas teknis antar indikator. Dengan pendekatan ini, pengukuran NKA tidak hanya mencerminkan tingkat serapan anggaran, tetapi juga keterkaitannya dengan perencanaan strategis dan capaian output secara lebih proporsional. Hasilnya, meskipun target Nilai IKPA dan EKA tahun 2025 ditetapkan sebesar 90,89%, realisasi kinerja anggaran mampu mencapai 94,27% yang menghasilkan capaian NKA sebesar 103,71%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan peningkatan nyata dalam efektivitas pengelolaan anggaran.

Keberhasilan tersebut terutama didorong oleh semakin matangnya integrasi antara perencanaan kinerja dan penganggaran sejak awal tahun. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang disertai target triwulanan memungkinkan pengendalian anggaran dilakukan secara lebih

disiplin dan terukur. Selain itu, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala telah meminimalkan deviasi antara rencana dan pelaksanaan, sehingga risiko penumpukan realisasi di akhir tahun dapat ditekan. Implementasi pengendalian internal yang lebih konsisten, termasuk penyesuaian cepat terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan operasional, turut memastikan bahwa belanja yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, capaian NKA 103,71% tidak semata-mata menunjukkan efisiensi serapan, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kualitas belanja yang selaras dengan prioritas organisasi.

Untuk melakukan peningkatan kinerja anggaran ke depan, upaya yang dapat ditempuh adalah memperkuat keterkaitan antara indikator kinerja dan struktur anggaran sejak tahap perencanaan. Setiap kegiatan perlu semakin diarahkan pada penciptaan outcome yang terukur, bukan hanya output administratif, sehingga nilai konversi target dan realisasi benar-benar mencerminkan manfaat program. Selain itu, penguatan perencanaan berbasis risiko perlu terus dikembangkan agar potensi keterlambatan, perubahan kebijakan, atau hambatan operasional dapat diantisipasi lebih dini. Pemanfaatan data kinerja historis, termasuk capaian tertinggi NKA tahun 2025, dapat dijadikan baseline realistis dalam menetapkan target tahun berikutnya tanpa mengurangi tantangan peningkatan kinerja.

Sebagai rekomendasi kinerja, Balai Besar POM di Gorontalo perlu menjaga konsistensi kualitas pengelolaan anggaran dengan menjadikan capaian tahun 2025 sebagai standar minimum baru (new performance baseline). Fokus ke depan tidak hanya pada mempertahankan capaian di atas 100%, tetapi pada peningkatan nilai strategis belanja melalui penguatan sinergi antar fungsi, peningkatan akurasi perencanaan kegiatan, serta pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan pendekatan tersebut, kinerja anggaran tidak hanya unggul secara numerik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap pencapaian sasaran strategis dalam periode Renstra 2025–2029

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Analisis program pengelolaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 103,71% di Balai Besar POM di Gorontalo merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang semakin terintegrasi antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pengendalian kinerja. Program penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak lagi berorientasi pada serapan semata, tetapi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui penetapan target yang telah dikonversi dan terukur sejak awal tahun. Penyesuaian kertas kerja NKA pada periode Renstra 2025–2029 memungkinkan setiap program memiliki bobot kinerja yang proporsional, sehingga realisasi anggaran yang dicapai benar-benar mencerminkan kontribusi program terhadap outcome organisasi.

   Program pengendalian pelaksanaan anggaran menjadi faktor utama keberhasilan, khususnya melalui penerapan monitoring dan evaluasi berkala terhadap IKPA dan EKA sebagai indikator antara (intermediate outcome). Dengan realisasi IKPA dan EKA sebesar 94,27% yang melampaui target 90,89%, program ini berhasil memastikan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, serta minimnya deviasi antara rencana dan realisasi. Pengendalian yang dilakukan secara periodik memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dini terhadap kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau penurunan kualitas, sehingga risiko penurunan NKA dapat ditekan secara signifikan.

   Selain itu, program perencanaan anggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terbukti efektif dalam menjaga konsistensi realisasi anggaran sepanjang tahun. Penjabaran target kinerja dan anggaran per triwulan mendorong setiap unit kerja untuk mengelola belanja secara lebih disiplin dan terukur. Program ini juga memperkuat keterkaitan antara alokasi anggaran dengan prioritas strategis, sehingga belanja yang direalisasikan tidak bersifat administratif,

tetapi memberikan nilai tambah langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dampaknya, kualitas belanja meningkat dan tercermin pada capaian NKA yang menjadi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Program penguatan tata kelola dan pengendalian internal turut berkontribusi terhadap keberhasilan NKA 2025. Melalui peningkatan koordinasi lintas fungsi, pengawasan internal yang lebih konsisten, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan, organisasi mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan program anggaran membantu mengidentifikasi potensi hambatan sejak awal dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat, sehingga pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor kinerja yang diharapkan.

Secara keseluruhan, analisis program menunjukkan bahwa keberhasilan NKA tahun 2025 bukan merupakan hasil dari satu program tunggal, melainkan sinergi dari program perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran yang semakin matang. Ke depan, program-program tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan menekankan kualitas outcome, penguatan perencanaan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran. Dengan demikian, capaian NKA tidak hanya dapat dipertahankan pada level tinggi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pencapaian sasaran Renstra 2025–2029 secara berkelanjutan

d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat

maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Adapun kategori tingkat Maturitas sebagai berikut:

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
1. *Risk Naive*	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
2. *Risk Aware*	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
3. *Risk Defined*	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi
4. *Risk Managed*	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
5. *Risk Enabled*	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,93	97,67	Baik

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Gorontalo menetapkan target Indeks Manajemen Risiko 3 yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi yang dicapai sebesar 2,93 (Risk aware). Capaian ini setara dengan 97,67 persen dari target yang telah ditetapkan dengan kategori Baik.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
2022	-	-	-	
2023	-	-	-	
2024	-	-	-	
2025	3	2,93	97,67	Baik

Tabel ini menunjukkan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dari indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Gorontalo. Indeks Manajemen Risiko merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga tidak terdapat target dan realisasi pada tahun sebelumnya Oleh karena itu, indikator yang baru ditetapkan di dalam Renstra 2025-2029 dengan data hasil pengukuran tahun 2025 yaitu target **3**; realisasi **2,93**; capaian **97,67%** dengan kategori **baik.** Capaian ini merupakan data awal (*baseline*) yang akan digunakan sebagai pembanding pada laporan kinerja pada tahun - tahun selanjutnya.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target renstra 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	2,93	97,67	Akan Tercapai

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja strategis yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi. Dalam periode Renstra 2025–2029, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3,00, dan target tahunan tahun 2025 juga diselaraskan pada angka yang sama.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo memperoleh nilai realisasi sebesar 2,93. Capaian ini setara dengan 97,67 persen dari target yang ditetapkan dengan kategori “Akan Tercapai”. Nilai tersebut mencerminkan bahwa proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko telah diterapkan secara terstruktur di berbagai proses bisnis.

Namun demikian, masih terdapat selisih antara target dan realisasi yang menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko masih berada pada tahap pematangan. Penguatan budaya sadar risiko, peningkatan kapasitas pegawai dalam manajemen risiko, serta monitoring efektivitas pengendalian risiko secara periodik masih perlu terus dioptimalkan agar indeks manajemen risiko dapat mencapai tingkat maturitas yang diharapkan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun tata kelola risiko yang terintegrasi dengan manajemen kinerja dan pengambilan keputusan, sekaligus menjadi pondasi penting bagi peningkatan akuntabilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi berbagai dinamika lingkungan strategis.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja unit pembanding yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT

Indikator Kinerja	BBPOM Gorontalo	BBPOM Palangkaraya	BBPOM Jayapura
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,93	2,93	2,87
Realisasi IKU BPOM	-		

Untuk memberikan gambaran posisi kinerja Balai Besar POM di Gorontalo secara lebih objektif, dilakukan perbandingan realisasi Indeks Manajemen Risiko dengan unit pembanding yang memiliki klasifikasi setara, yaitu Balai Besar POM di Palangkaraya dan Balai Besar POM di Jayapura. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Gorontalo dibandingkan dengan unit kerja lain dalam kategori yang sama.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Gorontalo memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,93, yang berada pada level yang sama dengan Balai Besar POM di Palangkaraya yang juga mencatat nilai 2,93. Sementara itu, Balai Besar POM di Jayapura memperoleh nilai 2,87, sedikit lebih rendah dibandingkan dua unit lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Gorontalo telah berada pada tingkat kematangan yang sebanding dengan unit pembanding dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian unit kerja lain dalam klasifikasi yang sama. Kesetaraan nilai dengan Balai Besar POM di Palangkaraya mengindikasikan adanya kesamaan dalam tata kelola risiko, baik dari sisi proses, dokumentasi, maupun integrasi manajemen risiko dalam perencanaan dan pengendalian kinerja.

Capaian ini mengisyaratkan bahwa ruang peningkatan masih tersedia, khususnya untuk mendorong indeks manajemen risiko mencapai tingkat optimal sebagaimana target jangka menengah organisasi. Perbandingan dengan unit pembanding juga menjadi dasar bagi perumusan strategi perbaikan berkelanjutan agar sistem manajemen risiko semakin matang

dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

4. Analisis Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

No	Nama Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belum optimalnya integrasi antara penetapan target kinerja dengan identifikasi risiko organisasi.	Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan manajemen risiko ke dalam siklus perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi.	Integrasi analisis risiko dalam perencanaan dan monev kinerja secara berkala	2026	T		
		Rendahnya tingkat kepatuhan pegawai dalam melakukan pemutakhiran data risiko pada aplikasi SIMAKIN (Aplikasi Penilaian Kinerja Pengawai).	Mewajibkan internalisasi manajemen risiko individu sebagai bagian dari penilaian perilaku kerja pegawai.	Sosialisasi pada saat Dialog Kinerja, Monitoring kepatuhan, asistensi teknis integrasi ke SKP	2026	T		
		Keterbatasan kompetensi dan literasi pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko secara komprehensif.	Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait manajemen risiko	Refreshment training, coaching dan mentoring risiko unit kerja	2026	T		
		Perumusan narasi kejadian risiko (risk event) belum sepenuhnya selaras dengan perspektif strategis dan tujuan organisasi.	Melakukan penyeragaman penulisan kejadian risiko yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis instansi.	Reviu redaksi risk event	2026	T		
		Kurangnya akurasi dalam identifikasi akar masalah yang menyebabkan penumpukan multitafsir penyebab dalam satu kejadian risiko.	Menentukan satu akar masalah penyebab risiko yang paling berpengaruh	Penyesuaian risk register	2026	T		

Tingkat maturitas manajemen risiko di Balai Besar POM di Gorontalo saat ini masih berada pada kategori *Risk Naive*. Kondisi ini secara dominan dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi pegawai dalam menginternalisasi prinsip-prinsip pengelolaan risiko. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran (awareness) dan kepatuhan operasional, serta belum terciptanya integrasi yang harmonis antara manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi. Keterbatasan pemahaman ini berimplikasi pada ketidakmampuan pegawai

dalam merumuskan pernyataan risiko yang sesuai standar dan kesulitan dalam memetakan penyebab risiko secara spesifik.

Fokus utama tindak lanjut dalam meningkatkan indeks maturitas ini diarahkan pada penguatan kapasitas pegawai secara komprehensif. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi antara pengelolaan risiko dengan target kinerja tahunan, sehingga manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan ini belum diidentifikasi menjadi risiko

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

   Berdasarkan uraian tersebut di atas beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Gorontalo pada masa yang akan datang adalah:

   a) Peran pimpinan dan unit pengelola risiko dalam memastikan konsistensi implementasi turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks.
   b) Penguatan budaya sadar risiko dengan cara peningkatan kapasitas pegawai sebagai pengelola risiko. Fokus utama dari tindak lanjut ini adalah memastikan setiap pegawai mampu menyelaraskan mitigasi risiko dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga dapat mentransformasi budaya organisasi menuju tahap yang lebih adaptif, akuntabel, dan mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas.
   c) Pemanfaatan hasil register risiko dalam pengambilan keputusan strategis menjadi area yang perlu terus didorong pada periode berikutnya.
   d) Pengembangan inovasi dalam rangka pemetaan risiko strategis dan operasional

Pada akhirnya, manajemen risiko tidak lagi dianggap sebagai beban administrasi yang sulit, melainkan menjadi alat bantu yang memudahkan kita semua untuk mencapai target kantor dengan lebih lancar dan aman.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW sebelumnya	Status	Progress TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Obat : Berdasarkan tarikan data SIPT, terdapat 50 sampel tidak memenuhi timeline (20 Hari Kerja) dikarenakan kendala pengadaan reagen dan kerusakan alat di Balai Penguji serta durasi pengujian menggunakan metode analisis yang panjang sehingga 8 sampel belum selesai uji (2 sampel di Sofifi, 1 sampel vaksin di Balai Penguji Produk Biologi, 1 sampel di Palu, 4 sampel di Gorontalo) 2. OBA : 1) Tidak dapat memenuhi target fitofarmaka 2) Berdasarkan tarikan data SIPT, terdapat 93 sampel tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dengan rincian 69 sampel terkendala ketersediaan gas untuk pengujian logam, 4 sampel dilakukan uji lanjutan TMS (Deksametason dan Ibuprofen), sebanyak 20 sampel belum selesai diuji karena antrian pengujian alat AAS (PK logam As) dan antrian pengujian alat GC (PK Metanol) 3. SK : 1) Produk kategori lain untuk uji dna porcine, sudah pernah disampling di tahun lalu. serta jumlah sampel tidak memadai 2) Berdasarkan tarikan data SIPT, terdapat 26 sampel SK dan 6 sampel Kuasi yang tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dikarenakan	1. Obat : Melakukan follow up terhadap balai penguji untuk mempercepat pelaporan dan mendokumentasikan kendala penyelesaian pengujiannya 2. OBA : 1) Diajukan penggantian kategori 2) Mendatangkan teknisi untuk perbaikan, mengatur jadwal antrian alat, dan melakukan pengujian di balai terdekat yang bersedia meminjamkan alat (Manado, Makassar) 3. SK : 1) Tidak melakukan pengiriman uji dna porcine 2) Menyelesaikan pengujian sampel sesuai dengan prosedur 4. Kos : 1) Tidak mengirim sampel mainan kosmetik 2) Mendatangkan teknisi untuk perbaikan AAS dan GCFID agar dapat dilanjutkan penyelesaian pengujian sampel sesuai dengan prosedur	Melakukan perhitungan timeline ulang pengujian produk TMS, melakukan percepatan regionalisasi untuk obat	Selesai			Ya	Lab.01	Pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, dan PIRT melebihi timeline 15 hari kerja

		pengujian kembali parameter vitamin yang diduga TMS. Total sampel hingga Agustus adalah 38 sampel (31 sampel SK dan 7 sampel Kuasi) 4. Kos : 1) Di PS upt belum terhitung sebagai balai besar sehingga tidak mendapatkan alokasi sampling mainan kosmetik 2) Berdasarkan tarikan data SIPT, terdapat 148 sampel tidak memenuhi timeline (15 Hari Kerja) dikarenakan antrian penggunaan AAS (hanya 1 AAS yang berfungsi dan digunakan oleh 3 laboratorium Kimia), kendala ketersediaan gas untuk pengujian alat GC, dan pengujian kembali (reanalisis) sampel yang diduga TMS. Selain itu, terdapat 53 sampel yang belum selesai uji karena kerusakan alat AAS dan kendala penyediaan gas oleh vendor tunggal sehingga sudah pasti akan melewati timeline								
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Fasilitas kesehatan yang sudah di KIE belum melaporkan karena kesibukan petugas pelayanan	Melakukan pendampingan kepada petugas di tiga rumah sakit untuk melaporkan laporan KTD/ESO	1. Memberikan reward atau apresiasi bagi fasilitas kesehatan yang paling rajin melaporkan farmakovigilans 2. Memberi surat peringatan kepada fasilitas kesehatan yang belum melaporkan sampai pada waktu yang ditentukan	Selesai			Ya	PEM. 03	Sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan KTD/ESO di dalam sistem e-meso
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat 188 sampel yang selesai diuji (total sampel sampai TW3 adalah 223) namun ada 2 sampel TW2 yang tadinya TMS (Sulfit) menjadi MS karena setelah ditindaklanjuti oleh PPPOMN dan Ditwasdar terdapat perbedaan metode destilasi yang tercantum pada MA PPPOMN dan SNI sehingga disarankan untuk uji ulang menggunakan metode destilasi	1. Mendatangkan teknisi untuk perbaikan alat ICPMS agar dapat menyelesaikan pengujian 2. Berkonsultasi dengan Pusdatin untuk pelaporan sampel TMS kemasan rusak	Berkonsultasi dengan Pusdatin untuk pelaporan sampel TMS kemasan rusak	Selesai			Ya	Lab.01	Pengujian sampel sediaan farmasi, pangan olahan, dan PIRT melebihi timeline 15 hari kerja

		pada SNI. Sejumlah 35 sampel masih dalam proses pengujian dan berpotensi untuk melewati timeline dikarenakan kendala alat ICPMS untuk pengujian logam perlu dikalibrasi kembali (intensitasnya rendah). 2. Terdapat 1 sampel TMS kemasan rusak yang masih ada di akun TPS karena terkendala pelaporan SIPT untuk sampel TMS kemasan rusak								
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	laporan epidemiologi dari dinas kesehatan dan puskesmas kurang lengkap dan penentuan agen penyebabnya tidak tepat	Menghubungi kembali PIC KLB dari dinas kesehatan atau puskesmas untuk melengkapi laporan epidemiologi, dan apabila belum lengkap, sampel disimpan dulu dan tidak dilakukan pengujian	Sampel tetap diterima namun sampel tidak langsung diuji, menunggu laporan epidemiologi dan surat penetapan KLB	Selesai			Tidak		
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat 4 sampel kesalahan penetapan kesimpulan akhir karena memperhitungkan hasil penilaian penandaan 2. Terdapat 1 sampel PIRT Januari yang baru diterbitkan evaluasi dari kedeputian dan perlu dilakukan pengujian ulang untuk parameter As dan Cd (ketidaksesuaian syarat keberterimaan untuk PIRT), dan Salmonella (sebelumnya uji Staphylococcus, seharusnya Salmonella untuk PIRT) 3. Berdasarkan data SIPT, sejumlah 16 sampel memenuhi timeline (sebelum tanggal 15 bulan berikutnya) dan 9 sampel tidak memenuhi timeline (karena kerusakan alat HPLC, uji ulang sampel TMS, dan kendala penyediaan gas dari vendor tunggal)	1. Telah bersurat ke kedeputian dan pusdatin untuk rollback sampel di SIPT sehingga dapat dilakukan perbaikan kesimpulan akhir oleh UPT 2. Telah dilakukan pengujian kembali sesuai hasil evaluasi dari kedeputian dan berkoordinasi dengan kedeputian terkait hasil evaluasi. Telah diterima hasil evaluasi pengujian TW2 dari Ditwasdar yang menyatakan seluruh pengujian PIRT telah sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 3. Telah dilakukan penyelesaian sampel dan pelaporan SIPT untuk seluruh sampel PIRT	Perubahan target di tahun 2026	Selesai			Ya	PEM. 15	Jumlah Sampel Makanan Acak yang Tidak Memenuhi Ketentuan penandaan tinggi
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil	Tindak lanjut yang dikirimkan melalui pelaku usaha dikirimkan lewat WA sering tidak dibalas sesuai timeline yang diberikan	Dilakukan tindak lanjut ditempat	1. Dilakukan pembuatan capa di tempat untuk sara distribusi	Selesai			Ya	PEM. 06	Pelaku usaha tidak menindaklanj uti rekomendasi

	pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder			pangan, OT, dan kosmetik 2. Melaksanakan desk sarana produksi dan distribusi obat						hasil pemeriksaan petugas BPOM
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	sampai dengan bulan September terdapat 4 sarana yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu	Memonitoring tindak lanjut yang dibuat oleh petugas agar tidak terjadi keterlambatan pembuatan surat TL		Selesai			Tidak		
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	Tidak ada kendala, target sudah tercapai	Tetap dilakukan pengawasan		Selesai			Tidak		

	sesuai ketentuan									
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala, target sudah tercapai	Rencana Bimtek Bulan November, Advokasi dilaksanakan bulan Oktober		Selesai			Tidak		
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	Nilai sementara kota Gorontalo 69.84	Melakukan pendampingan pada penilaian akhir		Selesai			Tidak		
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		

17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai Renlak. Tahap akhir yaitu pengawalan program SAPA Sekolah akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025	Pelaksanaan pengawalan program SAPA Sekolah Pada Bulan Desember 2025	Disesuaikan apabila terdapat perubahan target sebelum efisiensi	Selesai			Tidak		
18	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala, target sudah tercapai		Disesuaikan apabila terdapat perubahan target sebelum efisiensi	Selesai			Tidak		
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak ada kendala, target sudah tercapai			Selesai			Tidak		
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	1. Satu perkara carry over tersangka melarikan diri dan telah dimasukan dalam Daftar pencarian orang 2. Semua berkas masih dalam tahap I dan dimasukkan pada tanggal, 1 perkara tanggal 22 Agustus, 2 perkara tanggal 8 dan 9 september, tapi dari pihak kejaksaan belum diterbitkan P21	Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan terkait penyelesaian berkas perkara	1. Dilaksanakan koordinasi dengan aspidum dan kejaksaan tinggi, apabila diperlukan dilakukan ekspose dengan jaksa 2. Monitoring terhadap anggaran dan diagendakan fgd dengan criminal justice system, asosiasi apoteker, direktorat narkoba	Selesai			Ya	DAK. 01	Perkara yang ditangani penyidik tidak sampai tahap 2 atau proses sampai tahap 2 memerlukan waktu yang lama
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan	Tidak ada kendala, target sudah tercapai	Laporan dilakukan secara manual dan penginputan di ADP		Selesai			Tidak		

	Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar									
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Realisasi Akhir Tahun			Selesai			Tidak		
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Realisasi Akhir Tahun			Selesai			Tidak		
25	Nilai AKIP UPT BPOM	Realisasi Akhir Tahun			Selesai			Tidak		
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Realisasi Akhir Tahun			Selesai			Tidak		
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Realisasi Akhir Tahun			Selesai			Tidak		

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja merupakan sumber informasi yang dapat menjadi sumber pembelajaran organisasi. Setiap data capaian, deviasi target, serta faktor pendukung dan penghambat dianalisis untuk memahami apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang masih perlu diperbaiki. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam proses refleksi manajemen, baik pada forum tinjauan manajemen, rapat pimpinan, maupun evaluasi internal unit kerja.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pemanfaatan Laporan kinerja
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome. Seluruh target sampel dapat tercapai dan dapat dilakukan sampling pengujian secara tepat waktu 2. Mengidentifikasi risiko ketepatan waktu pengujian dan pelaporan hasil uji. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian target pelaporan KTD/ESO. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome. Seluruh target sampel dapat tercapai dan dapat dilakukan sampling pengujian secara tepat waktu 2. Mengidentifikasi risiko ketepatan waktu pengujian dan pelaporan hasil uji. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.

		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM dalam penanganan dan pengujian sampel KLB Keracunan pangan sesuai standar. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome. Seluruh target sampel dapat tercapai dan dapat dilakukan sampling pengujian secara tepat waktu 2. Mengidentifikasi risiko ketepatan waktu pengujian dan pelaporan hasil uji. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi agar keputusan/rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai

		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan

			kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator untuk memastikan target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada setiap triwulan dapat tercapai 2. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Sebagai informasi dalam rangka perencanaan pengembangan SDM untuk memenuhi standar kemampuan laboratorium. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	Mengidentifikasi risiko ketidaktercapaian pemenuhan target Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.

2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome untuk memastikan target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dapat tercapai
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome untuk memastikan target Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dapat tercapai
		Jumlah desa pangan aman	Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome untuk memastikan target Jumlah desa pangan aman dapat tercapai
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome untuk memastikan target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dapat tercapai
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome untuk memastikan target UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dapat tercapai
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi. Data hasil penyidikan dimanfaatkan untuk merancang kegiatan berupa edukasi keamanan obat dan makanan ke masyarakat

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi. Data hasil penyidikan dimanfaatkan untuk merancang kegiatan berupa edukasi keamanan obat dan makanan ke masyarakat
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Informasi kinerja disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan kepercayaan publik agar indeks pelayanan publik dapat tercapai
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Informasi kinerja disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan kepercayaan publik agar nilai pembangunan ZI tercapai 2. Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan zona integritas dan pengembangan inovasi terkait integritas dan pelayanan publik
		Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi ke depan
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi ke depan
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya

Selanjutnya, pemanfaatan Informasi Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo dapat dilihat dari hal - hal sebagai berikut:

1. Hasil analisis capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai capaian setiap indikator. Indikator apa saja yang sudah optimal dan yang masih memerlukan intervensi kebijakan. Misalnya, indikator yang konsisten melampaui target menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan sudah tepat

dan dapat dipertahankan atau direplikasi pada program lain. Sebaliknya, indikator yang belum mencapai petunjuk perlunya penyesuaian pendekatan, baik melalui perbaikan perencanaan kegiatan, penguatan sumber daya, maupun penajaman prioritas program.

2. Data realisasi anggaran dan efisiensi kegiatan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan belanja lebih berdampak pada outcome.
3. Integrasi manajemen risiko dalam perencanaan Temuan risiko kinerja sebagai dasar penetapan mitigasi dan pengendalian risiko dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.
4. Sebagai informasi dalam rangka pengembangan SDM. Informasi kinerja individu dan unit kerja dimanfaatkan untuk penyusunan strategi peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja pegawai.
5. Laporan kinerja menjadi salah satu referensi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, prioritas strategis, dan target organisasi ke depan.
6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi Informasi kinerja disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penguatan kepercayaan publik.

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2025 per jenis belanja

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	672859 | BALAI BESAR POM DI GORONTALO	PAGU REALISASI	4,050,806,000 3,975,136,664 (98.13%)	9,558,769,000 6,280,831,643 (65.71%)	1,215,348,000 803,324,320 (66.10%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,824,923,000 11,059,292,627 (74.60%)
		SISA	75,669,336	3,277,937,357	412,023,680	0	0	0	0	0	0	3,765,630,373
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**4,050,806,000 3,975,136,664 (98.13%)**	**9,558,769,000 6,280,831,643 (65.71%)**	**1,215,348,000 803,324,320 (66.10%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**14,824,923,000 11,059,292,627 (74.60%)**
		SISA	**75,669,336**	**3,277,937,357**	**412,023,680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,765,630,373**

Gambar 3.1 Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

Berdasarkan data tarikan OMSPAN, total pagu awal Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp14.824.923.000 masih termasuk pagu blokir (anggaran yang tidak dapat digunakan). Di dalamnya terdapat blokir sebesar Rp3.275.447.000 pada belanja barang, dan Rp404.000.000 pada belanja modal. Apabila persentase realisasi dihitung menggunakan total pagu awal (termasuk blokir), maka realisasi sebesar Rp11.059.292.627 menghasilkan capaian 74,60%.

Namun dalam penilaian kinerja anggaran, pagu yang menjadi dasar perhitungan adalah pagu efektif (tidak termasuk blokir). Setelah dikurangi pagu blokir, total pagu efektif Balai Besar POM di Gorontalo menjadi Rp11.145.476.000. Dari pagu efektif tersebut, realisasi mencapai Rp11.060.157.690 atau 99,23%.

Dengan demikian, perbedaan persentase (74,60% dan 99,23%) terjadi karena perbedaan dasar perhitungan, yaitu:

a) 74,60% dihitung dari total pagu termasuk blokir.
b) 99,23% dihitung dari pagu efektif yang benar-benar dapat digunakan.

Secara substansi, capaian 99,23% menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang dapat dimanfaatkan telah terealisasi secara optimal.

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

dari DIPA awal senilai Rp14.526.300.000,00 dengan nomor DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebanyak dua puluh kali revisi. Adapun rincian revisi DIPA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sampai dengan periode 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Revisi pertama pada tanggal 18 Februari 2025 berupa pemblokiran mandiri DIPA Tahun Anggaran 2025 dalam rangka perubahan Usulan Revisi Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat permintaan revisi pemblokiran mandiri dengan nomor surat B-PR.05.03.2.02.25.101 pada tanggal 14 Februari 2025. Revisi dalam hal pemblokiran mandiri sebesar Rp6.369.357.000,-
2. Revisi kedua pada tanggal 4 Maret 2025 Revisi dalam hal Pagu Tetap dan Administrasi untuk penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya.
3. Revisi ketiga pada tanggal 12 Maret 2025 yaitu Revisi dalam hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025. Dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp102.000.000,-
4. Revisi keempat pada tanggal 25 Maret 2025 Revisi dalam Usulan Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Penambahan anggaran untuk belanja barang dalam hal honor PPNPN sehingga mengubah nilai pagu menjadi Rp14.628.300.000,-
5. Revisi kelima pada tanggal 22 April 2025 Revisi halaman III DIPA yang tidak mengubah nilai pagu.
6. Revisi keenam pada tanggal 7 Mei 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
7. Revisi keenam pada tanggal 16 Juni 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.

8. Revisi kedelapan pada tanggal 24 Juni 2025 yaitu revisi pagu tetap dan revisi administrasi, pergeseran PNBP dan pemutakhiran POK yang tidak mengubah nilai pagu.
9. Revisi kesembilan pada tanggal 1 Juni 2025 yaitu revisi dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, karena adanya penambahan CPNS dan PPPK. Penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp196.623.000,- sehingga pagu anggaran secara keseluruhan bertambah menjadi Rp14.824.923.000,-
10. Revisi kesepuluh pada tanggal 22 Juli 2025 yaitu revisi pemutakhiran data pagu yang tidak mengubah nilai pagu.
11. Revisi kesebelas pada tanggal 27 Agustus 2025 yaitu revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
12. Revisi keduabelas pada tanggal 22 September 2025 yaitu revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.
13. Revisi ketigabelas pada tanggal 6 Oktober 2025 yaitu revisi halaman III DIPA yang tidak mengubah nilai pagu.
14. Revisi keempatbelas pada tanggal 21 Oktober 2025 yaitu revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai pagu.
15. Revisi kelima belas pada tanggal 31 Oktober 2025 yaitu revisi DJA pemindahan belanja pegawai ke belanja operasional. Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan terkait Tindak Lanjut Hasil Monev Belanja Pegawai TW III TA 2025 dengan nomor KU.02.03.21.10.25.339 pada tanggal 15 Oktober 2025.
16. Revisi keenambelas pada tanggal 11 November 2025 yaitu revisi DJA Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran (Blokir). Revisi ini dilakukan Sebagai tindak lanjut Nota Dinas Sekretariat Utama terkait Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dengan nomor PR.05.03.2.10.25.634 pada tanggal 23 Oktober 2025.
17. Revisi ketujuhbelas pada tanggal 20 November 2025 revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.
18. Revisi kedelapanbelas pada tanggal 3 Desember 2025 revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.

19. Revisi kesembilan belas pada tanggal 5 Desember 2025 revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.
20. Revisi keduapuluh pada tanggal 12 Desember 2025 revisi pagu tetap dan revisi administrasi yang tidak mengubah nilai pagu.

b. Realisasi Per Anggaran

Tabel 3.4 Realisasi Per Anggaran

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)
1	DR-3165-AEA-Koordinasi	14	14	64,29%	Rp4.526.000,00	Rp4.504.000,00	99,51%
2	DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	203	203	74,38%	Rp62.387.000,00	Rp62.359.000,00	99,96%
3	DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	474	474	81,86%	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100%
4	DR-3165-BKB-Pemantauan produk	1	1	0,00%	Rp41.360.000,00	Rp41.330.300,00	99,93%
5	DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	20	20	60,00%	Rp10.000.000,00	Rp9.999.994,00	100%
5	DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	25	5	31,00%	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
6	DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	0	36,00%	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
7	DR-3165-CBV-Prasarana Bidang Kesehatan	2	0	15,00%	Rp0,00	Rp0,00	0,00%

8	DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	1	1	22,00%	Rp1.791.719.000,00	Rp1.791.594.587,00	99,99%
9	DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	4	4	30,30%	Rp475.256.000,00	Rp204.943.112,00	43,12%
10	DR-3165-QDB-001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	0	75,00%	Rp423.549.000,00	Rp41.244.100,00	9,74%
11	DR-3165-QDB-002-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	0	55,00%	Rp446.279.000,00	Rp33.989.810,00	7,62%
12	DR-3165-QDB-003-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	1	70,00%	Rp521.778.000,00	Rp10.141.000,00	1,94%
13	DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45	45	26,00%	Rp6.184.000,00	Rp6.184.000,00	100%
14	DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9	9	0,00%	Rp5.411.000,00	Rp5.410.000,00	100%
15	DR-3165-QIA-001-Pengawasan dan Pengendalian Produk	308	308	41,00%	Rp247.825.000,00	Rp247.669.747,00	99,94%
16	DR-3165-QIA-002-Pengawasan dan Pengendalian Produk	711	711	72,29%	Rp402.837.000,00	Rp402.655.698,00	99,95%
17	DR-3165-QIC-001-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	26	26	46,15%	Rp44.927.000,00	Rp44.903.065,00	99 95%
18	DR-3165-QIC-004 Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	502	511	69,72%	Rp525.782.000,00	Rp525.398.094,00	99,93%
19	DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	1	1	0,00%	Rp811.348.000,00	Rp803.324.320,00	99,01%
21	WA-6384-EBA-956-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	0,00%	Rp8.000.000,00	Rp7.804.000,00	97,55%
22	WA-6384-EBA-994- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	0,00%	Rp6.560.437.000,00	Rp6.484.531.211,00	98,84%
TOTAL					Rp11.145.476.000,00	Rp11.060.157.690,00	99,23%

c. Evaluasi dan Analisis Anggaran berisi perbandingan rencana dan realisasi anggaran per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisa tingkat pencapaiannya

Tabel 3.5 Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75	88.37	103.06%	Rp357,810,750	Rp355,055,607	99.23%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26.67	102.58%	Rp38,650,000	Rp38,352,395	99.23%
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	95.4	109.66%	Rp71,997,500	Rp71,443,119	99.23%
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100.00%	Rp27,081,250	Rp26,872,724	99.23%
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92.4	115.50%	Rp37,913,750	Rp37,621,814	99.23%
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01	93.18	100.18%	Rp22,463,500	Rp22,290,531	99.23%
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11%	Rp22,463,500	Rp22,290,531	99.23%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93,94	103.23%	Rp79,593,800	Rp78,980,928	99.23%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106.38%	Rp200,311,000	Rp198,768,605	99.23%

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,67	108.52%	Rp50,756,350	Rp50,365,526	99.23%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.1	89.41	100.35%	Rp20,713,930	Rp20,554,433	99.23%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	94.1	110.71%	Rp46,054,750	Rp45,700,128	99.23%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.28	104.28%	Rp50,573,320	Rp50,183,905	99.23%
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1	69.7	107.07%	Rp1,756,170,000	Rp1,742,647,491	99.23%
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16.67	16.67	100.00%	Rp10,832,500	Rp10,749,090	99.23%
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82	92.39	102.86%	Rp238,594,000	Rp236,756,826	99.23%
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	100.00%	Rp423,549,000	Rp420,287,673	99.23%
18	Jumlah desa pangan aman	3	3	100.00%	Rp446,279,000	Rp442,842,652	99.23%
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00%	Rp521,778,000	Rp517,760,309	99.23%
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.07	16,07	100.00%	Rp33,819,000	Rp33,558,594	99.23%
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96.25	113.24%	Rp334,891,000	Rp332,312,339	99.23%

22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	99	110.00%	Rp181,595,000	Rp180,196,719	99.23%
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	5,00	106.38%	Rp62,387,000	Rp61,906,620	99.23%
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	92,00	100.03%	Rp132,525,100	Rp131,504,657	99.23%
25	Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	76,44	95.43%	Rp60,500,000	Rp60,034,150	99.23%
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100.00%	Rp5,828,118,000	Rp5,783,241,491	99.23%
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00	2,93	97.67%	Rp88,055,000	Rp87,376,977	99.23%

Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2025 sudah maksimal dalam pelaksanaannya, Berdasarkan data tarikan OMSPAN, total pagu awal Balai Besar POM di Gorontalo tahun 2025 sebesar Rp14.824.923.000 masih termasuk pagu blokir (anggaran yang tidak dapat digunakan). Di dalamnya terdapat blokir sebesar Rp3.275.447.000 pada belanja barang, dan Rp404.000.000 pada belanja modal. Apabila persentase realisasi dihitung menggunakan total pagu awal (termasuk blokir), maka realisasi sebesar Rp11.059.292.627 menghasilkan capaian 74,60%.

Namun dalam penilaian kinerja anggaran, pagu yang menjadi dasar perhitungan adalah pagu efektif (tidak termasuk blokir). Setelah dikurangi pagu blokir, total pagu efektif Balai Besar POM di Gorontalo menjadi Rp11.145.476.000. Dari pagu efektif tersebut, realisasi mencapai Rp11.060.157.690 atau 99,23%.

d. Efisiensi Anggaran Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran Indikator.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Gambar 3.2 Tingkat Efisiensi

Tabel 3.5 Efisiensi Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	88,37	103,06%	Rp357.810.750,00	Rp266.891.038	74,59%	1,38162	0,38	95 %	Efiensi
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	26,67	102,58%	Rp38.650.000,00	Rp28.829.035	74,59%	1,37521	0,38	95 %	Efiensi
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	95,4	109,66%	Rp171.997.500,00	Rp128.292.935	74,59%	1,47011	0,47	92 %	Efiensi
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00%	Rp27.081.250,00	Rp20.199.904	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	92,4	115,50%	Rp37.913.750,00	Rp28.279.866	74,59%	1,54846	0,55	92 %	Efiensi

6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,18	100,18%	Rp22.463.500,00	Rp16.755.525	74,59%	1,34311	0,34	95 %	Efiensi
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11%	Rp22.463.500,00	Rp16.755.525	74,59%	1,48962	0,49	92 %	Efiensi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93,94	103,23%	Rp93.175.600,00	Rp69.499.680	74,59%	1,38398	0,38	95 %	Efiensi
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100,00	106,38%	Rp290.451.000,00	Rp216.647.401	74,59%	1,42624	0,43	92 %	Efiensi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	97,67	108,52%	Rp55.796.100,00	Rp41.618.311	74,59%	1,45492	0,45	92 %	Efiensi
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	89,1	89,41	100,35%	Rp24.162.240,00	Rp18.022.615	74,59%	1,34533	0,35	95 %	Efiensi

	diawasi sesuai ketentuan										
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	94,1	110,71%	Rp46.054.750,00	Rp34.352.238	74,59%	1,48419	0,48	92 %	Efiensi
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104,28	104,28%	Rp61.168.560,00	Rp45.625.629	74,59%	1,39804	0,40	95 %	Efiensi
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	69,7	107,07%	Rp2.603.067.000,00	Rp1.941.627.675	74,59%	1,43539	0,44	92 %	Efiensi
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00%	Rp10.832.500,00	Rp8.079.962	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	92,39	102,86%	Rp238.594.000,00	Rp177.967.265	74,59%	1,37902	0,38	95 %	Efiensi

17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	7	100,00%	Rp423.549.000,00	Rp315.925.199	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
18	Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00%	Rp446.279.000,00	Rp332.879.506	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00%	Rp521.778.000,00	Rp389.194.210	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,07	16,07	100,00%	Rp33.819.000,00	Rp25.225.592	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96,25	113,24%	Rp419.156.000,00	Rp312.648.460	74,59%	1,51810	0,52	92 %	Efiensi
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	99	110,00%	Rp172.138.000,00	Rp128.397.734	74,59%	1,47473	0,47	92 %	Efiensi

23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	5,00	106,38%	Rp62.387.000,00	Rp46.534.463	74,59%	1,42624	0,43	92 %	Efiensi
24	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	92,00	100,03%	Rp684.500.000,00	Rp510.568.550	74,59%	1,34110	0,34	95 %	Efiensi
25	Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	76,44	95,43%	Rp360.500.000,00	Rp268.896.950	74,59%	1,27940	0,28	95 %	Efiensi
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00%	Rp7.511.080.000,00	Rp5.602.514.572	74,59%	1,34066	0,34	95 %	Efiensi
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00	2,93	97,67%	Rp88.055.000,00	Rp65.680.225	74,59%	1,30938	0,31	95 %	Efiensi

Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pemanfaatan anggaran. Efisiensi tersebut tercermin dari capaian output dan outcome yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional, tanpa adanya pemborosan anggaran. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengujian, penindakan, serta fasilitasi dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, penetapan prioritas sasaran, integrasi lintas program, dan pemanfaatan data yang telah tersedia. Dengan strategi tersebut, target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui rencana, sementara realisasi anggaran tetap terkendali dan selaras dengan perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap IKU mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan input yang terukur, sehingga secara keseluruhan kinerja organisasi pada Tahun 2025 mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
   a. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 103,06% (berhasil);
   b. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO Capaian 102,58% (berhasil);
   c. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 109,66% (berhasil);
   d. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Capaian 100% (berhasil);
   e. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 115,50% (berhasil);
   f. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Capaian 100,18% (berhasil);
   g. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 111,11% (berhasil);
   h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 103,23% (berhasil);
   i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 106,38% (berhasil);
   j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Capaian 108,52% (berhasil);
   k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Capaian 100,35% (berhasil);
   l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Capaian 110,71% (berhasil);

m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Capaian 100% (berhasil)

2) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian 102,86% (berhasil);
   b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Capaian 100% (berhasil);
   c. Jumlah desa pangan aman Capaian 100% (berhasil);
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Capaian 100% (berhasil)
3) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan Capaian 100% (berhasil)
4) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Capaian 113,24% (berhasil)
5) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar Capaian 110% (berhasil)
6) Layanan Publik UPT yang Prima: Indeks Pelayanan Publik UPT Capaian 106,38% (berhasil)
7) Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal
   a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Capaian 100,03% (berhasil);
   b. Nilai AKIP UPT BPOM Capaian 95,43% (berhasil);
   c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Capaian 100% (berhasil);
   d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Capaian 97,67% (berhasil)

Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh 7 Sasaran Strategis yang diturunkan ke dalam 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum telah berhasil dicapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari mayoritas indikator yang mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada sasaran peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan

pangan olahan, efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pendampingan UMKM, penindakan kejahatan, pemantauan siber, kualitas layanan publik, serta penguatan tata kelola organisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, terarah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap perlindungan masyarakat.

Namun demikian, dalam rangka menjaga objektivitas dan prinsip akuntabilitas kinerja, terdapat dua indikator pada Sasaran Strategis tata kelola, yaitu Nilai AKIP UPT BPOM dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, yang belum mencapai 100% jika dibandingkan antara target dan realisasi. Kondisi ini tidak mengurangi keberhasilan kinerja secara keseluruhan, namun menjadi catatan evaluatif yang konstruktif untuk peningkatan kualitas manajemen internal organisasi. Ketidaktercapaian tersebut mengindikasikan masih perlunya penguatan pada aspek konsistensi penerapan siklus SAKIP, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pendalaman integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Sebagai tindak lanjut rencana perbaikan (action plan) atas capaian IKU AKIP dan Indeks Manajemen Risiko akan menjadi prioritas pada tahun berikutnya, dengan penekanan pada penguatan peran pimpinan, peningkatan pemahaman dan keterlibatan seluruh pegawai, serta pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi perbaikan yang telah ditetapkan. Pimpinan Balai Besar POM di Gorontalo bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara konsisten terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sehingga diharapkan pada periode selanjutnya seluruh indikator tidak hanya berhasil, tetapi juga mencapai tingkat kematangan tata kelola yang lebih optimal dan berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut atas capaian Nilai AKIP dan Indeks Manajemen Risiko yang belum mencapai 100%, Hal yang perlu direkomendasikan untuk memperkuat penerapan tata kelola kinerja dan manajemen risiko secara lebih konsisten dan terintegrasi. Penguatan tersebut perlu difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, keterkaitan rencana aksi dengan capaian indikator, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi internal agar Sistem AKIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi alat pengendalian kinerja yang efektif. Selain itu, integrasi manajemen risiko perlu ditingkatkan hingga pada level kegiatan

dengan memastikan bahwa setiap risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis, dan ditetapkan langkah mitigasinya secara jelas serta dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pimpinan Balai Besar POM di Gorontalo bersama seluruh pegawai diharapkan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana perbaikan tersebut, sehingga pada tahun berikutnya kedua indikator dimaksud dapat meningkat dan mencapai target secara optimal sejalan dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan

LAMPIRAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOTA DINAS

Nomor : PR.09.01.23A.02.26.39

Yth	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025
Dari	:	Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
Hal	:	Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2025 dan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025
Tanggal	:	9 Februari 2026

Sehubungan dengan tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir bersama dalam Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Tahun 2025 dan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 pada:

Hari / Tanggal : Senin/ 9 Februari 2026
Pukul : 13.30 WITA s/d Selesai
Tempat : Ruangan Rapat Pimpinan

Demikian Nota Dinas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lintang Purba Jaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: STEPANUS SIMON SESA
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
STEPANUS SIMON SESA	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Percentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Percentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.1
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67 Percentase
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.07 Persentase
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,824,923,000 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,519,135,000

Gorontalo, 29 August 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo

STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax : (0435) 822052
Email : bpom_gorontalo@pom.go.id ; ulpk_gorontalo@yahoo.co.id ; website : www.gorontalo.pom.go.id

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO,

${ttd}

STEPANUS SIMON SESA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI GORONTALO TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,40
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,7

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI GORONTALO,

STEPANUS SIMON SESA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	357,810,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN	180,105,000	135,078,750
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN	222,732,000	222,732,000

		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA PETUGAS SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RS/PKM/KLINIK)	38,650,000	38,650,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	171,997,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	139,500,000	139,500,000
14.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	32,497,500

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27,081,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	27,081,250

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	37,913,750

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	37,913,750

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	22,463,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI	44,927,000	22,463,500

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	22,463,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI	44,927,000	22,463,500

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	93,175,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	1,660,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	12,645,600
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	11,594,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	8,228,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	57,512,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	1,535,600

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	290,451,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	28,986,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	4,150,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	3,839,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	20,570,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	201,292,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	31,614,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	55,796,100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	1,919,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	14,493,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	12,645,600
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	14,378,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	10,285,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	24,162,240

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	2,075,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	383,900
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	1,028,500
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	2,898,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	5,058,240
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	415,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	14,378,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	46,054,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	1,028,500
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika,	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM,	180,105,000	45,026,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	suplemen kesehatan	KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN		

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	61,168,560

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65	65	65	65.1	2,603,067,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - KIE Pengendalian resistensi Antimikroba Kepada Masyarakat	20,629,000	20,629,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Pemilik/Penanggung Jawab Apotek	18,275,000	18,275,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	1,264,560
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Pelatihan dan Sertifikasi QRMA	21,000,000	21,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	K - PELATIHAN PENUGASAN PENGUJIAN SPESIFIK DALAM SISTEM REGIONALISASI LABORATORIUM BPOM	10,620,000	10,620,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - KALIBRASI EKSTERNAL	35,000,000	35,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	39,680,000	39,680,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	J - PELATIHAN VALIDASI PENGUJIAN CEPAT MIKROBIOLOGI SAMPEL KLB	9,260,000	9,260,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL (Kimia Obat, Kimia Nappza, Kimia OT-SK, Kimia Kosmetik, Kimia Pangan, Mikrobiologi)	88,980,000	88,980,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - DUKUNGAN LABORATORIUM	230,932,000	230,932,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - UJI PROFISIENSI DENGAN KAS / INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	3,000,000	3,000,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI/BALAI BESAR POM KIMIA OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	12,610,000	12,610,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - FOOD SECURITY DAN PENANGANAN KLB	52,820,000	52,820,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT LABORATORIUM	358,760,000	358,760,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR / BALAI / LOKA	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - IURAN KAN	1,500,000	1,500,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H - PELATIHAN TEKNIS JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES DAN GMO	12,610,000	12,610,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	L - BIMBINGAN TEKNIS PERKUATAN PENEGAKAN KASUS MELALUI PENGUJIAN KOSMETIK	12,610,000	12,610,000
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	40,000,000	40,000,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	J - PENGADAAN REAGEN PREKURSOR DAN B2	50,000,000	50,000,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	G - BIMBINGAN TEKNIS LRPPI BAHAN KONTAK PANGAN OLAHAN	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	I - PENGADAAN REAGEN / MEDIA MIKRO UNTUK PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	120,000,000	120,000,000
19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	K - PENGADAAN SUKU CADANG	259,437,000	259,437,000
20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR / BALAI POM KIMIA PANGAN OLAHAN DAN AIR	12,610,000	12,610,000
21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - BIMBINGAN TEKNIS LRPPI CEMARAN LOGAM DAN MIKOTOKSIN PANGAN OLAHAN	12,610,000	12,610,000
22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	L - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	50,000,000	50,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	12,610,000	12,610,000
24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	M - PENGADAAN KIT PENGUJIAN	200,000,000	200,000,000
25.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Gorontalo	811,348,000	811,348,000
26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - SURVEILANCE SNI/IEC ISO 17025	88,290,000	88,290,000
27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJI DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM	39,950,000	39,950,000
28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN PENGUJIAN KIMIA KOSMETIK, OBAT	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		TRADISIONAL, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN		

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												16.67	10,832,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	10,832,500

2.	05 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, SOSIALISASI, DI MEDIA, LAYANAN INTERNET PUBLIK	59,552,000	59,552,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - WORKSHOP KERJASAMA DALAM NEGERI	5,700,000	5,700,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke	C - WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2025	13,960,000	13,960,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	oleh UPT	masyarakat			
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - SOSIALISASI BPOM MELALUI PAMERAN	26,850,000	26,850,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - OPERASIONAL SIKER	8,000,000	8,000,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - FORM KONSULTASI PUBLIK	33,582,000	33,582,000
7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - SAMPLING, UJI CEPAT DAN KIE MELALUI MOBIL LAB KELILING	48,490,000	48,490,000
8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - EDUKASI KOMUNITAS TENTANG OBAT DAN MAKANAN AMAN	28,000,000	28,000,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - KERJASAMA DENGAN LINTAS SEKTOR DI PROVINSI GORONTALO	14,460,000	14,460,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	051 - Koordinasi lintas sektor	A - KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN DENGAN LINTAS SEKTOR	24,600,000	24,600,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DAN SAMPLING PJAS	109,450,000	109,450,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	116,100,000	116,100,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	10,480,000	10,480,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	22,659,000	22,659,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PJAS	29,650,000	29,650,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	6,000,000	6,000,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - DUKUNGAN KOORDINASI KEGIATAN	3,400,000	3,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	H - PERKEMAHAN KADER KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN RINTISAN SAKA POM	86,640,000	86,640,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	052 - Intervensi keamanan PJAS	I - EDUKASI PJAS AMAN OLEH RINTISAN SAKA POM	14,570,000	14,570,000

03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA, PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS INTERVENSI KEAMANAN PJAS	41,160,000	41,160,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PENDAMPINGAN PETUGAS DESA DI PUSAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	26,070,000	26,070,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	94,540,000	94,540,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA	191,610,000	191,610,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	21,420,000	21,420,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	D - SURVEY DESA YANG JADI TARGET	7,120,000	7,120,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4,920,000	4,920,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI	5,240,000	5,240,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	C - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI	10,960,000	10,960,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	D - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	33,159,000	33,159,000
11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - LOMBA DESA PANGAN AMAN	10,080,000	10,080,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR	35,155,000	35,155,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - MEET THE ADMINS	6,960,000	6,960,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	C - WORKSHOP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	6,960,000	6,960,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	8,750,000	8,750,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - SURVEY PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	2,970,000	2,970,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR	29,750,000	29,750,000
7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR	5,520,000	5,520,000
8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - OPERASIONAL KEGIATAN PASAR	4,000,000	4,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - PENYULUHAN PEDAGANG	406,483,000	406,483,000
10.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - SAMPLING DAN PENGUJIAN SAMPEL DI PASAR	15,230,000	15,230,000

3.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	60.67	73.67	86.67	100	16.07	33,819,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	E - Coaching dan Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan	5,140,000	5,140,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN	4,030,000	4,030,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	22,700,000	22,700,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PERTEMUAN DENGAN UMKM	1,949,000	1,949,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	419,156,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	83,024,000	83,024,000
4.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	21,720,000	21,720,000
5.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	8,000,000	8,000,000
7.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,680,000	3,680,000
8.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	18,000,000	18,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		9.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO			055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan			115,812,000	115,812,000	
		10.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO			054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan			4,080,000	4,080,000	
		11.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO			054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan			48,060,000	48,060,000	
		12.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO			051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan			97,680,000	97,680,000	
		14.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO			053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan			19,100,000	19,100,000	
5.	-	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	172,138,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM di Bangka Belitung	9,707,000	9,707,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	D - PEMBENTUKAN PETUGAS PENGGALANGAN DI JAWA BARAT	7,700,000	7,700,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	D - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	21,930,000	21,930,000
4.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	F - Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara ke Pusat/Balai lain	56,100,000	56,100,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	38,161,000	38,161,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	1,377,000	1,377,000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5,928,000	5,928,000
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	E - Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	181,000	181,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Semarang	19,984,000	19,984,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelejen di Bali	11,070,000	11,070,000

01 - Indeks Pelayanan Publik UPT														4.7	62,387,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - ADMINISTRASI SERTIFIKASI	4,317,000	4,317,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - AUDIT SERTIFIKASI	39,390,000	39,390,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka Peningkatan pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap di Jakarta	8,660,000	8,660,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	D - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam	10,020,000	10,020,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AI - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk Pagu Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	12,400,000	6,200,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - Pelatihan Lead Auditor di Jakarta	8,086,000	4,043,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AJ - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agent Perubahan di Denpasar	7,180,000	3,590,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - Keterpaduan Layanan Digital BPOM di Yogyakarta	8,080,000	4,040,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AK - Workshop Anti Korupsi di Batam	9,570,000	4,785,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Forum Koordinasi Teknis JF Pranata Komputer BPOM di Denpasar	7,180,000	3,590,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan				
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - Bimtek SIRUP dan SIPT di Balai Oleh Pusat	19,060,000	9,530,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimtek Refreshment ISO 19011 : 2018 Pedoman Audit Sistem Manajeman Bagi Auditor Internal di Jakarta	6,930,000	3,465,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemanpaatan Laporan Terpadu Badan POM di Bandung	13,760,000	6,880,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - Rapat Pendampingan Asistensi Pertemuan dengan Lintas Sektor	10,440,000	5,220,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Keuangan Pusat Balai	21,240,000	10,620,000
14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PERALATAN DAN FASILITAS SARANA GEDUNG	83,500,000	83,500,000
15.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - MEUBELAIR	30,500,000	30,500,000
16.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat	051 - Pembangunan/renovasi	A - Pengecatan epoksi laboratorium	123,167,000	123,167,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan di Indonesia	gedung dan bangunan			
17.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - Pembuatan Tempat Penampungan Limbah Sementara	86,833,000	86,833,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AD - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digital Arsip) di Jakarta	6,980,000	3,490,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Dukungan Pelaporan Balai	13,500,000	6,750,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 di Jakarta	13,860,000	6,930,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - Penyusunan LAPKIN	1,000,000	500,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Penyusunan LAPTAH	1,000,000	500,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Bimtek Penyusunan Renstra Unit Tahun 2025-2029 di Jakarta	7,030,000	3,515,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Jakarta	5,800,000	2,900,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang	28,410,000	14,205,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Rapat Evaluasi Nasional di JAKARTA	7,320,000	3,660,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Penyusunan Program Kegiatan Balai (RKAKL,DIPA)	10,620,000	5,310,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi di Mataram	11,360,000	5,680,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	T - Rakerkornas Pengawasan Intern Berbasis Resiko di Batam	9,360,000	4,680,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - Pembinaan Balai Oleh Eselon I Pembina	4,480,000	2,240,000
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	U - Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Denpasar	7,270,000	3,635,000
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	V - Bimbingan Teknis UKPBJ Badan POM 2025 di Surabaya	16,440,000	8,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AB - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN Di Jakarta	15,520,000	7,760,000
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	W - Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 : 2015 (Audit Resertifikasi)	4,640,000	2,320,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	X - Pemusnahan Media Limbah B3	50,000,000	25,000,000
36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AC - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Jakarta	6,980,000	3,490,000
37.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Y - Pemutakhiran Data dalam rangka penyusunan BMN (Tahunan Semester 1)	27,720,000	13,860,000
38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Lainnya	23,000,000	11,500,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AE - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja BMN di Manado	19,760,000	9,880,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Rekonsiliasi, Revisi, Konsultasi, Sosialisasi, di Kanwil DJPBN/KPPN/KPKNL	7,080,000	3,540,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
41.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Pelatihan Leadership di Jakarta	7,060,000	3,530,000
42.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AF - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan dan DAK Non Fisik di Kendari	9,570,000	4,785,000
43.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Pelatihan Fungsional Non PFM	13,860,000	6,930,000
44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Jakarta	7,060,000	3,530,000
45.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AG - Bimtek Pengelolaan BMN di Jakarta	9,630,000	4,815,000
46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Pelatihan Kepemimpinan di Jakarta	8,320,000	4,160,000
47.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM di Makassar	7,320,000	3,660,000
48.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AH - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM di Malang	10,710,000	5,355,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
49.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - Rapat Koordinasi Nasional SDM di Denpasar	8,560,000	4,280,000
50.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Koordinasi Pimpinan, Pegawai ke Pusat dan Balai POM Lain	201,894,000	100,947,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.1	360,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AB - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN Di Jakarta	15,520,000	7,760,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Penyusunan Program Kegiatan Balai (RKAKL,DIPA)	10,620,000	5,310,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - Pembinaan Balai Oleh Eselon I Pembina	4,480,000	2,240,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AC - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Jakarta	6,980,000	3,490,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AE - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja BMN di Manado	19,760,000	9,880,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AF - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan dan DAK Non Fisik di Kendari	9,570,000	4,785,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AG - Bimtek Pengelolaan BMN di Jakarta	9,630,000	4,815,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AH - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM di Malang	10,710,000	5,355,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AI - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk Pagu Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AJ - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AK - Workshop Anti Korupsi di Batam	9,570,000	4,785,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimtek Refreshment ISO 19011 : 2018 Pedoman Audit Sistem Manajeman Bagi Auditor Internal di Jakarta	6,930,000	3,465,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Keuangan Pusat Balai	21,240,000	10,620,000
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	051 - koordinasi pengawasan Obat	D - Dukungan Pelaporan Balai	13,500,000	6,750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan	dan Makanan			
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 di Jakarta	13,860,000	6,930,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - Penyusunan LAPKIN	1,000,000	500,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Penyusunan LAPTAH	1,000,000	500,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Bimtek Penyusunan Renstra Unit Tahun 2025-2029 di Jakarta	7,030,000	3,515,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Jakarta	5,800,000	2,900,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang	28,410,000	14,205,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Rapat Evaluasi Nasional di JAKARTA	7,320,000	3,660,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi di Mataram	11,360,000	5,680,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	T - Rakerkornas Pengawasan Intern Berbasis Resiko di Batam	9,360,000	4,680,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	U - Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Denpasar	7,270,000	3,635,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	V - Bimbingan Teknis UKPBJ Badan POM 2025 di Surabaya	16,440,000	8,220,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	W - Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 : 2015 (Audit Resertifikasi)	4,640,000	2,320,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	X - Pemusnahan Media Limbah B3	50,000,000	25,000,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Y - Pemutakhiran Data dalam rangka penyusunan BMN (Tahunan Semester 1)	27,720,000	13,860,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Lainnya	23,000,000	11,500,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Rekonsiliasi, Revisi, Konsultasi, Sosialisasi, di Kanwil DJPBN/KPPN/KPKNL	7,080,000	3,540,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Pelatihan Leadership di Jakarta	7,060,000	3,530,000
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Pelatihan Fungsional Non PFM	13,860,000	6,930,000
33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Jakarta	7,060,000	3,530,000
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Pelatihan Kepemimpinan di Jakarta	8,320,000	4,160,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM di Makassar	7,320,000	3,660,000
36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - Rapat Koordinasi Nasional SDM di Denpasar	8,560,000	4,280,000
37.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Koordinasi Pimpinan, Pegawai ke Pusat dan Balai POM Lain	201,894,000	100,947,000
38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	12,400,000	6,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - Pelatihan Lead Auditor di Jakarta	8,086,000	4,043,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agent Perubahan di Denpasar	7,180,000	3,590,000
41.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - Keterpaduan Layanan Digital BPOM di Yogyakarta	8,080,000	4,040,000
42.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Forum Koordinasi Teknis JF Pranata Komputer BPOM di Denpasar	7,180,000	3,590,000
43.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - Bimtek SIRUP dan SIPT di Balai Oleh Pusat	19,060,000	9,530,000
44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemanpaatan Laporan Terpadu Badan POM di Bandung	13,760,000	6,880,000
45.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - Rapat Pendampingan Asistensi Pertemuan dengan Lintas Sektor	10,440,000	5,220,000
46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AD - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digital Arsip) di Jakarta	6,980,000	3,490,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,511,080,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	6,000,000	6,000,000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Dukungan Kegiatan dan Pelaporan BMN	990,000	990,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	282,640,000	282,640,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Keperluan sehari-hari Perkantoran	225,030,000	225,030,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	112,620,000	112,620,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Pemeliharaan Gedung	281,240,000	281,240,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1,237,252,000	1,237,252,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA	81,600,000	81,600,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	88,800,000	88,800,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK	932,831,000	932,831,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Jasa Pos Giro	12,844,000	12,844,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Langganan Daya dan Jasa	655,476,000	655,476,000
13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja (SATWIL BMN) di Manado	7,010,000	7,010,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PEMERIKSAAN KESEHATAN	202,500,000	202,500,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - SEWA RUMAH DINAS	80,000,000	80,000,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PERENCANAAN SAI	16,320,000	16,320,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Koordinasi Pimpinan	65,340,000	65,340,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	3,222,587,000	3,222,587,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														3	88,055,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - Penempatan CPNS	8,055,000	8,055,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PENGOLAH DATA	80,000,000	80,000,000

Total	14,824,923,000

Gorontalo, 07 October 2025

Kepala Balai Besar POM di Gorontalo



LINTANG PURBA JAYA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: STEPANUS SIMON SESA
Jabatan	: Kepala Balai POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama Kepala Balai POM di Gorontalo	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
STEPANUS SIMON SESA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Percentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Percentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,526,300,000 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,220,512,000

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Gorontalo

STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	650,662,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,189,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	988,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	166,961,800
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	114,141,800
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	57,070,900
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	28,535,450
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	20,357,950
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	2,550,247,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	33,819,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	475,256,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	116,038,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.1	360,500,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,220,512,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	80,000,000
														Total	14,526,300,000

Gorontalo, 12 February 2025

Balai POM di Gorontalo

STEPANUS SIMON SESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LINTANG PURBA JAYA
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 07 October 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar	Kepala Badan Pengawas
POM di Gorontalo	Obat Makanan RI
	
LINTANG PURBA JAYA	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.75 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Percentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Percentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.1
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67 Percentase
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.07 Persentase
4.	06 - Terlaksananya	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan	85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,824,923,000 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,519,135,000

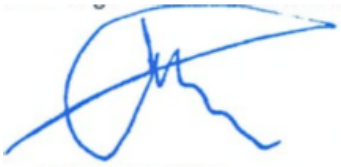
Gorontalo, 07 October 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar
POM di Gorontalo



LINTANG PURBA JAYA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	85.75	85.75	85.75	85.75	85.75	357,810,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN	180,105,000	135,078,750
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN	222,732,000	222,732,000

	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													26	38,650,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS KEPADA PETUGAS SARANA PELAYANAN KESEHATAN (RS/PKM/KLINIK)	38,650,000	38,650,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	87	87	87	87	87	171,997,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
13.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	139,500,000	139,500,000
14.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	32,497,500

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27,081,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	27,081,250

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	37,913,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	37,913,750

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	22,463,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI	44,927,000	22,463,500

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	22,463,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OMKA OLEH PETUGAS BALAI	44,927,000	22,463,500

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	93,175,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	1,660,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	12,645,600
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau	57,972,000	11,594,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		UPT Badan POM Lain		
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	8,228,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	57,512,000
16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	1,535,600

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	290,451,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	28,986,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	4,150,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen	7,678,000	3,839,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Kesehatan		
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	20,570,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	201,292,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	31,614,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90	90	55,796,100

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	1,919,500
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	14,493,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional,	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA	63,228,000	12,645,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	24,162,240

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN		
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	14,378,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	10,285,000
18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	2,075,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - Pembentukan Inspektur Junior Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7,678,000	383,900
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	1,028,500
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	M - Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan di Pusat atau UPT Badan POM Lain	57,972,000	2,898,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	5,058,240
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Kalibrasi Eksternal Alat Ukur untuk Pengawasan	8,300,000	415,000
17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian, Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan	287,560,000	14,378,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								85	85	85	85	85	46,054,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL DAN PROMOSI PRODUK OMKA DAN ROKOK	41,140,000	1,028,500
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT, BAHAN ALAM, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN	180,105,000	45,026,250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	61,168,560

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	O - KIE Pengendalian resistensi Antimikroba Kepada Masyarakat	20,629,000	20,629,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	N - Bimtek Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Pemilik/Penanggung Jawab Apotek	18,275,000	18,275,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - DUKUNGAN KOORDINASI CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	63,228,000	1,264,560
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	P - Pelatihan dan Sertifikasi QRMA	21,000,000	21,000,000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65	65	65	65.1	2,603,067,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	K - PELATIHAN PENUGASAN PENGUJIAN SPESIFIK DALAM SISTEM REGIONALISASI LABORATORIUM BPOM	10,620,000	10,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	D - KALIBRASI EKSTERNAL	35,000,000	35,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	C - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	39,680,000	39,680,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	J - PELATIHAN VALIDASI PENGUJIAN CEPAT MIKROBIOLOGI SAMPEL KLB	9,260,000	9,260,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL (Kimia Obat, Kimia Nappza, Kimia OT-SK, Kimia Kosmetik, Kimia Pangan, Mikrobiologi)	88,980,000	88,980,000
6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	B - DUKUNGAN LABORATORIUM	230,932,000	230,932,000
7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	E - UJI PROFISIENSI DENGAN KAS / INSTANSI / LEMBAGA LAINNYA	3,000,000	3,000,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI/BALAI BESAR POM KIMIA OBAT, BAHAN	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF		
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	A - FOOD SECURITY DAN PENANGANAN KLB	52,820,000	52,820,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	F - PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALAT LABORATORIUM	358,760,000	358,760,000
11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	I - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR / BALAI / LOKA	12,610,000	12,610,000
12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	G - IURAN KAN	1,500,000	1,500,000
13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	H - PELATIHAN TEKNIS JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES DAN GMO	12,610,000	12,610,000
14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	L - BIMBINGAN TEKNIS PERKUATAN PENEGAKAN KASUS MELALUI PENGUJIAN KOSMETIK	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	H - PENGADAAN GLASSWARE	40,000,000	40,000,000
16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	J - PENGADAAN REAGEN PREKURSOR DAN B2	50,000,000	50,000,000
17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	G - BIMBINGAN TEKNIS LRPPI BAHAN KONTAK PANGAN OLAHAN	12,610,000	12,610,000
18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	I - PENGADAAN REAGEN / MEDIA MIKRO UNTUK PENGUJIAN SAMPEL PIHAK KETIGA	120,000,000	120,000,000
19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	K - PENGADAAN SUKU CADANG	259,437,000	259,437,000
20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	F - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR / BALAI POM KIMIA PANGAN OLAHAN DAN AIR	12,610,000	12,610,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	E - BIMBINGAN TEKNIS LRPPI CEMARAN LOGAM DAN MIKOTOKSIN PANGAN OLAHAN	12,610,000	12,610,000
22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	L - PENGADAAN BAKU PEMBANDING	50,000,000	50,000,000
23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	D - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	12,610,000	12,610,000
24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	M - PENGADAAN KIT PENGUJIAN	200,000,000	200,000,000
25.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pengadaan Alat Laboratorium Balai POM di Gorontalo	811,348,000	811,348,000
26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A - SURVEILANCE SNI/IEC ISO 17025	88,290,000	88,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	B - PENINGKATAN KAPASITAS PENGUJI DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM	39,950,000	39,950,000
28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN PENGUJIAN KIMIA KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12,610,000	12,610,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												16.67	10,832,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	108,325,000	10,832,500

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - TALKSHOW, SOSIALISASI, DI MEDIA, LAYANAN INTERNET PUBLIK	59,552,000	59,552,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - WORKSHOP KERJASAMA DALAM NEGERI	5,700,000	5,700,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - WORKSHOP INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2025	13,960,000	13,960,000
4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - SOSIALISASI BPOM MELALUI PAMERAN	26,850,000	26,850,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - OPERASIONAL SIKER	8,000,000	8,000,000
6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	C - FORM KONSULTASI PUBLIK	33,582,000	33,582,000
7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	D - SAMPLING, UJI CEPAT DAN KIE MELALUI MOBIL LAB KELILING	48,490,000	48,490,000
8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	E - EDUKASI KOMUNITAS TENTANG OBAT DAN MAKANAN AMAN	28,000,000	28,000,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - KERJASAMA DENGAN LINTAS SEKTOR DI PROVINSI GORONTALO	14,460,000	14,460,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN DENGAN LINTAS SEKTOR	24,600,000	24,600,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DAN SAMPLING PJAS	109,450,000	109,450,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	116,100,000	116,100,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN	10,480,000	10,480,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH	22,659,000	22,659,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - PENGAWALAN SEKOLAH YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PJAS	29,650,000	29,650,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - PEMBERIAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN	6,000,000	6,000,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - DUKUNGAN KOORDINASI KEGIATAN	3,400,000	3,400,000
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	H - PERKEMAHAN KADER KEAMANAN OBAT DAN MAKANAN RINTISAN SAKA POM	86,640,000	86,640,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	I - EDUKASI PJAS AMAN OLEH RINTISAN SAKA POM	14,570,000	14,570,000

03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA, PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS INTERVENSI KEAMANAN PJAS	41,160,000	41,160,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PENDAMPINGAN PETUGAS DESA DI PUSAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN DESA	26,070,000	26,070,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KKPD)	94,540,000	94,540,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA	191,610,000	191,610,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA	21,420,000	21,420,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	D - SURVEY DESA YANG JADI TARGET	7,120,000	7,120,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	4,920,000	4,920,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	B - PENGAMBILAN DATA DALAM RANGKA SURVEI PRE DAN POST INTERVENSI	5,240,000	5,240,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	C - PENGAWALAN DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI	10,960,000	10,960,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	D - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	33,159,000	33,159,000
11.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - LOMBA DESA PANGAN AMAN	10,080,000	10,080,000

04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR	35,155,000	35,155,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - MEET THE ADMINS	6,960,000	6,960,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	C - WORKSHOP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	6,960,000	6,960,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	D - WORKSHOP KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	8,750,000	8,750,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - SURVEY PASAR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	2,970,000	2,970,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR	29,750,000	29,750,000
7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	C - KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR	5,520,000	5,520,000
8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D - OPERASIONAL KEGIATAN PASAR	4,000,000	4,000,000
9.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	E - PENYULUHAN PEDAGANG	406,483,000	406,483,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - SAMPLING DAN PENGUJIAN SAMPEL DI PASAR	15,230,000	15,230,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	60.67	73.67	86.67	100	16.07	33,819,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	E - Coaching dan Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan	5,140,000	5,140,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN	4,030,000	4,030,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	22,700,000	22,700,000
4.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PERTEMUAN DENGAN UMKM	1,949,000	1,949,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	419,156,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	83,024,000	83,024,000
4.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	21,720,000	21,720,000
5.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	8,000,000	8,000,000
7.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,680,000	3,680,000
8.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	18,000,000	18,000,000
9.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	115,812,000	115,812,000
10.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	4,080,000	4,080,000
11.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	48,060,000	48,060,000
12.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	97,680,000	97,680,000
14.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan	B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan	19,100,000	19,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	BPOM GORONTALO	dan Olah TKP	Makanan		

5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	172,138,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM di Bangka Belitung	9,707,000	9,707,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	D - PEMBENTUKAN PETUGAS PENGGALANGAN DI JAWA BARAT	7,700,000	7,700,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	D - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	21,930,000	21,930,000
4.	DR.3165.QCD.U68 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM GORONTALO	055 - Pemberkasan	F - Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara ke Pusat/Balai lain	56,100,000	56,100,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	38,161,000	38,161,000
6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	1,377,000	1,377,000
7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	5,928,000	5,928,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	E - Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	181,000	181,000
9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan di Semarang	19,984,000	19,984,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelejen di Bali	11,070,000	11,070,000

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - ADMINISTRASI SERTIFIKASI	4,317,000	4,317,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - AUDIT SERTIFIKASI	39,390,000	39,390,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C - Bimbingan Teknis kepada Petugas UPT dalam rangka Peningkatan pelayanan Publik Sertifikasi CPOTB Bertahap di Jakarta	8,660,000	8,660,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	D - Forum Koordinasi dan Komunikasi Perkuatan Pengawasan dan Pelayanan Publik terkait Pemasukan Kosmetik dan Sertifikasi CPKB di Batam	10,020,000	10,020,000

7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Organisasi yang optimal														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AI - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk Pagu Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	12,400,000	6,200,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - Pelatihan Lead Auditor di Jakarta	8,086,000	4,043,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AJ - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agent Perubahan di Denpasar	7,180,000	3,590,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - Keterpaduan Layanan Digital BPOM di Yogyakarta	8,080,000	4,040,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AK - Workshop Anti Korupsi di Batam	9,570,000	4,785,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Forum Koordinasi Teknis JF Pranata Komputer BPOM di Denpasar	7,180,000	3,590,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - Bimtek SIRUP dan SIPT di Balai Oleh Pusat	19,060,000	9,530,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimtek Refreshment ISO 19011 : 2018 Pedoman Audit Sistem Manajeman Bagi	6,930,000	3,465,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dan Makanan		Auditor Internal di Jakarta		
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemanpaatan Laporan Terpadu Badan POM di Bandung	13,760,000	6,880,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - Rapat Pendampingan Asistensi Pertemuan dengan Lintas Sektor	10,440,000	5,220,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Keuangan Pusat Balai	21,240,000	10,620,000
14.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PERALATAN DAN FASILITAS SARANA GEDUNG	83,500,000	83,500,000
15.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - MEUBELAIR	30,500,000	30,500,000
16.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - Pengecatan epoksi laboratorium	123,167,000	123,167,000
17.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - Pembuatan Tempat Penampungan Limbah Sementara	86,833,000	86,833,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AD - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digital Arsip) di Jakarta	6,980,000	3,490,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Dukungan Pelaporan Balai	13,500,000	6,750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 di Jakarta	13,860,000	6,930,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - Penyusunan LAPKIN	1,000,000	500,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Penyusunan LAPTAH	1,000,000	500,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Bimtek Penyusunan Renstra Unit Tahun 2025-2029 di Jakarta	7,030,000	3,515,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Jakarta	5,800,000	2,900,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang	28,410,000	14,205,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Rapat Evaluasi Nasional di JAKARTA	7,320,000	3,660,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Penyusunan Program Kegiatan Balai (RKAKL,DIPA)	10,620,000	5,310,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi di Mataram	11,360,000	5,680,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	T - Rakerkornas Pengawasan Intern Berbasis Resiko di Batam	9,360,000	4,680,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - Pembinaan Balai Oleh Eselon I Pembina	4,480,000	2,240,000
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	U - Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Denpasar	7,270,000	3,635,000
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	V - Bimbingan Teknis UKPBJ Badan POM 2025 di Surabaya	16,440,000	8,220,000
33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AB - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN Di Jakarta	15,520,000	7,760,000
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	W - Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 : 2015 (Audit Resertifikasi)	4,640,000	2,320,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	X - Pemusnahan Media Limbah B3	50,000,000	25,000,000
36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AC - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Jakarta	6,980,000	3,490,000
37.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Y - Pemutakhiran Data dalam rangka penyusunan BMN (Tahunan Semester 1)	27,720,000	13,860,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Lainnya	23,000,000	11,500,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AE - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja BMN di Manado	19,760,000	9,880,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Rekonsiliasi, Revisi, Konsultasi, Sosialisasi, di Kanwil DJPBN/KPPN/KPKNL	7,080,000	3,540,000
41.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Pelatihan Leadership di Jakarta	7,060,000	3,530,000
42.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AF - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan dan DAK Non Fisik di Kendari	9,570,000	4,785,000
43.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Pelatihan Fungsional Non PFM	13,860,000	6,930,000
44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Jakarta	7,060,000	3,530,000
45.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AG - Bimtek Pengelolaan BMN di Jakarta	9,630,000	4,815,000
46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Pelatihan Kepemimpinan di Jakarta	8,320,000	4,160,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
47.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM di Makassar	7,320,000	3,660,000
48.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AH - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM di Malang	10,710,000	5,355,000
49.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - Rapat Koordinasi Nasional SDM di Denpasar	8,560,000	4,280,000
50.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Koordinasi Pimpinan, Pegawai ke Pusat dan Balai POM Lain	201,894,000	100,947,000

02 - Nilai AKIP UPT BPOM														80.1	360,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AB - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN Di Jakarta	15,520,000	7,760,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Penyusunan Program Kegiatan Balai (RKAKL,DIPA)	10,620,000	5,310,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - Pembinaan Balai Oleh Eselon I Pembina	4,480,000	2,240,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AC - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Jakarta	6,980,000	3,490,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AE - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja BMN di Manado	19,760,000	9,880,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AF - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan dan DAK Non Fisik di Kendari	9,570,000	4,785,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AG - Bimtek Pengelolaan BMN di Jakarta	9,630,000	4,815,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AH - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM di Malang	10,710,000	5,355,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AI - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL/TOR/Data Dukung dan Desk Pagu Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AJ - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran di Jakarta	6,980,000	3,490,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AK - Workshop Anti Korupsi di Batam	9,570,000	4,785,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Bimtek Refreshment ISO 19011 : 2018 Pedoman Audit Sistem Manajeman Bagi Auditor Internal di Jakarta	6,930,000	3,465,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Keuangan Pusat Balai	21,240,000	10,620,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - Dukungan Pelaporan Balai	13,500,000	6,750,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited 2024 di Jakarta	13,860,000	6,930,000
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	G - Penyusunan LAPKIN	1,000,000	500,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	H - Penyusunan LAPTAH	1,000,000	500,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Bimtek Penyusunan Renstra Unit Tahun 2025-2029 di Jakarta	7,030,000	3,515,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di Jakarta	5,800,000	2,900,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	K - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang	28,410,000	14,205,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	L - Rapat Evaluasi Nasional di JAKARTA	7,320,000	3,660,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	N - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi di Mataram	11,360,000	5,680,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	T - Rakerkornas Pengawasan Intern Berbasis Resiko di Batam	9,360,000	4,680,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	U - Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Denpasar	7,270,000	3,635,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	V - Bimbingan Teknis UKPBJ Badan POM 2025 di Surabaya	16,440,000	8,220,000
26.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	W - Pemeliharaan dan Peningkatan QMS ISO 9001 : 2015 (Audit Resertifikasi)	4,640,000	2,320,000
27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	X - Pemusnahan Media Limbah B3	50,000,000	25,000,000
28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Y - Pemutakhiran Data dalam rangka penyusunan BMN (Tahunan Semester 1)	27,720,000	13,860,000
29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Kerjasama Antar Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Lainnya	23,000,000	11,500,000
30.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Rekonsiliasi, Revisi, Konsultasi, Sosialisasi, di Kanwil DJPBN/KPPN/KPKNL	7,080,000	3,540,000
31.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Pelatihan Leadership di Jakarta	7,060,000	3,530,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Pelatihan Fungsional Non PFM	13,860,000	6,930,000
33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Workshop analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Jakarta	7,060,000	3,530,000
34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Pelatihan Kepemimpinan di Jakarta	8,320,000	4,160,000
35.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	G - Pelatihan Teknis dan Fungsional PFM di Makassar	7,320,000	3,660,000
36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	H - Rapat Koordinasi Nasional SDM di Denpasar	8,560,000	4,280,000
37.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	I - Koordinasi Pimpinan, Pegawai ke Pusat dan Balai POM Lain	201,894,000	100,947,000
38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	K - Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani	12,400,000	6,200,000
39.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	L - Pelatihan Lead Auditor di Jakarta	8,086,000	4,043,000
40.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	M - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agent Perubahan di Denpasar	7,180,000	3,590,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
41.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	N - Keterpaduan Layanan Digital BPOM di Yogyakarta	8,080,000	4,040,000
42.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	O - Forum Koordinasi Teknis JF Pranata Komputer BPOM di Denpasar	7,180,000	3,590,000
43.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	P - Bimtek SIRUP dan SIPT di Balai Oleh Pusat	19,060,000	9,530,000
44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Q - Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pemanpaatan Laporan Terpadu Badan POM di Bandung	13,760,000	6,880,000
45.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	S - Rapat Pendampingan Asistensi Pertemuan dengan Lintas Sektor	10,440,000	5,220,000
46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AD - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digital Arsip) di Jakarta	6,980,000	3,490,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	7,511,080,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	6,000,000	6,000,000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - Dukungan Kegiatan dan Pelaporan BMN	990,000	990,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	282,640,000	282,640,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - Keperluan sehari-hari Perkantoran	225,030,000	225,030,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	112,620,000	112,620,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Pemeliharaan Gedung	281,240,000	281,240,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1,237,252,000	1,237,252,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA	81,600,000	81,600,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	88,800,000	88,800,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	B - Pembayaran gaji dan tunjangan PPPK	932,831,000	932,831,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Jasa Pos Giro	12,844,000	12,844,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - Langganan Daya dan Jasa	655,476,000	655,476,000
13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	B - Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja (SATWIL BMN) di Manado	7,010,000	7,010,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - PEMERIKSAAN KESEHATAN	202,500,000	202,500,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	O - SEWA RUMAH DINAS	80,000,000	80,000,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PERENCANAAN SAI	16,320,000	16,320,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K - Koordinasi Pimpinan	65,340,000	65,340,000
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	3,222,587,000	3,222,587,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														3	88,055,000

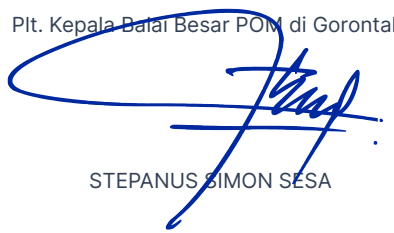
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	L - Penempatan CPNS	8,055,000	8,055,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN PENGOLAH DATA	80,000,000	80,000,000

Total	14,824,923,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Gorontalo, 29 August 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.07.2.08.25.451

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Sekretaris Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025
Tanggal	:	14 Agustus 2025

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan berapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja agar melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
2. Revisi PK dan RAPK 2025 mengacu pada :
   a. Alokasi anggaran pada DIPA Harian tahun 2025
   b. Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029
   c. Breakdown target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025
   d. Terhadap target indikator yang bersifat jumlah atau sama dengan target Rincian Output (RO) maka target tetap mengacu DIPA Harian sesuai kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tindak lanjut Instruksi Presiden dalam Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dimana K/L belum diperbolehkan melakukan revisi target pada RO yang terdampak blokir anggaran.
   e. Indikator yang seluruh dukungan anggarannya terdampak blokir maka penetapan target pada RAPK hanya di B12. Adapun untuk indikator yang sebagian dukungan anggarannya masih terdanai agar menyesuaikan target B8 hingga B11 sesuai anggaran yang tersedia.
3. Kertas kerja yang digunakan adalah kertas kerja Renstra. Seluruh unit Pusat kerja agar menyiapkan kertas kerja Rancangan Renstra masing-masing sebagai dasar penyusunan PK dan RAPK 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan.
5. Terhadap kebijakan monitoring dan evaluasi PK RAPK 2025, seluruh unit agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   a. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu Dokumen RAPK awal karena kegiatan telah terlaksana mengacu manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029 sesuai Surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025
   b. Berdasarkan ketentuan poin (a) maka tidak dilakukan perubahan atau perhitungan ulang terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I dan II yang telah ditetapkan sebelumnya.
   c. Terhadap indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama pada indikator yang mengalami perubahan cara perhitungan maka seluruh unit perlu melakukan perhitungan ulang terhadap realisasi indikator untuk TW I dan II berdasarkan Manual IKU terbaru, agar kinerja TW III dapat diperbandingkan dengan TW I dan TW II. Pembaruan data tersebut dicantumkan pada Laporan Kinerja Interm TW III beserta justifikasi perubahan data, serta pada https://bit.ly/capaianUPTtahun2025 (folder Entry RHPK UPT) dan https://simetris.pom.go.id/eperformance_new (menu Realisasi IKU).
   d. Sebagai catatan terhadap ketentuan tersebut, pada cetak dokumen RAPK agar dapat ditambahkan klausul sebagai berikut; *"Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan)".*
   e. Apabila tidak terdapat relaksasi blokir sampai dengan akhir tahun maka untuk indikator kinerja yang tidak terdapat alokasi anggaran (Rp0), dapat dikecualikan dari perhitungan NKO. Sedangkan untuk indikator yang sebagian anggarannya terblokir, maka disampaikan justifikasi tidak tercapainya target pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance dan pada Laporan Kinerja.
6. PK dan RAPK disusun melalui aplikasi Simetris e-Planning (https://simetris.pom.go.id/new). Tahapan yang perlu dilakukan dalam revisi PK dan RAPK yaitu :
   a. Melakukan upload data ADK DIPA Harian 2025 (Data mentah anggaran) melalui menu ADK sebagai data alokasi anggaran 2025. Data ADK masing-masing Satker dapat di akses pada link materi folder "ADK DIPA Harian 2025".
   b. Memutakhirkan data referensi Sub-Komponen pada menu Renja Satker mengacu pada POK 2025 masing-masing Satker jika terdapat perubahan.
   c. Melakukan input target bulanan Indikator Kinerja serta memutakhirkan pemetaan anggaran (*tagging* dukungan sub komponen) pada level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) melalui menu PK/RAPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. *Tagging* dukungan sub komponen terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) mengacu pada Pedoman *Cascading.*
e. Pada menu PK/RAPK, perlu dilakukan input instrumen data reviu indikator (Matrik A2) berupa realisasi n-1 dan n-2, target Renstra/RKT, dan target rekomendasi unit pengampu.
f. Melakukan pencetakan dokumen PK dan RAPK melalui menu Rekapitulasi untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Unit.
g. Dokumen PK RAPK yang telah ditanda tangani oleh Kepala Unit agar diunggah pada tautan materi folder Dokumen Revisi PK RAPK TTD Kepala Unit.

7. Seluruh dokumen dan materi terkait penyusunan PK dan RAPK 2025 dapat di akses melalui tautan https://bit.ly/PK-REVISI-2025
8. Seluruh unit agar menyelesaian Revisi PK dan RAPK pada Aplikasi Simetris e-Planning pada **20 Agustus 2025** untuk kemudian dilakukan reviu oleh PIC Tim Perencanaan.
9. Batas akhir penetapan PK/RAPK oleh Kepala Unit Kerja adalah pada **29 Agustus 2025** untuk kemudian secara kolektif diajukan pengesahan oleh Kepala Badan POM.
10. Terhadap dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengunggah dokumen final ke Website BPOM menu Laporan, selanjutnya seluruh unit kerja dapat mengunduh dokumen tersebut untuk di upload pada e-SAKIP Reviu (ESR) Kemenpan RB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).